



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 18 TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- menimbang : a. bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015.
- mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

MEMUTUSKAN :

menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011-2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

alam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis dan Dinas Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Pemerintah Daerah 2011-2015, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

BAB II RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH Pasal 2

- 1) RPJM Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Lampung Selatan hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010.
- 2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

Pasal 5

Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 6

RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 21 Oktober 2010

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

RYCKO MENOZA SZP

undangkan di Kalianda
pada tanggal 21 Oktober 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

SUYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2010 NOMOR 18



BUPATI LAMPUNG SELATAN

SAMBUTAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyambut gembira atas telah selesainya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2011 - 2015 Kabupaten Lampung Selatan. Dokumen RPJMD ini disusun sebagai upaya pengejawantahan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan berkedudukan sebagai dokumen perencanaan lima tahunan (2011-2015).

RPJMD ini disusun atas dasar potensi dan permasalahan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan serta dinamika lingkungan strategis guna menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, berkualitas dan berkelanjutan bagi kemajuan dan kemakmuran daerah serta kesejahteraan seluruh masyarakat Kabupaten Lampung Selatan secara berkeadilan. Penyusunan dokumen RPJMD ini juga telah memperhatikan kondisi statistik regional dan lokal, terutama data tentang PDRB, statistik berbagai fungsi pemerintahan di bidang ekonomi, statistik fungsi-fungsi pemerintahan di bidang sosial budaya, pemerintahan umum, bidang fisik prasarana, dan kapasitas fiskal dan keuangan daerah. Semua data statistik tersebut di atas dimaksudkan untuk mengetahui kondisi riil setiap bidang sehingga mudah untuk menentukan proyeksi perubahan yang diharapkan lima tahun ke depan.

Dengan tersusunnya dokumen RPJMD ini diharapkan akan memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen stakeholders (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) didalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama, sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh masing-masing pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif dan melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Akhirnya semoga Dokumen RPJMD ini dapat bermanfaat bagi kita semua serta kemajuan dan kemakmuran Kabupaten Lampung Selatan di masa-masa yang akan datang. Terimakasih.

Kalianda, Oktober 2010
BUPATI LAMPUNG SELATAN

RYCKY MENOZA SZP



PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH
DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
TAHUN 2011-2015**

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011-2015

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sebagaimana yang telah diamanatkan dalam ketentuan pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dipandang perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, dipandang perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389)
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844)
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 4438);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2004-2009;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011-2015.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan

6. Satuan Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Lembaga Teknis dan Dinas Daerah yang ada di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2011-2015, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Pemerintah Daerah 2011-2015, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Pemerintah Daerah, adalah Dokumen Perencanaan Satuan Kerja untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH

Pasal 2

- (1) RPJM Daerah Kabupaten Lampung Selatan merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Bupati Lampung Selatan hasil pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan secara langsung pada tahun 2010.
- (2) RPJM Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 3

SKPD melaksanakan program dalam RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 4

SKPD dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

Pasal 5

Bappeda melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJM Daerah yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 6

RPJM Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2.6	Potensi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	32
2.6.1	Potensi Pertanian	32
2.6.2	Potensi Peternakan	32
2.6.3	Potensi Perikanan dan Kelautan	35
2.6.4	Potensi Kehutanan	36
2.6.5	Potensi Industri Dan Perdagangan	36
2.6.6	Potensi Pariwisata	37
2.6.7	Potensi Lahan	37
2.6.8	Kondisi Kesejahteraan Masyarakat	38
2.6.9	Pemerintahan Daerah	39
III.	VISI DAN MISI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2010 – 1015	41
3.1	Visi Kabupaten Lampung Selatan	41
3.2	Misi Kabupaten Lampung Selatan	44
IV.	ANALISIS ISU STRATEGIS	48
4.1	Isu Global	48
4.2	Isu Nasional	49
4.3	Isu Propinsi Lampung	50
4.3.1	Isu Bidang Ekonomi	50
4.3.2	Isu Bidang Sosial Budaya Dan Kependudukan	56
4.3.3	Isu Bidang Infrastruktur	61
4.3.4	Isu Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan	63
4.3.5	Isu Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	65
4.3.6	Isu Bidang Politik Dan Keamanan	68
4.4	Isu Kabupaten Lampung Selatan	69
V.	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	70
5.1	Strategi Pembangunan Daerah	70
5.2	Indikator Kinerja Utama	80
VI.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	86
6.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	86
6.1.1	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	86
6.1.2	Permasalahan Dan Solusi	89

2.6	Potensi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	32
2.6.1	Potensi Pertanian	32
2.6.2	Potensi Peternakan	32
2.6.3	Potensi Perikanan dan Kelautan	35
2.6.4	Potensi Kehutanan	36
2.6.5	Potensi Industri Dan Perdagangan	36
2.6.6	Potensi Pariwisata	37
2.6.7	Potensi Lahan	37
2.6.8	Kondisi Kesejahteraan Masyarakat	38
2.6.9	Pemerintahan Daerah	39
III.	VISI DAN MISI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2010 – 1015	41
3.1	Visi Kabupaten Lampung Selatan	41
3.2	Misi Kabupaten Lampung Selatan	44
IV.	ANALISIS ISU STRATEGIS	48
4.1	Isu Global	48
4.2	Isu Nasional	49
4.3	Isu Propinsi Lampung	50
4.3.1	Isu Bidang Ekonomi	50
4.3.2	Isu Bidang Sosial Budaya Dan Kependudukan	56
4.3.3	Isu Bidang Infrastruktur	61
4.3.4	Isu Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan	63
4.3.5	Isu Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	65
4.3.6	Isu Bidang Politik Dan Keamanan	68
4.4	Isu Kabupaten Lampung Selatan	69
V.	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	70
5.1	Strategi Pembangunan Daerah	70
5.2	Indikator Kinerja Utama	80
VI.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	86
6.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	86
6.1.1	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	86
6.1.2	Permasalahan Dan Solusi	89

2.6	Potensi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	32
2.6.1	Potensi Pertanian	32
2.6.2	Potensi Peternakan	32
2.6.3	Potensi Perikanan dan Kelautan	35
2.6.4	Potensi Kehutanan	36
2.6.5	Potensi Industri Dan Perdagangan	36
2.6.6	Potensi Pariwisata	37
2.6.7	Potensi Lahan	37
2.6.8	Kondisi Kesejahteraan Masyarakat	38
2.6.9	Pemerintahan Daerah	39
III.	VISI DAN MISI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2010 – 1015	41
3.1	Visi Kabupaten Lampung Selatan	41
3.2	Misi Kabupaten Lampung Selatan	44
IV.	ANALISIS ISU STRATEGIS	48
4.1	Isu Global	48
4.2	Isu Nasional	49
4.3	Isu Propinsi Lampung	50
4.3.1	Isu Bidang Ekonomi	50
4.3.2	Isu Bidang Sosial Budaya Dan Kependudukan	56
4.3.3	Isu Bidang Infrastruktur	61
4.3.4	Isu Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan	63
4.3.5	Isu Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	65
4.3.6	Isu Bidang Politik Dan Keamanan	68
4.4	Isu Kabupaten Lampung Selatan	69
V.	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	70
5.1	Strategi Pembangunan Daerah	70
5.2	Indikator Kinerja Utama	80
VI.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	86
6.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	86
6.1.1	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	86
6.1.2	Permasalahan Dan Solusi	89

2.6	Potensi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	32
2.6.1	Potensi Pertanian	32
2.6.2	Potensi Peternakan	32
2.6.3	Potensi Perikanan dan Kelautan	35
2.6.4	Potensi Kehutanan	36
2.6.5	Potensi Industri Dan Perdagangan	36
2.6.6	Potensi Pariwisata	37
2.6.7	Potensi Lahan	37
2.6.8	Kondisi Kesejahteraan Masyarakat	38
2.6.9	Pemerintahan Daerah	39
III.	VISI DAN MISI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2010 – 1015	41
3.1	Visi Kabupaten Lampung Selatan	41
3.2	Misi Kabupaten Lampung Selatan	44
IV.	ANALISIS ISU STRATEGIS	48
4.1	Isu Global	48
4.2	Isu Nasional	49
4.3	Isu Propinsi Lampung	50
4.3.1	Isu Bidang Ekonomi	50
4.3.2	Isu Bidang Sosial Budaya Dan Kependudukan	56
4.3.3	Isu Bidang Infrastruktur	61
4.3.4	Isu Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan	63
4.3.5	Isu Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	65
4.3.6	Isu Bidang Politik Dan Keamanan	68
4.4	Isu Kabupaten Lampung Selatan	69
V.	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	70
5.1	Strategi Pembangunan Daerah	70
5.2	Indikator Kinerja Utama	80
VI.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	86
6.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	86
6.1.1	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	86
6.1.2	Permasalahan Dan Solusi	89

2.6	Potensi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	32
2.6.1	Potensi Pertanian	32
2.6.2	Potensi Peternakan	32
2.6.3	Potensi Perikanan dan Kelautan	35
2.6.4	Potensi Kehutanan	36
2.6.5	Potensi Industri Dan Perdagangan	36
2.6.6	Potensi Pariwisata	37
2.6.7	Potensi Lahan	37
2.6.8	Kondisi Kesejahteraan Masyarakat	38
2.6.9	Pemerintahan Daerah	39
III.	VISI DAN MISI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2010 – 1015	41
3.1	Visi Kabupaten Lampung Selatan	41
3.2	Misi Kabupaten Lampung Selatan	44
IV.	ANALISIS ISU STRATEGIS	48
4.1	Isu Global	48
4.2	Isu Nasional	49
4.3	Isu Propinsi Lampung	50
4.3.1	Isu Bidang Ekonomi	50
4.3.2	Isu Bidang Sosial Budaya Dan Kependudukan	56
4.3.3	Isu Bidang Infrastruktur	61
4.3.4	Isu Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan	63
4.3.5	Isu Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan	65
4.3.6	Isu Bidang Politik Dan Keamanan	68
4.4	Isu Kabupaten Lampung Selatan	69
V.	STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH	70
5.1	Strategi Pembangunan Daerah	70
5.2	Indikator Kinerja Utama	80
VI.	ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH	86
6.1	Pengelolaan Pendapatan Daerah	86
6.1.1	Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah	86
6.1.2	Permasalahan Dan Solusi	89

6.2 Kebijakan Umum Keuangan Daerah	90
6.3 Proyeksi Penerimaan Daerah Lampung Selatan 2011 – 2015	91
VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH	95
VIII. PENUTUP	106
8.1 Program Transisi	106
8.2 Kaidah Pelaksanaan	106
8.2.1 RPJMD Merupakan Pedoman Bagi SKPD	106
8.2.2 RPJMD Merupakan Pedoman Bagi Penyusunan RKPD	107
8.2.3 Penguatan Peran Stakeholder	107
8.2.4 Dasar Evaluasi Dan Laporan Pelaksanaan	108
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan	8
Tabel 2. Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Selatan 2005 – 2008	12
Tabel 3. Banyaknya Keluarga Menurut Pentahapan 2009	13
Tabel 4. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Lampung Selatan menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2009.....	14
Tabel 5. PDRB Kabupaten Lampung Selatan & Pertumbuhan Riil Tahun 2004 – 2008.....	17
Tabel 6. Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006 – 2011.....	18
Tabel 7. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.....	19
Tabel 8. Rata – Rata Laju Inflasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004 – 2008.....	20
Tabel 9. Proyeksi PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2011 – 2015 Skenario I (5.5%).....	21
Tabel 10. Proyeksi PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2011 – 2015 Skenario II (6.5%).....	21
Tabel 11. Proyeksi PDRB Kabupaten Lampung Selatan 2011 – 2015 Skenario III (7.5%).....	21
Tabel 12. Proyeksi tingkat pendapatan regional perkapita Kabupaten Lampung Selatan 2011 – 2015.....	23
Tabel 13. Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Selatan menurut Kondisi dan Kelas Jalan Tahun 2008.....	24
Tabel 14. Banyaknya sekolah negeri dan swasta Per kecamatan tahun 2005 – 2009.....	27
Tabel 15. Banyaknya Fasilitas Kesehatan Per Kecamatan 2005 – 2009.....	28
Tabel 16. Banyaknya Tempat Ibadah Per Kecamatan 2009.....	29
Tabel 17. Banyaknya Pelanggan, Kva Terpasang, Jaringan Dan Jumlah Gardu Listrik Per Ranting/Sub Ranting PLN Tahun 2008.....	30
Tabel 18. Banyak nya sambungan Telepon pada Kantor Telkom Kalianda.....	30
Tabel 19. Luas dan Produksi Tanaman Pangan tahun 2008.....	32

Tabel 20. Luas dan Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Buah – Buahan dan sayuran Tahun 2008.....	33
Tabel 21. Produktivitas Tanaman Perkebunan Lampung Selatan tahun 2008.....	34
Tabel 22. Perkembangan Populasi Ternak Lampung Selatan 2004 – 2008.....	34
Tabel 23. Perkembangan Produksi Hasil Ternak Kabupaten Lampung Selatan 2004 – 2008 (dalam ton).....	35
Tabel 24. Produksi hasil hutan berupa kayu dan non kayu Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008.....	36
Tabel 25. Target Dan Realisasi PAD 2005 – 2010	87
Tabel 26. Target Dan Realisasi Dana Perimbangan 2005 – 2010	88
Tabel 27. Target Dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Yang Sah 2005 – 2010..	89
Tabel 28. Proyeksi Penerimaan Daerah 2011-2015 Skenario I	93
Tabel 29. Proyeksi Penerimaan Daerah 2011-2015 Skenario II	94

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1. Proyeksi PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Harga Konstan	22
Gambar 2. Proyeksi PDRB Tahun 2011 – 2015 Atas Harga Berlaku	22
Gambar 3. Keterkaitan Aspek Utama Pengembangan Ekonomi Daerah	77
Gambar 4. Sinergi Pengembangan Sektor Pariwisata	79

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan proses pelaksanaan desentralisasi dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah untuk melakukan serangkaian proses, mekanisme dan tahapan perencanaan yang dapat menjamin keselarasan pembangunan antar daerah tanpa mengurangi kewenangan yang diberikan.

Untuk membangun kehidupan bernegara dengan tingkat keragaman masyarakat dan karakteristik geografis yang unik, pemerintah telah menyusun Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang bersifat terpadu, menyeluruh, sistematis yang tanggap terhadap perkembangan zaman sesuai ketentuan dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dalam Pasal 1 dinyatakan bahwa Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.

Pasal 5 Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM nasional. RPJMD tersebut, antara lain memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah, lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Batasan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. RPJMD juga sering disebut sebagai agenda pembangunan karena menyatu dengan agenda pemerintah yang akan dilaksanakan oleh Kepala Daerah selama menjadi pimpinan pemerintahan. Visi pembangunan jangka panjang menjadi koridor pemberi arah dan batasan pembangunan daerah jangka panjang yang dapat dijabarkan dalam periode pembangunan yang lebih pendek.

Sesuai dengan Undang-undang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa RPJM Daerah ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah (analog dengan penetapan RPJM Nasional yang melalui Peraturan Presiden), yang substansinya merupakan rencana kerja lima tahun yang akan dijadikan acuan bagi pemerintah daerah di dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sesuai dengan penjabaran visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih dalam kurun waktu lima tahun.

Untuk mewujudkan keterkaitan program pembangunan di daerah, kabupaten, maupun pusat, maka RPJMD Kabupaten Lampung Selatan disusun dengan mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2010-2014 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Propinsi Lampung tahun 2010- 2014 yang telah ditetapkan lebih dahulu.

1.2 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 adalah :

- a. Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran selama 5 (lima) tahun yang akan datang.
- b. Memberikan arah pembangunan dalam jangka lima tahun ke depan.
- c. Untuk menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar pelaku pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan.
- d. Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.
- e. Menciptakan sinergitas pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah.
- f. Memberikan tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap satuan kerja perangkat daerah.

Sedangkan tujuan penyusunan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 ini adalah tersedianya dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang selanjutnya dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menetapkan: (a) arah kebijakan keuangan daerah, (b) strategi pembangunan daerah, (c) kebijakan umum, (d) program SKPD dan lintas SKPD, serta program kewilayahan yang disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif.

1.3 Landasan Hukum

Dalam penyusunan RPJM Daerah ini, sejumlah peraturan telah digunakan sebagai rujukan, yaitu:

- a. Landasan idiil Pancasila.
- b. Landasan konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.
- c. Landasan operasional :
 1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437);
 4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 105 tahun 2000, tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; dan

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Fisik dan Administrasi Wilayah

Kondisi umum wilayah Kabupaten Lampung Selatan terletak antara 105° sampai dengan $105^{\circ}45'$ Bujur Timur dan $5^{\circ}15'$ sampai dengan 6° Lintang Selatan. Mengingat letak yang demikian ini daerah Kabupaten Lampung Selatan seperti halnya daerah-daerah lain di Indonesia merupakan daerah beriklim tropis. Berdasarkan Undang-undang Nomor 33 tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Pesawaran yaitu pemekaran wilayah Kabupaten Lampung Selatan, maka wilayah administrasi Kabupaten Lampung Selatan mempunyai batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Lampung Timur.
- b. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Selat Sunda.
- c. Sebelah Timur : berbatasan dengan Laut Jawa.
- d. Sebelah Barat : berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pesawaran.

Iklim di Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lain di Indonesia. Iklimnya dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan Asia dan Australia pada Bulan Juni dan Januari. Dilihat dari aspek Administrasi Wilayah, Kabupaten Lampung Selatan mempunyai luas daratan 2.109,74 km², dengan pusat pemerintahannya di Kota Kalianda yang telah diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri menjadi Ibukota Kabupaten Lampung Selatan pada Tanggal 11 Februari 1982.

Secara administratif Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari 17 Kecamatan yang terdiri dari 248 desa dan 3 kelurahan dan 1.474 Dusun/Lingkungan dengan total luas wilayah 2.109,74 ha.

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

6.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

6.3 Proyeksi Penerimaan Daerah Lampung Selatan Tahun 2011 - 2015

VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VIII. PENUTUP

8.1 Program Transisi

8.2 Kaidah Pelaksanaan

8.2.1 RPJMD Merupakan Pedoman Bagi SKPD

8.2.2 RPJMD Merupakan Pedoman Bagi Penyusunan RKPD

8.2.3 Penguatan Peran Stakeholder

8.2.4 Dasar Evaluasi Dan Laporan Pelaksanaan

11. Instruksi Presiden Nomor 7 tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.4 Hubungan antara RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Dokumen RPJMD sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 tahun ke depan, maka dokumen ini akan menjadi acuan dalam pedoman penyusunan rumusan visi dan misi pasangan calon Kepala Daerah dalam proses Pemilihan Kepala Daerah secara langsung (Pemilukada). Oleh karena itu, dokumen RPJM ini tidak terlepas dari dokumen-dokumen perencanaan daerah lainnya yang telah sebelumnya seperti Pola Dasar Pembangunan Daerah (POLDAS) Kabupaten Lampung Selatan, Rencana Strategis (Renstra) Kabupaten Lampung Selatan 2011-2015, dan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah (RUTRW) Kabupaten Lampung Selatan. Selain itu, dalam upaya menciptakan sinergisme pembangunan dengan pemerintah kabupaten dan pola pembangunan jangka menengah nasional maka dokumen RPJM ini juga mengacu kepada dokumen RPJM Provinsi Lampung dan RPJM Nasional.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan RPJMD Kabupaten Lampung Selatan periode 2011-2015 ini mengacu pada Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/2020/SJ Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan RPJP Daerah dan RPJM Daerah. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Maksud dan Tujuan
- 1.3 Landasan Hukum
- 1.4 Hubungan antara RPJM Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya
- 1.5 Sistematika Penulisan

II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1 Fisik dan Administrasi Wilayah
- 2.2 Kondisi Demografis
- 2.3 Kondisi Perekonomian
 - 2.3.1 Struktur Perekonomian
 - 2.3.2 Pertumbuhan Ekonomi
 - 2.3.3 PDRB Per Kapita
 - 2.3.4 Indek Pembangunan Manusia
 - 2.3.5 Laju Inflasi

2.4 Kondisi Sarana Dan Prasarana

- 2.4.1 Sarana Jalan/ Transportasi
- 2.4.2 Sarana Dan Prasarana Ekonomi
- 2.4.3 Sarana Pendidikan
- 2.4.4 Sarana Ibadah
- 2.4.5 Sarana Air Bersih
- 2.4.6 Sarana Telekomunikasi

2.5 Kondisi Budaya Dan Adat Istiadat

2.6 Potensi Sumber Daya Alam Dan Lingkungan

- 2.6.1 Potensi Pertanian
- 2.6.2 Potensi Peternakan
- 2.6.3 Potensi Perikanan dan Kelautan
- 2.6.4 Potensi Kehutanan
- 2.6.5 Potensi Industri Dan Perdagangan
- 2.6.6 Potensi Pariwisata
- 2.6.7 Potensi Lahan
- 2.6.8 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat
- 2.6.9 Pemerintahan Daerah

III. VISI DAN MISI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 2011 – 1015

3.1 Visi Kabupaten Lampung Selatan

3.2 Misi Kabupaten Lampung Selatan

IV. ANALISIS ISU STRATEGIS

4.1 Isu Global

4.2 Isu Nasional

4.3 Isu Propinsi Lampung

- 4.3.1 Isu Bidang Ekonomi
- 4.3.2 Isu Bidang Sosial Budaya Dan Kependudukan
- 4.3.3 Isu Bidang Infrastruktur
- 4.3.4 Isu Bidang Tata Ruang Dan Pertanahan
- 4.3.5 Isu Bidang Sumber Daya Alam Dan Lingkungan
- 4.3.6 Isu Bidang Politik Dan Keamanan

4.4 Isu Kabupaten Lampung Selatan

V. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 Strategi Pembangunan Daerah

5.2 Indikator Kinerja Utama

VI. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

6.1 Pengelolaan Pendapatan Daerah

- 6.1.1 Intensifikasi Dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
- 6.1.2 Permasalahan Dan Solusi

Tabel 1. Luas Wilayah Kabupaten Lampung Selatan Per-Kecamatan

No.	Kecamatan	Luas Wilayah	
		Km ²	Ha
1.	Natar	250,88	25.008
2.	Jati Agung	164,47	16.447
3.	Tanjung Bintang	129,72	12.972
4.	Katibung	188,62	18.862
5.	Merbau Mataram	113,94	11.394
6.	Sidomulyo	158,99	15.899
7.	Candipuro	84,90	8.490
8.	Kalianda	179,82	17.982
9.	Rajabasa	100,39	10.039
10.	P a l a s	165,57	16.557
11.	S r a g i	93,44	9.344
12.	Penengahan	124,96	12.496
13.	Ketapang	108,60	10.860
14.	Bakauheni	57,13	5.713
15.	Way Panji	38,45	3.845
16.	Way Sulan	46,54	4.654
17.	Tanjung Sari	103,32	10.332
Jumlah		2.109,74	210.974

Sumber : Lampung Selatan Dalam Angka, 2009.

Berdasarkan letak geografis, posisi Kabupaten Lampung Selatan yang terletak diujung Pulau Sumatra memiliki posisi strategis sebagai pintu gerbang mobilitas penduduk melalui pelabuhan penyebrangan Bakauheni. Posisi strategis ini harus dioptimalkan untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan. Disamping keberadaan penyebrangan Bakauheni, keberadaan Bandar Udara Raden Il yang berada di wilayah Kabupaten Lampung Selatan merupakan aset untuk menjadi Lampung Selatan lebih sejahtera dimasa yang akan datang.

Topografi wilayah terdiri dari wilayah laut, daratan dan pengunungan. Sebagai daerah yang memiliki luas perairan laut 173.347 Ha dengan panjang garis pantai 180 km, wilayah Kabupaten Lampung Selatan memiliki beberapa pulau besar dan pulau kecil yang tersebar di 4 kecamatan yaitu Kecamatan Rajabasa, Kecamatan Ketapang, Kecamatan Penengahan, Kecamatan Katibung harus menjadi potensi untuk pembangunan.

Terdapatnya wilayah kepulauan pada kenyataannya menjadi kendala tersendiri dalam pelaksanaan pembangunan. Kendala utama yang dihadapi wilayah kepulauan adalah masalah transportasi yang menghubungkan antar pulau. Distribusi barang dan jasa wilayah kepulauan menjadi tidak lancar karena terbatasnya akses terhadap pusat perekonomian. Kondisi infrastruktur di pulau yang berpenghuni juga tidak mendukung kelancaran aktivitas masyarakatnya. Pembiayaan pembangunan untuk wilayah kepulauan menyebabkan biaya tinggi dibandingkan untuk wilayah daratan. Hal ini disebabkan karena faktor-faktor produksi dan sumber daya yang akan diperlukan umumnya dikirim dari daerah lain.

Letak administrasi wilayah kecamatan apa bila dilihat dari peta wilayah terdapat wilayah kecamatan yang letaknya jauh dari ibu kota Kabupaten Lampung Selatan. Kondisi tersebut menjadikan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan menjadikan "ekonomi biaya tinggi".

Salah satu kebutuhan masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan dan sangat mendesak adalah masalah pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan. Hasil musyawarah pembangunan desa dan kecamatan, usulan kegiatan perbaikan dan pembangunan akses jalan dan jembatan yang paling dominan. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan sangat dibutuhkan masyarakat. Kondisi infrastruktur yang rusak menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang harus dikeluarkan oleh masyarakat.

Potensi alam berupa bahan galian/tambang, wilayah Kabupaten Lampung Selatan dapat dikatakan minim bahan galian/tambang yang memiliki nilai strategis seperti minyak bumi dan batu bara. Bahan galian/ tambang yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan umum digolongkan dalam jenis galian C antara lain berupa Andesit, Breksi, Tufa, Dasit, Pasir Batu (Sirtu).

Berbagai jenis bahan galian/tambang yang terdapat di Kabupaten Lampung Selatan belum seluruhnya dimanfaatkan. Bahan galian/tambang belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pendapatan daerah. Sumbangan bahan galian/ tambang terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan hanya 1,05 %. Beberapa galian tambang yang ada diwilayah Kabupaten Lampung Selatan antara lain, Andesit, Pasir Batu, Batu Apung dan lain-lain.

Sumberdaya alam lainnya yang berasal dari dalam bumi adalah panas bumi way belerang yang terdapat di kaki Gunung Raja Basa. Panas bumi tersebut sampai saat ini belum dimanfaatkan secara optimal. Kegiatan yang sedang dilakukan sampai saat ini adalah penelitian besarnya kandungan terhadap keberadaan panas bumi Way Belerang.

Kabupaten Lampung Selatan memiliki beragam obyek wisata. Jenis obyek wisata yang ada terdiri atas objek wisata alam, objek wisata budaya, objek wisata pantai dan tirta. Sebagai daerah yang memiliki pantai dan wilayah kepulauan, objek wisata yang terbanyak adalah objek wisata pantai/bahari yang terdapat di 6 (enam) kecamatan.

Dilihat dari status kepemilikan, objek wisata yang ada sebagian besar adalah milik swasta/perorangan. Objek wisata yang milik Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan adalah objek wisata Way Belerang di Kecamatan Kalianda. Secara umum keberadaan objek wisata yang ada baru dimanfaatkan secara sederhana oleh perorangan/masyarakat, bahkan beberapa objek wisata belum sama sekali dimanfaatkan. Objek wisata yang sudah dikelola oleh perusahaan besar adalah Objek Wisata Kalianda Resort.

Pada masa yang akan datang dan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan, keberadaan objek wisata yang ada harus menjadi industri pariwisata. Pengembangan industri pariwisata diharapkan berdampak pada penciptaan lapangan kerja. Pengembangan pariwisata menjadi lebih penting mengingat Kabupaten Lampung Selatan merupakan pintu gerbang Pulau Sumatera.

Dengan memperhatikan kondisi yang telah diuraikan diatas, maka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan harus dilakukan seoptimal mungkin untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

2.2 Kondisi Demografis

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan secara garis besar dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu Penduduk Asli Lampung dan Penduduk Pendatang. Penduduk Asli Lampung, khususnya sub Suku Lampung Peminggir umumnya berkediaman di sepanjang pantai pesisir, seperti di Kecamatan Penengahan, Kalianda, Katibung. Penduduk sub Suku Lampung yang lain tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan.

Penduduk yang berdomisili di Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bermacam-macam suku dari seluruh Indonesia, seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Sulawesi, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dan lain-lain. Dari semua suku tersebut, yang merupakan penduduk pendatang yang terbesar adalah berasal dari Pulau Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten dan Yogyakarta). Besarnya penduduk Lampung Selatan yang berasal dari Pulau Jawa dimungkinkan oleh adanya kolonisasi pada zaman penjajahan Belanda, dan dilanjutkan dengan transmigrasi pada masa setelah kemerdekaan, di samping perpindahan penduduk secara swakarsa dan spontan.

Gambaran singkat transmigrasi di Kabupaten Lampung Selatan adalah sebagai berikut :

- Kolonisasi yang pertama kali didatangkan dari Pulau Jawa ke daerah ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kolonial Belanda pada Bulan November 1905. Lokasinya di Kecamatan Gedung Tataan dengan membuka desa baru, yaitu Desa Bagelen, berjumlah 155 Kepala Keluarga (KK). Yang ditunjuk sebagai pemimpin proyeknya adalah H.G. Heyting.
- Kolonisasi kedua dilaksanakan di Daerah Teluk Semangka, Kecamatan Wonosobo dan Kota Agung pada Tahun 1921 dan 1922 dengan penempatan sebanyak 6.021 jiwa (wilayah ini sekarang masuk ke dalam Wilayah Kabupaten Tanggamus sejak Tahun 1997).
- Pada kolonisasi ketiga dicoba sistem spontan dengan penempatannya di daerah Kota Agung dan Gedung Tataan pada Tahun 1923-1927 berjumlah 1.053 jiwa.
- Selanjutnya kolonisasi sistem sisipan yaitu yang disisipkan pada penduduk setempat, tidak dengan membuka lahan baru, dan sebagai obyeknya adalah disekitar Kecamatan Kalianda yang dilaksanakan pada Tahun 1934
- Pada Tahun 1935-1939 dilakukan lagi kolonisasi dengan sistem baru yaitu Bedol Desa, yang ditempatkan di daerah Kecamatan Talang Padang dengan jumlah kurang lebih 27.816 jiwa yang berasal dari Kediri (Jawa Timur).
- Pada zaman Pemerintahan Jepang berkuasa pada Tahun 1942-1945 dan setelah Indonesia merdeka 1945-1946 tidak terdapat catatan yang jelas mengenai perpindahan penduduk dari Pulau Jawa ke Lampung, akan tetapi perhatian pemerintah saat itu telah ada, yaitu dengan mengubah istilah kolonisasi menjadi transmigrasi pada Tahun 1948.
- Pada Tahun 1950-1955 telah dilaksanakan transmigrasi sejumlah 5.491 KK ke Lampung Selatan. Tahun 1955-1969 dipindahkan lagi sebanyak 5.333 KK yang selanjutnya ditempatkan di lokasi seperti Kecamatan Sidomulyo, Palas, Penengahan, Tanjungan, dan Balau Kedaton. Pada Tahun 1974, di Kecamatan Palas dan Penengahan dilakukan lagi transmigrasi sisipan sejumlah 732 KK.

Dari gambaran di atas, maka kita dapat mengetahui asal-usul penduduk pendatang, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa ke Lampung Selatan yang saat ini sudah berkembang pesat dan bahkan ada disetiap kecamatan. Selain melalui proyek transmigrasi tersebut, masih banyak penduduk pendatang dengan tujuan menetap di daerah ini secara spontan.

Tabel 2. Jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan dirinci menurut jenis kelamin dan sex ratio Tahun 2005-2008

No.	Tahun	Laki-Laki (L)	Perempuan (P)	Jumlah (L + P)	Sex Ratio
1	2005	638.542	592.242	1.230.784	107,82
2	2006	682.624	630.251	1.312.875	108,31
3	2007	478.786	444.216	923.002	107,78
4	2008	481.946	447.756	929.702	107,64
5	2009	490.391	453.494	943.885	108,14

Keterangan : Tahun 2007, 2008, dan 2009 tidak termasuk Kabupaten Pesawaran

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan

Pada Tahun 2005 penduduk Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 1.230.784 orang (Tabel 2), dengan proporsi penduduk laki-lakinya berjumlah 638.542 orang, sedangkan penduduk perempuannya berjumlah 592.242 orang. Sex ratio penduduk atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan 107,82 yang berarti bahwa setiap 100 jiwa perempuan terdapat 107,82 laki-laki. Pada Tahun 2007 dengan adanya pemekaran kabupaten maka berpengaruh terhadap jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan, dimana sampai saat ini dari data yang ada (Tahun 2009), jumlah penduduk di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 943.885 orang, dengan proporsi penduduk laki-laki berjumlah 490.391 orang dan penduduk perempuan berjumlah 453.494 orang. Dari data di atas terlihat bahwa setiap tahunnya lebih banyak penduduk laki-laki dibandingkan perempuan di Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini dimungkinkan karena letak strategisnya Wilayah Kabupaten Lampung Selatan yang berada di ujung Pulau Sumatera dan berdekatan dengan Pulau Jawa, sehingga banyak penduduk perempuan yang ada di Kabupaten Lampung Selatan yang menjadi tenaga kerja wanita ataupun menjadi pekerja di luar daerah maupun di luar pulau, seperti bekerja di pabrik-pabrik maupun perusahaan yang banyak dijumpai di Wilayah Propinsi Banten dan Pulau Jawa pada umumnya. Tiga kecamatan yang memiliki penduduk terbanyak pada Tahun 2009 adalah Natar, diikuti Kecamatan Jati Agung, dan Kecamatan Kalianda. Sedangkan Kecamatan Way Panji adalah kecamatan yang penduduknya paling sedikit.

Dalam publikasinya, Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga Kabupaten Lampung Selatan menetapkan berbagai kriteria dalam rangka mengelompokkan keluarga berdasarkan tingkat kesejahteraannya. Dari Tabel 3 terlihat bahwa 45,53% dari total 234.204 keluarga yang ada di Kabupaten Lampung Selatan, masih dalam tingkatan keluarga pra sejahtera, yaitu sebanyak 106.635 KK. Hal ini menunjukkan bahwa

sekitar 54,47% masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan yang dapat dikatakan sebagai keluarga sejahtera, walaupun untuk tingkatan keluarga sejahteraupun masih ada kelompok-kelompoknya. Namun yang cukup menggembirakan ternyata terjadi penurunan persentase jumlah keluarga prasejahtera di Kabupaten Lampung Selatan selama Tahun 2009 walaupun persentase penurunannya masih kecil (0,13%).

Tabel 3 Banyaknya keluarga menurut pentahapan keluarga per kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009

No.	KECAMATAN	Keluarga (KK)				
		PS	KS I	KS II	KS III	KS III Plus
1	Natar	14.362	9.494	8.907	5.871	398
2	Tanjung Bintang	7.046	5.841	4.208	1.430	199
3	Katibung	8.787	3.353	1.971	1.245	216
4	Kalianda	9.575	4.505	3.053	2.853	239
5	Penengahan	4.840	1.896	1.504	1.564	52
6	Palas	8.928	4.270	1.780	560	24
7	Sidomulyo	8.287	3.225	1.419	2.299	176
8	Jati Agung	8.836	4.873	4.781	3.625	60
9	Merbau Mataram	5.710	2.923	2.737	777	155
10	Rajabasa	3.017	1.891	642	386	-
11	Ketapang	5.419	1.850	3.224	1.833	38
12	Sragi	4.539	1.697	2.429	815	88
13	Candipuro	6.436	3.612	2.658	1.546	21
14	Bakauheni	2.226	1.080	586	309	55
15	Tanjung Sari	3.526	2.624	1.964	548	44
16	Way Sulan	2.581	1.716	1.397	121	1
17	Way Panji	2.515	968	861	264	18
	J U M L A H	106.635	55.818	44.121	25.846	1.784

Keterangan : PS = Pra Sejahtera ; KS = Keluarga Sejahtera

Sumber : BKBPK Kabupaten Lampung Selatan

Kecamatan Natar merupakan kecamatan yang paling banyak dihuni keluarga pra sejahtera yaitu sebanyak 14.362 KK. Keadaan tersebut erat kaitannya dengan besarnya jumlah penduduk yang ada di kecamatan Natar. Kecamatan selanjutnya yang juga banyak dihuni oleh keluarga pra sejahtera adalah Kecamatan Kalianda yaitu sebesar 9.575 KK, diikuti Kecamatan Palas sebesar 8.928 KK. Sedangkan Kecamatan Bakauheni adalah kecamatan yang paling sedikit dihuni oleh keluarga pra sejahtera yaitu sekitar 2.226 KK.

Untuk tingkatan keluarga sejahtera III plus, ternyata Kecamatan Natar yang paling banyak dihuni oleh keluarga ini, dimana pada Tahun 2009 jumlah keluarga sejahtera III plus yang ada di Kecamatan Natar berjumlah 398 KK atau 22,31% dari total keluarga sejahtera III plus yang ada di Lampung Selatan (1.784 KK). Selanjutnya diikuti Kecamatan Kalianda, dan Katibung.

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan apabila dirinci menurut kelompok umur, terlihat bahwa jumlah penduduk yang berumur di bawah 60 tahun adalah sejumlah 871.488 jiwa atau sekitar 93,74% dari total jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan yang berjumlah 929.702 jiwa. Satu hal yang menggambarkan meningkatnya derajat kualitas hidup masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan adalah meningkatnya jumlah penduduk yang masih hidup di atas usia 60 tahun yaitu sebanyak 58.214, atau sebesar 6,26%.

2.3 Kondisi Perekonomian

2.3.1 Struktur Perekonomian

Pada Tahun 2008 sebagian besar sektor mengalami pertumbuhan yang cukup besar dan perannya terhadap pembentukan PDRB juga mengalami peningkatan. Meskipun pertumbuhan sektor pertanian pada Tahun 2008 (4,44%) lebih kecil dari pertumbuhan sektor ini pada Tahun 2007 (5,17%), namun sektor pertanian tetap merupakan sektor yang memberikan andil terbesar dalam struktur ekonomi Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 4 Distribusi persentase PDRB Kabupaten Lampung Selatan menurut lapangan usaha Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2000

LAPANGAN USAHA	2005	2006	2007	2008
1. Pertanian	48,09	41,74	43,78	45,82
2. Pertambangan & Penggalian	1,14	1,40	1,21	1,05
3. Industri Pengolahan Tanpa Migas	11,03	10,34	10,11	9,27
4. Listrik dan Air Bersih	0,75	0,82	0,79	0,70
5. Bangunan	7,35	7,28	6,73	6,30
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran	11,92	11,83	11,29	10,91
7. Pengangkutan dan Komunikasi	5,98	10,59	10,36	10,73
8. Keuangan, Persewaan & Jasa Prshn	3,66	5,92	5,63	5,22
9. Jasa - jasa	10,08	10,07	10,10	10,01
<i>Produk Domestik Regional Bruto</i>	100	100	100	100

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan

Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada Tahun 2008 sektor pertanian merupakan sektor yang memberikan sumbangan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan yakni sebesar 45,82 persen, sedikit lebih besar dibandingkan yang terjadi pada Tahun 2007 yaitu sebesar 43,78 persen (Tabel 4). Pada Tahun 2005 peran sektor ini masih cukup besar, yakni sebesar 48,09 persen, Tahun 2006 sebesar 41,74

persen, dan perannya kembali meningkat pada Tahun 2007 yaitu sebesar 43,78 persen. Salah satu penyebab utama semakin meningkatnya peran sektor ini adalah karena pesatnya perkembangan sektor-sektor lain di luar sektor pertanian, hal ini dampak dari adanya proses transformasi struktural di bidang perekonomian. Harapannya adalah perubahan struktur perekonomian yang terjadi tidak meninggalkan sektor pertanian yang memang menjadi basis kekuatan perekonomian Kabupaten Lampung Selatan, artinya diperlukan kebijakan yang tepat terutama dalam rangka pembangunan industri yang berbasis pertanian agar nilai tambah yang dihasilkan dapat semakin besar demi meningkatkan kesejahteraan petani dan para pekerja dan pelaku di sektor industri, utamanya industri kecil dan menengah.

Salah satu permasalahan yang sangat penting terhadap pertumbuhan sektor pertanian adalah masalah harga dari produk-produk hasil pertanian yang fluktuatif sehingga dapat mempengaruhi pendapatan petani. Selain itu masalah kelangkaan pupuk yang memang dihadapi oleh semua petani di hampir semua kecamatan, karena pupuk yang tersedia di pasaran tidak mencukupi kebutuhan total petani. Oleh karena itu diharapkan pemerintah dapat memberikan langkah-langkah yang tepat guna mengatasi permasalahan tersebut, seperti: mengurangi distorsi pasar yang terjadi dalam tataniaga produk pertanian dan juga meningkatkan pengawasan distribusi pupuk.

Sektor terbesar kedua adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran yang memberikan sumbangan sebesar 10,91 persen pada Tahun 2008. Sejak empat tahun terakhir, sektor ini merupakan sektor penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan. Sektor ini merupakan sektor yang tumbuh secara alami akibat kemajuan suatu daerah dan kemudahan transportasi. Lebih dari 50 persen sumbangan dari sektor lain memacu perkembangan sektor ini. Kemajuan sektor perdagangan, hotel dan restoran juga mengakibatkan terpacunya pertumbuhan sektor-sektor lain yang terkait. Sebagai daerah yang merupakan pintu gerbang bagian selatan Pulau Sumatera dan merupakan kabupaten di luar Pulau Jawa yang terdekat dengan ibukota negara, maka sektor ini mempunyai peluang yang cukup besar untuk mengalami pertumbuhan yang tinggi. Hal ini dimungkinkan karena salah satu sektor utama yang berpengaruh yaitu sektor industri pengolahan juga sangat mungkin dikembangkan mengingat lahan yang tersedia di Kabupaten Lampung Selatan cukup luas dan strategis sehingga keuntungan komparatif bisa dicapai.

Sejak Tahun 2005 hingga Tahun 2008 meskipun mengalami fluktuasi, peran sektor perdagangan, hotel dan restoran selalu menempati peringkat kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2005 sektor ini memberikan sumbangan

sebesar 11,92 persen, Tahun 2006 sebesar 11,83 persen, Tahun 2007 sebesar 11,29 persen, dan pada Tahun 2008 sebesar 10,91 persen.

Sektor yang memberikan sumbangan terbesar ketiga pada Tahun 2008 adalah sektor pengangkutan dan komunikasi yakni sebesar 10,73 persen sedikit lebih besar dari Tahun 2007 yakni sebesar 10,36 persen. Sebagaimana sektor perdagangan, hotel dan restoran yang selalu menempati peringkat kedua dalam pembentukan PDRB Kabupaten Lampung Selatan, peran sektor pengangkutan dan komunikasi juga selalu menempati peringkat yang sama yakni peringkat ketiga selama empat tahun terakhir. Besarnya sumbangan sektor pengangkutan dan komunikasi terhadap pembentukan PDRB disebabkan oleh karena strategisnya letak Kabupaten Lampung Selatan yang berada di ujung Pulau Sumatera, sehingga banyak arus barang dan arus orang keluar masuk melalui kabupaten ini. Selain itu di Kabupaten Lampung Selatan juga terdapat Pelabuhan Penyeberangan antar pulau yaitu Pelabuhan Bakauheni yang terletak di Kecamatan Bakauheni, dan pelabuhan udara Branti yang terletak di Kecamatan Natar. Dengan membaiknya keadaan perekonomian nasional dan regional, secara tidak langsung juga akan membuat perekonomian daerah lebih bergairah sehingga arus barang dan arus orang yang melalui kabupaten ini cukup meningkat.

Mengingat bahwa sektor pertanian, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi sama-sama mempunyai potensi yang cukup besar untuk dikembangkan maka yang terbaik adalah adanya sinergi antara ketiga sektor tersebut. Karena kemajuan salah satu sektor akan mengangkat kemajuan sektor lainnya. Hal ini dimungkinkan terjadi apabila input dan output ketiga sektor utama tersebut dapat saling mengisi dan saling melengkapi.

Selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2008 sumbangan ketiga sektor terhadap PDRB relatif besar sekali, dimana pada Tahun 2005 sebesar 65,99 persen, Tahun 2006 sebesar 64,16 persen, Tahun 2007 sebesar 65,43 persen, dan pada Tahun 2008 kembali meningkat sebesar 67,46 persen.

2.3.2 *Pertumbuhan Ekonomi*

Analisa pertumbuhan ekonomi adalah suatu bentuk analisis terhadap parameter PDRB yang menggambarkan perkembangan suatu sektor secara riil dan objektif. Riil dalam arti bahwa angka pertumbuhan diperoleh dengan mengeliminir pengaruh kenaikan harga (inflasi). Sedangkan yang dimaksud dengan objektif adalah bahwa kenaikan/penurunan

nilai tambah tersebut pembandingnya adalah nilai tambah sektor yang bersangkutan pada tahun sebelumnya berdasarkan harga konstan.

Dengan demikian angka pertumbuhan ini merupakan suatu indikator yang cukup relevan untuk menilai keberhasilan pembangunan suatu daerah. Sehingga dapat diambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan pembangunan daerah dan memacu pertumbuhan ekonomi. Adapun langkah yang diambil tidak terlepas dari seberapa besar peran sektor terhadap pertumbuhan, kondisi fundamental ekonomi dan bagaimana tingkat urgensi dari suatu kebijakan terhadap kepentingan masyarakat pada umumnya.

Sebelum Tahun 2008, perekonomian Kabupaten Lampung Selatan selama periode 2004-2007 menunjukkan perkembangan yang cukup baik, hal ini terlihat dari angka pertumbuhan yang selalu lebih besar dari angka pertumbuhan tahun sebelumnya. Namun pada Tahun 2008 angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan lebih lambat dari angka pertumbuhan ekonomi Tahun 2007. Perlambatan pertumbuhan ekonomi ini juga serupa terjadi baik dalam skala regional dan nasional, hal ini merupakan dampak dari krisis keuangan global yang terjadi pada Tahun 2008 yang juga secara langsung berpengaruh terhadap perekonomian regional dan lokal dan dampaknya pun masih terasa pada Tahun 2009.

Tabel 5. PDRB Kabupaten Lampung Selatan & Pertumbuhan Riil Tahun 2004-2008

No	Tahun	Harga Beraku (Juta Rupiah)	Harga Konstan (Juta Rupiah)	Pertumbuhan Riil (%)
1.	2004	5.187.991	3.987.721	4.29
2.	2005	5.886.690	4.249.936	4.55
3.	2006	5.166.681	3.492.919	4.95
4.	2007	6.095.491	3.685.296	5,51
5.	2008	7.249.298	3.874.487	5,13

Sumber: Bappeda dan BPS Kabupaten Lampung Selatan

Dalam menghadapi dampak dari krisis keuangan global tersebut, diharapkan pemerintah daerah dapat mengambil kebijakan yang dapat menjaga stabilitas perekonomian daerah, utamanya adalah memperkuat basis pondasi bangunan perekonomian kabupaten terutama di sektor primer (pertanian, pertambangan dan penggalian). Karena dominasi sektor primer diharapkan dapat menyebabkan perekonomian daerah dapat tetap tumbuh positif ditengah kelesuan perekonomian dunia. Pertumbuhan ekonomi yang positif menunjukkan peningkatan kapasitas daerah, yang berarti kemampuan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan menghasilkan output semakin

meningkat. Peningkatan kapasitas ini terkait dengan daya dukung teknologi, modal, infrastruktur dan kualitas sumberdaya manusia serta ketersediaan sumber daya alam.

2.3.3 PDRB Perkapita

PDRB perkapita Kabupaten Lampung Selatan meningkat dari Rp.6.309.728,- pada tahun 2007, menjadi Rp.7.802.730,- pada tahun 2008. Namun angka tersebut masih di bawah angka provinsi yang sebesar Rp. 8.357.190,- Untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008 berdasarkan harga yang berlaku yaitu sebesar Rp. 7.249.298,- namun angka tersebut masih dibawah angka provinsi sebesar Rp. 8.357.190,- untuk itu diperlukan kebijakan yang tepat dalam bentuk program dan kegiatan yang dapat menyentuh dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan.

Tabel 6 Perkembangan PDRB Per Kapita Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2006-2011

Tahun	Harga Berlaku (Juta Rupiah)	Harga Konstan (Juta Rupiah)
2006	5.733.990	3.492.919
2007	6.095.491	3.685.296
2008	7.249.298	3.874.487
2009*	7.974.228	4.075.960

Ket: *Angka Sementara

Sumber : Data diolah tahun 2011

2.3.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM ini dapat memberikan gambaran kondisi riil keberhasilan pelaksanaan pembangunan, yang dapat dijadikan dasar perencanaan pembangunan pada tahun yang akan datang.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Lampung Selatan terus mengalami peningkatan, pada tahun 2005 sebesar 67,2 meningkat menjadi 67,8 pada tahun 2006, kemudian meningkat cukup signifikan pada tahun 2007 menjadi 68,4.

Dari tabel IPM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2007 juga terlihat bahwa angka harapan hidup penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2005 rata-rata mencapai usia 67,5 tahun, sedangkan pada tahun 2006 dan 2007 meningkat menjadi 67,8 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesehatan masyarakat terus membaik, namun demikian, adanya wabah penyakit menular baik skala lokal, regional maupun nasional turut diwaspadai. Demikian juga pelayanan kesehatan masih perlu ditingkatkan, khususnya pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin.

Angka harapan hidup Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2006 mencapai rata-rata 67,5 tahun, sedangkan tahun 2008 mengalami peningkatan menjadi 67,9 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa, tingkat kesehatan masyarakat semakin membaik. Namun demikian, adanya wabah penyakit menular baik skala lokal, regional maupun nasional patut untuk diwaspadai. Demikian juga pelayanan kesehatan perlu terus ditingkatkan, khususnya pelayanan kesehatan terhadap keluarga miskin.

Tabel 7 Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia

Tahun	Angka Harapan Hidup (TH)	Angka Melek huruf (%)	Lama Sekolah (TH)	Pengeluaran Riil/Kapita (Ribu Rp)	IPM
1999	65,10	91,70	6,1	570,70	63,40
2002	65,20	91,10	6,3	582,40	64,40
2005	67,40	93,40	6,7	593,20	67,20
2006	67,50	93,40	6,8	598,20	67,80
2007	67,80	93,40	6,8	604,30	68,40
2008	67,97	93,42	6,8	608,72	68,79

Sumber : Bappeda Lampung Selatan Tahun 2011

Kondisi kesejahteraan masyarakat dapat dilihat pada klasifikasi data keluarga berencana menurut BPS Lampung Selatan Dalam angka 2008 disebutkan bahwa jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2007 sebesar 102,999 kepala keluarga (KK), Sejahtera I sebesar 49.698 KK (0,43%), Sejahtera II sebesar 39,570 KK (0,34 %), sejahtera III sebesar 26.220 KK (0,22 %), dan Sejahtera III plus sebesar 1,279 KK (0,01 %).

2.3.5 Laju Inflasi

Harga-harga sembilan bahan pokok dipasar kota Kalianda rata-rata mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan harga beras selama tahun 2008 berfluktuasi. Perkembangan laju inflasi pada tahun 2008 adalah 6,10% mengalami peningkatan dibanding

inflasi tahun sebelumnya sebesar 5,64% dan inflasi pada Oktober sebesar 1,09%. Secara umum tingkat inflasi pada tahun 2008 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya terkecuali untuk bahan makanan dan kesehatan.

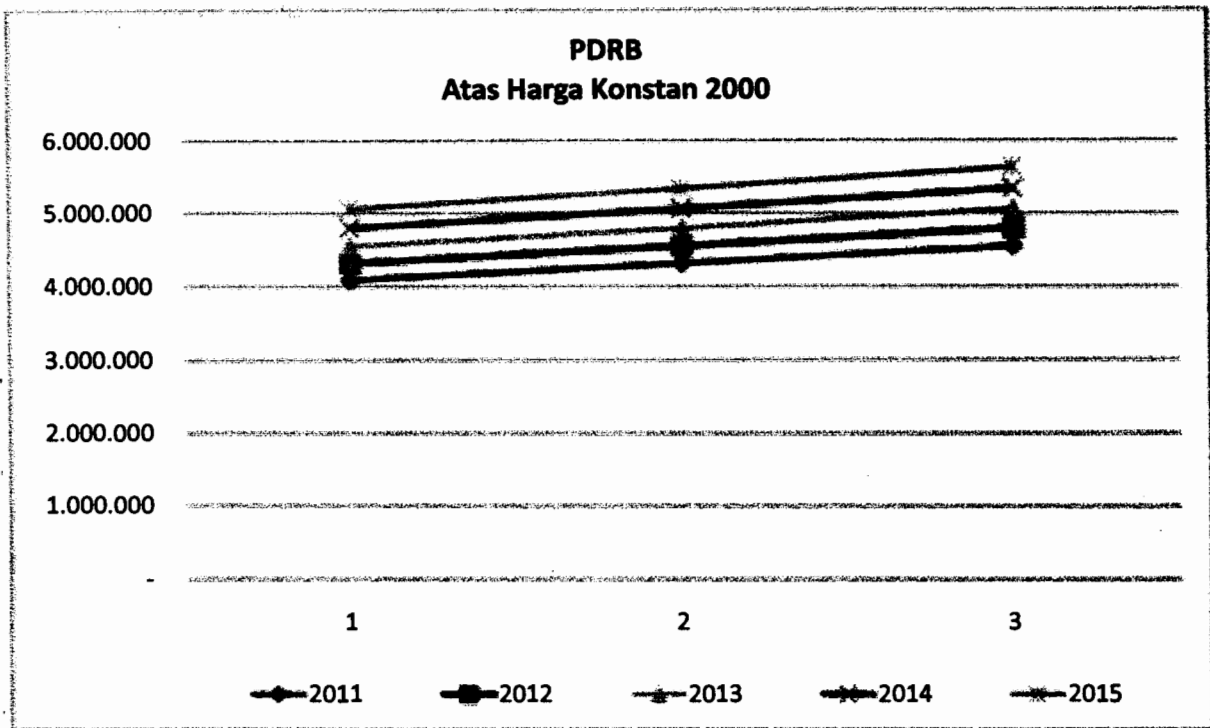
Tabel 8 Rata-Rata Laju Inflasi di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2004-2008

KETERANGAN	TAHUN				
	2004 (%)	2005 (%)	2006 (%)	2007 (%)	2008 (%)
Umum	4,19	6,66	16,56	5,64	6,10
Bahan Makanan	-4,54	8,68	12,28	12,81	7,75
Makanan Jadi, Minuman dan Rokok	2,93	4,92	15,34	4,24	9,20
Perumahan	16,58	7,53	14,90	1,38	2,18
Sandang	4,90	7,20	11,29	8,72	15,97
Kesehatan	4,49	4,99	2,04	5,85	1,96
Pendidikan dan Rekreasi	4,95	5,92	0,70	1,63	3,40
Transportasi	2,64	3,61	60,22	0,64	0,86

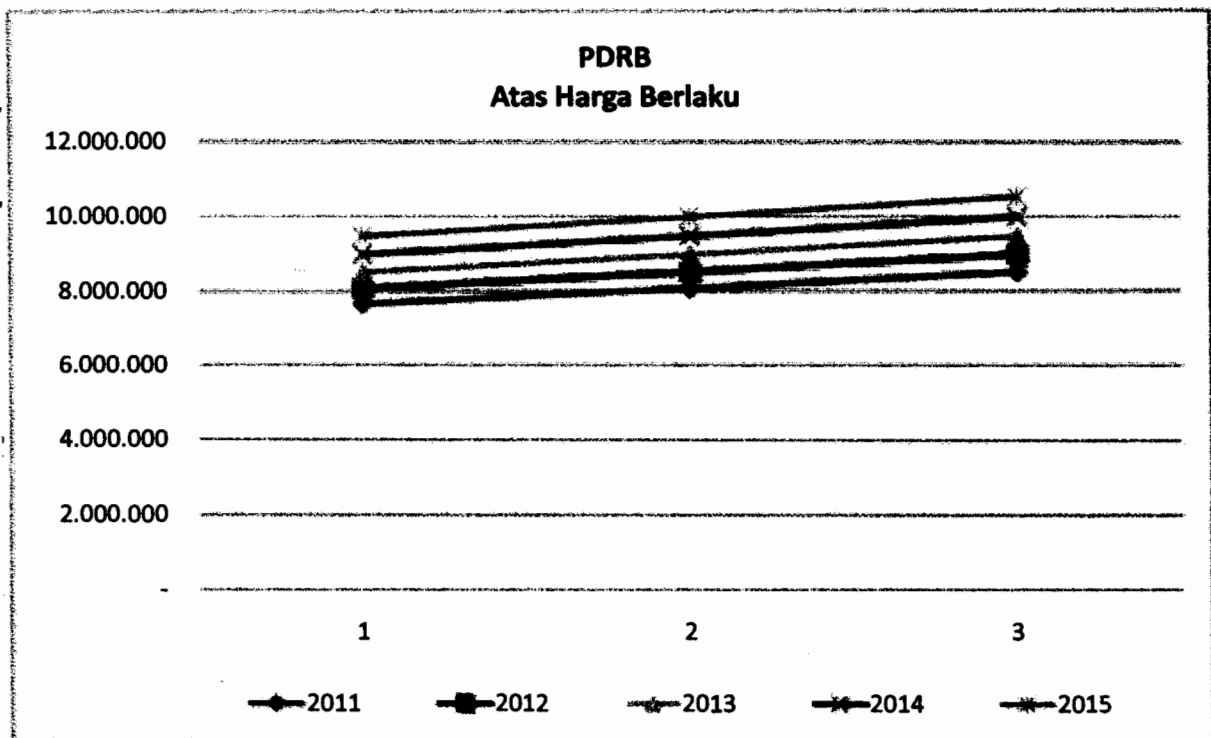
Sumber : LSDA, diolah Tahun 2011

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa struktur perekonomian Kabupaten Lampung Selatan sangat ditentukan oleh besarnya sumbangan sektor-sektor ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Lampung Selatan tahun 2008 sebesar 45,82%. Oleh karena itu, dominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB akan terus terjadi sampai beberapa tahun kedepan. Namun demikian melihat kepada Tabel 5 tersebut juga nampak bahwa sektor perdagangan, hotel, dan restoran menunjukkan kontribusi yang terbesar kedua setelah pertanian. Oleh karena itu pembangunan kepariwisataan pada masa yang akan datang merupakan suatu peluang yang cukup baik untuk meningkatkan performance PDRB Kabupaten Lampung Selatan.

Proyeksi kondisi perekonomian Lampung Selatan selama periode waktu 2011-2015, dilakukan berdasarkan analisis kondisi perekonomian tahun 2007-2008 menggunakan pendekatan kurva linier terhadap perubahan laju pertumbuhan PDRB dengan didasarkan pada 3 (tiga) skenario laju pertumbuhan 5.5 %, 6.5 %, dan 7.5%, hasil analisis memberikan gambaran bahwa laju pertumbuhan PDRB atas harga konstan mengikuti kurva linier $y = 0.432x + 2.915$, $R^2 = 0.7945$; besarnya PDRB atas dasar harga konstan dan harga berlaku per 5 (lima) tahun perencanaan disajikan pada Tabel 9



Gambar 1. Proyeksi PDRB Tahun 2011 - 2015 Atas Harga Konstan 2000



Gambar 2. Proyeksi PDRB Tahun 2011 - 2015 Atas Harga Berlaku

Berdasarkan kondisi proyeksi PDRB tersebut di atas, maka dapat diperkirakan tingkat pendapatan regional per kapita penduduk Lampung Selatan pada tahun perencanaan sebagaimana disajikan pada Tabel 12.

Tabel 12 Proyeksi tingkat pendapatan regional perkapita Kabupaten Lampung Selatan 2011-2015

Tahun	Jumlah Penduduk	Harga Berlaku (Rp.)	Harga Konstan (Rp.)
2006	1.206.930	4.410.177	948.260
2011	1.261.133	5.694.080	1.040.806
2016	1.315.337	6.872.167	1.125.725
2021	1.369.540	7.957.001	1.203.921
2026	1.423.744	8.959.234	1.276.164

Sumber : Data Olah, 2005

2.4 Kondisi Sarana dan Prasarana

2.4.1 Sarana Jalan/transportasi

Jaringan jalan yang berkembang di Kabupaten Lampung Selatan dapat diklasifikasikan pada jalan Negara, Propinsi dan jalan Kabupaten. Jaringan jalan yang ada saat ini telah berfungsi untuk menghubungkan daerah-daerah *hinterland* yang ada di seluruh wilayah Lampung Selatan. Jaringan jalan negara dan kabupaten yang ada telah berfungsi untuk memperlancar hubungan transportasi dari Ibukota Lampung Selatan (Kalianda) dengan kabupaten/kota dan kabupaten lain yang ada di Sumatera. Jalan Kabupaten berfungsi memperlancar transportasi di lingkup wilayah kabupaten. Panjang jalan berdasarkan kualifikasinya tertera pada Tabel 11.

Kondisi jalan di Lampung Selatan pada tahun 2008 adalah ruas jalan kabupaten yang beraspal sepanjang 754,12 km, jalan kerikil sepanjang 268,30 km, sedangkan jalan tanah tidak ada. Secara total, jumlah panjang jalan negara di Lampung Selatan adalah sepanjang 159,95 km, jalan propinsi 314,36 km, dan jalan kabupaten sepanjang 1.022,42 km.

Tabel 13 Panjang Jalan di Kabupaten Lampung Selatan menurut Kondisi dan Kelas Jalan Tahun 2008

Panjang Jalan (Km)			
Keadaan	Jalan Negara	Jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten
Aspal	159,95	314,36	754,12
Kerikil	-	-	268,30
Tanah	-	-	-
Kondisi Jalan			
a. Baik	138,95	220,40	173,60
b. Sedang	17,20	78,21	261,01
c. Rusak ringan	3,80	15,75	554,21
d. Rusak berat	0	0	33,60

Sumber : Dinas PU Kabupaten Lampung Selatan 2009

Jumlah atau jenis kendaraan yang mendukung mobilitas barang/jasa dan orang di wilayah Lampung Selatan cukup variatif. Untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat Lampung Selatan tersedia fasilitas 15 jenis angkutan umum (mikrolet dan oplet) dengan lintasan trayek yang bervariasi di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Alat transportasi lainnya yaitu 434 mobil penumpang, 75 bus, dan 3.931 mobil barang.

2.4.2 Sarana dan Prasarana Ekonomi

Sarana pasar telah menyebar pada hampir semua wilayah di Lampung Selatan. Konsentrasi pasar terbesar terdapat di Kecamatan Natar (15 unit) dan Kecamatan Tanjung Bintang (11 unit). Adapun konsentrasi pertokoan terbesar di Kecamatan Natar (506 unit). Kebanyakan sarana perekonomian di Lampung Selatan saat ini masih merupakan pasar-pasar tradisional, khususnya yang berada di perdesaan, baik yang dibangun dan dikelola oleh pemerintah kabupaten maupun pasar desa yang dikelola desa secara swakelola.

Jumlah koperasi di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2008 mencapai 326 koperasi, terdiri dari 23 KUD dan 303 Non-KUD. Jumlah anggota koperasi pada tahun 2008 sebanyak 35.521 orang. Jumlah asetnya sebesar 81,8 milyar, dengan volume usaha 736,2 milyar dan sisa hasil usaha sebesar 6,6 milyar.

2.4.3 Sarana Pendidikan

Upaya-upaya yang ditempuh oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penyebaran sarana pendidikan secara merata pada semua wilayah. Sebaran pendidikan pada jenjang sekolah dasar telah mencapai pada tingkat desa di Lampung Selatan. Akan tetapi untuk jenjang pendidikan SMP dan SMA/SMK baik yang berstatus negeri maupun swasta lebih terkonsentrasi pada ibukota kecamatan, sedangkan pendidikan tinggi terpusat pada Ibukota Kabupaten Kalianda.

Tingkat pendidikan suatu masyarakat juga ditentukan dengan ketersediaan berbagai fasilitas pendidikan yang dapat menunjang kegiatan belajar dan mengajar di daerah tersebut. Sampai dengan Tahun 2009, total Sekolah Dasar Negeri yang telah dibangun di Kabupaten Lampung Selatan berjumlah 471 unit yang tersebar di 17 kecamatan. Penyebarannyapun hampir merata disetiap kecamatan yang disesuaikan dengan besarnya jumlah penduduk dan luasnya wilayah/kecamatan tersebut (Tabel 12). Kecamatan Natar merupakan kecamatan yang paling banyak SD Negeri-nya yang berjumlah 58 unit bangunan sekolah. Sedangkan kecamatan yang paling sedikit memiliki SD Negeri adalah Kecamatan Way Sulan yaitu 8 SD Negeri, hal ini dimungkinkan karena kecamatan tersebut merupakan kecamatan baru hasil pemekaran. Sedangkan Taman Kanak-Kanak Negeri hanya ada dua di Kabupaten Lampung Selatan yaitu di Kecamatan Kalianda dan Tanjung Bintang.

Hingga tahun 2008, di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan telah tersebar 477 sekolah dasar (SD), terdiri dari 471 sekolah negeri dan 6 sekolah swasta. Jumlah murid SD negeri pada tahun 2008 sebanyak 108.644 orang, dengan jumlah guru sebanyak 4.186 orang.

Begitupun halnya dengan bangunan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dimana hampir semua kecamatan telah memiliki SLTP Negeri yang total seluruhnya berjumlah 51 unit. Kecamatan Kalianda, Natar, dan Jati Agung merupakan kecamatan yang paling banyak SLTP Negeri, sementara kecamatan yang belum memiliki SLTP Negeri adalah Kecamatan Way Sulan.

Jumlah SLTP di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun yang sama sebanyak 139 sekolah, terdiri dari 51 SLTP negeri dan 88 SLTP swasta, dengan jumlah murid 29.712 orang dan jumlah guru 2.171 orang. Sedangkan untuk SMU banyaknya sekolah 36 sekolah, terdiri dari 10 SMU negeri dan 26 SMU swasta dengan jumlah murid 10.822 orang dan guru 425 orang. Jumlah sekolah SMK sebanyak 30 sekolah, terdiri dari 6 SMK negeri dan 24 SMK swasta, dengan jumlah murid sebanyak 8.087 orang dan guru sebanyak 363 orang.

Sedangkan banyaknya lembaga pendidikan Islam di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2008 terinci menjadi 37 RA, 126 Ibtidaiyah, 85 Tsanawiyah, dan 30 Aliyah.

Di Kabupaten Lampung Selatan Sampai dengan Tahun 2009 ini, tinggal 3 kecamatan yang belum memiliki bangunan sekolah SMA Negeri. Ke-tiga kecamatan tersebut adalah Kecamatan Way Sulan, Way Panji, dan Rajabasa. Untuk Tahun 2011 direncanakan akan dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMA Negeri Rajabasa. Sedangkan total bangunan SMA Negeri/SMK Negeri yang ada berjumlah 18 unit.

Selain sekolahan negeri, di Kabupaten Lampung Selatan juga banyak didirikan bangunan sekolah swasta, hal ini sangat penting dalam rangka meningkatkan mutu dan kualitas anak-anak pelajar di Kabupaten Lampung Selatan. Pada Tahun 2009, TK swasta yang ada berjumlah 121 unit, SD swasta 7 unit, SLTP swasta 88 unit, dan SLTA swasta berjumlah 59 unit.

Khusus untuk perguruan tinggi, di Kabupaten Lampung Selatan ketika Tahun 2005 baru ada dua perguruan tinggi yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah dan Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah, hingga Tahun 2009 sudah ada lima perguruan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Muhammadiyah, Sekolah Tinggi Agama Islam (STAIS), DCC Cabang Kalianda, dan Akademi Kebidanan (AKBID) Hampar Baiduri, yang kelimanya terletak di Ibukota Kabupaten Lampung Selatan yaitu Kalianda.

Dalam rangka meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan, pada Tahun 2008 telah dibangun SMK Kelautan di Kecamatan Ketapang, pada Tahun 2009 dibangun Unit Sekolah Baru (USB) SMK Kec. Sragi, USB SMAN Kecamatan Jati Agung dan Pembangunan SLB di Kecamatan Sidomulyo. Pada Tahun 2011 akan dibangun USB SMAN Kecamatan Rajabasa.

Berkaitan dengan penganggaran biaya pendidikan, pemerintah kabupaten telah mengalokasikan biaya pendidikan diatas 20% dalam APBD setiap tahun, hal ini untuk memenuhi ketentuan UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada Tahun 2011, pemerintah kabupaten telah memprogramkan Biaya Operasional Sekolah (BOS) Daerah dalam upaya menjamin pelaksanaan kegiatan yang bersifat rutin sekolah.

Tabel 14 Banyaknya sekolah negeri dan swasta menurut tingkatan per kecamatan tahun 2005-2009

No	KECAMATAN	NEGERI				SWASTA				Jumlah
		TK	SD	SMP	SLTA	TK	SL	SLT	SLTA	
1	Natar	-	58	6	2	35	3	18	13	-
2	Jati Agung	-	44	5	1	14	1	13	11	-
3	Tanjung Bintang	1	38	3	1	18	1	10	5	-
4	Tanjung Sari	-	15	2	1	4	-	4	2	-
5	Katibung	-	30	2	1	4	-	4	1	-
6	Merbau Mataram	-	29	2	1	5	-	5	2	-
7	Way Sulan	-	8	-	-	-	1	3	4	-
8	Sidomulyo	-	34	4	1	9	-	6	4	-
9	Candipuro	-	25	3	1	1	-	7	3	-
10	Way Panji	-	9	-	-	5	-	3	-	-
11	Kalianda	1	42	7	4	9	-	5	7	5
12	Rajabasa	-	16	2	-	1	-	2	-	-
13	Palas	-	38	4	1	3	-	2	1	-
14	Sragi	-	19	3	1	3	-	1	1	-
15	Penengahan	-	30	2	1	5	-	3	2	-
16	Ketapang	-	27	3	1	3	-	1	2	-
17	Bakauheni	-	9	3	1	2	1	1	1	-
Jumlah 2009		2	471	51	18	121	7	88	59	5
Jumlah 2008		2	471	51	16	121	6	86	50	5
Jumlah 2007		2	470	41	12	103	4	86	27	2
Jumlah 2006		1	775	52	14	145	10	109	33	2
Jumlah 2005		1	774	46	19	144	9	110	46	2

Keterangan : Tahun 2007 data tidak termasuk Kabupaten Pesawaran

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Selatan

2.4.4 Sarana Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan terus dilaksanakan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Pembangunan pelayanan kesehatan dasar. Upaya yang telah dilakukan antara peningkatan akses untuk menjangkau pusat-pusat pelayanan kesehatan. Sampai dengan Tahun 2009 telah dibangun sebanyak 95 unit pos kesehatan desa (POSKEDES) dalam rangka mendekatkan pelayanan puskesmas serta peningkatan Usaha Kesehatan Berbasis Masyarakat (UKBM). Kemudian dalam rangka menjamin pembiayaan kesehatan bagi penduduk Kabupaten Lampung Selatan telah dilaksanakan Program JAMKESDA.

Berkaitan dengan peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, pemerintah daerah telah melakukan peningkatan sarana dan prasarana RSUD Kalianda. Upaya untuk pengembangan RSUD Kalianda, telah dimulai pembangunan gedung Unit Gawat Darurat terletak di jalan lintas sumatera yang selanjutnya akan dilengkapi dengan fasilitas lainnya pada masa yang akan datang.

Ketersediaan fasilitas kesehatan di Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan data Tahun 2009 terjadi peningkatan terutama untuk rumah bersalin, puskesmas induk, apotek, dan balai pengobatan. Ketersediaan berbagai fasilitas kesehatan ini memungkinkan bagi masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik dan cepat (Tabel 13).

Tabel 15 Banyaknya fasilitas kesehatan menurut kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2005-2009

Tahun	Rumah Sakit	Rumah Bersalin	Puskesmas Induk	Puskesmas Pembantu	Apotek	Balai Pengobatan
Jumlah 2009	1	7	23	76	19	44
Jumlah 2008	1	7	23	71	19	44
Jumlah 2007	1	5	21	75	7	37
Jumlah 2006	1	3	32	104	11	
Jumlah 2005	2	4	32	100	6	

Keterangan : Tahun 2007 data sudah dipisahkan dengan Kabupaten Pesawaran

Sumber : Lampung Selatan Dalam Angka

Khusus untuk rumah sakit dirasakan perlu ditambah ketersediaannya, karena sampai saat ini di Kabupaten Lampung Selatan baru ada satu rumah sakit yang terletak di Kecamatan kalianda. Untuk itu diperlukan investasi lainnya baik dari masyarakat atau swasta dalam bentuk penyediaan rumah sakit swasta. Sedangkan untuk Puskesmas Induk disetiap kecamatan telah tersedia yang juga didukung dengan adanya puskesmas pembantu.

2.4.5 Sarana Ibadah

Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan termasuk sangat variatif baik dari suku maupun agama yang dianutnya. Namun demikian mayoritas masyarakatnya memeluk agama Islam, sehingga nampak jelas sebaran tempat ibadah seperti Masjid dan Musholla hampir merata di seluruh wilayah Lampung Selatan.

Banyaknya berbagai fasilitas peribadatan yang didirikan di Kabupaten Lampung Selatan mencirikan berlangsungnya kehidupan beragama yang cukup baik. Diseluruh kecamatan telah berdiri masjid (1.297), langgar (1.355), dan mushalla (760). Untuk Kecamatan Natar, Kalianda, dan Palas telah memiliki lebih dari 100 masjid di masing-

masing kecamatan tersebut Sementara gereja kristen (43), gereja katolik (22), Kapel 15, Pura 118, dan Klenteng sebanyak 15 (Tabel 14).

Tabel 16 Banyaknya tempat ibadah menurut jenis dan kecamatan di Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2009

No	KECAMATAN	Masjid	Langgar	Mushalla	Kapel	Pura	Klenteng	Gereja	
								Kristen	Katolik
1	Natar	135	202	100	1	-	1	7	2
2	Jati Agung	95	80	40	2	-	2	-	1
3	Tj.Bintang	70	81	50	-	-	2	2	6
4	Tanjung Sari	60	55	25	-	-	5	-	-
5	Katibung	65	68	32	1	3	1	3	1
6	Mrb. Mataram	87	60	41	1	-	1	3	1
7	Way Sulan	68	51	35	-	-	-	-	-
8	Sidomulyo	72	173	83	-	44	1	7	3
9	Candipuro	65	138	71	4	11	-	4	2
10	Way Panji	55	45	50	-	-	-	-	-
11	Kalianda	150	61	70	2	-	1	3	-
12	Rajabasa	40	36	20	-	-	-	-	-
13	Palas	100	62	38	-	28	-	4	3
14	Sragi	60	73	42	1	3	-	2	1
15	Penengahan	45	68	21	2	5	-	5	1
16	Ketapang	78	54	18	1	24	1	3	1
17	Bakauheni	52	48	24	-	-	-	-	-
	Jumlah	1.297	1.355	760	15	118	15	43	22

Sumber : BPS Kabupaten Lampung Selatan

2.4.5 Sarana Listrik

Kebutuhan listrik masyarakat di Lampung Selatan dilayani oleh PLN Persero (Tbk). Kebutuhan listrik cukup tinggi hal ini terlihat dari besarnya daya terpasang di Lampung Selatan sebesar 29.273.230 KVA. Apabila kita bandingkan antara jumlah rumah tanga yang ada yaitu 278.593 rumah tangga jumlah pelanggan listrik sebesar 112.885 berarti terdapat 165.708 rumah tangga yang belum menikmati pelayanan listrik (59,48%). Jumlah Pelanggan listrik dan jumlah daya terpasang tertera pada Tabel 15.

Tabel 17 Banyaknya Pelanggan, Kva Terpasang, Jaringan Dan Jumlah Gardu Listrik Per Ranting/Sub Ranting PLN tahun 2008

No.	Ranting/Sub Ranting PLN	Jumlah Pelanggan	KVA Terpasang Langganan	Jaringan Tegangan Menengah	Jumlah Gardu	Jumlah Tegangan Rendah	KVA Terpasang di Gardu
1.	Kalianda	19.841	22.201.180	195.663	143	198.512	15.660
2.	Palas	11.446	8.409.100	86.024	61	136.267	4.746
3.	Ketapang	7.177	7.432.250	64.900	51	51.259	3.167
4.	Bakauheni	2.967	5.886.900	53.311	29	30.441	5.165
5.	P.Sebesi	159	74.200	-	-	4.300	-
Jumlah		41.590	44.003.630	399.898	284	420.779	28.738

Sumber : Jumlah PLN Ranting Kalianda dalam LSDA, 2009

2.4.6 Sarana Air Bersih

Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan belum seluruhnya mendapatkan manfaat dari pelayanan sarana air bersih. Sarana air bersih terpusat di lingkungan ibukota kabupaten dan beberapa pusat perekonomian. Mayoritas penduduk memanfaatkan air bersih untuk kebutuhan masak, mencuci dan mandi dari sumur tradisional yang mereka miliki.

2.4.7 Sarana Telekomunikasi

Jaringan telepon sebagai sarana telekomunikasi belum dapat menjangkau seluruh wilayah Lampung Selatan. Pada umumnya jaringan telepon dimanfaatkan oleh masyarakat untuk kepentingan bisnis, residensial, sosial, wartel dan telepon umum. Banyaknya sambungan telepon tertera pada Tabel 16.

Tabel 18 Banyaknya sambungan Telepon pada Kantor Telkom Cabang Kalianda

No	Segmen	Jumlah (SSP) menurut Segmen				
		Kalianda	Simpang Sei	Negeri	Ind. Telekom	Subsidiario
1.	Bisnis	175	22	112	24	263
2.	Resedensial	1.426	489	1.331	1.313	870
3.	Sosial	1	-	-	-	-
4.	Wartel type A dan B	20	26	22	9	6
5.	Telepon Umum	-	-	-	-	-
Jumlah		1.622	537	1.465	1.346	1.139

Sumber: PT Telkom Kantor Cabang Kalianda dalam LSDA, 2009

Banyaknya surat yang dikirim lewat PT Pos Indonesia Kalianda tahun 2007 sebanyak 8.880 surat, dengan rincian 5.226 kilat, 838 terdaftar, dan 2.816 surat keluar negeri. Sedangkan jumlah surat yang diterima sebanyak 17.189 kilat, 1.074 terdaftar, dan 4.513 surat dari luar negeri. Paket pos yang dikirim dan diterima masing-masing sebanyak 722 dan 1.736 buah. Banyaknya wesel pos yang dikirim dan dibayar masing-masing sebanyak 2.336 lembar dan 2.539 lembar, dengan nilai masing-masing sebesar Rp.889.790.125,- dan Rp.1.269.607.580,-

2.5 Kondisi Budaya dan Adat Istiadat

Dengan beraneka ragamnya suku bangsa yang bertempat tinggal di Kabupaten Lampung Selatan, maka masing-masing mempunyai budaya dan adat istiadat tersendiri yang dalam garis besarnya dapat digolongkan dalam 2 kelompok yaitu kelompok penduduk asli (suku Lampung selatan) dan kelompok penduduk pendatang (dari luar daerah Lampung selatan).

Penduduk Kabupaten Lampung Selatan dalam bentuknya yang asli memiliki struktur hukum adat tersendiri. Hukum adat tersebut berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Kelompok-kelompok tersebut menyebar diberbagai tempat, yang secara umum dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu masyarakat Lampung selatan Peminggir yang merupakan mayoritas suku Lampung selatan di Kabupaten Lampung Selatan dan kelompok kedua yaitu masyarakat Lampung selatan Adat Pepadun.

Masyarakat Lampung selatan Peminggir tidak mengenal istilah Pepadun tetapi dengan istilah Sai batin. Sai batin ini secara turun temurun terkenal sebagai orang yang mempunyai pengaruh kepada suatu kelompok atau lingkungan masyarakat Lampung selatan yang lebih besar.

Masyarakat Adat Pepadun yang berkediaman didaerah pedalaman Lampung selatan seperti masyarakat Abung, Pubian, Menggala/Tulang Bawang, Sungkai/ Way Kanan yang merupakan pendatang dari wilayah Lampung selatan Utara. Upacara-upacara Adat pada umumnya ditandai dengan adanya perkawinan/pernikahan yang dilakukan menurut tatacara adat itu sendiri.

2.6 Potensi Sumberdaya Alam dan Lingkungan

2.6.1 Potensi Pertanian

a. Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kegiatan Pertanian Tanaman Pangan yang dilaksanakan umumnya menggunakan pola Intensifikasi dan Ekstensifikasi sehingga Kabupaten Lampung Selatan dapat memenuhi kebutuhan pangan di daerahnya. Produktivitas pertanian tanaman pangan tahun 2004 tertera pada Tabel 17, sedangkan luas dan produksi Tanaman Hortikultura di Lampung Selatan tahun 2008 tertera pada Tabel 18.

Tabel 19 Luas dan Produksi (ton/ha) Tanaman Pangan tahun 2008.

No	Jenis Tanaman	Luas Tanaman (ha)	Produksi (ton/ha)
1.	Padi Sawah	54.415	279.257,7
2.	Padi Ladang	6.427	22.141,5
3.	Jagung	84.194	366.412,0
4.	Ubikayu	6.441	109.734,9
5.	Ubi Jalar	537	7.214,6
6.	Kacang Tanah	407	766,9
7.	Kacang Hijau	301	267,9
8.	Kacang Kedelai	459	514,9

Sumber: Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Kab. Lampung Selatan

b. Tanaman Perkebunan

Tanaman perkebunan di Lampung Selatan sampai tahun 2008 menunjukkan adanya perkembangan yang baik, namun demikian masih diperlukan pembinaan yang intensif agar produktivitasnya dapat semakin meningkat atau dapat mencapai batas produksi yang optimum. Luas lahan dan produktivitas tanaman perkebunan tertera pada Tabel 19.

2.6.2 Potensi Peternakan

Sebagian masyarakat Kabupaten Lampung Selatan hingga tahun 2008 masih membudidayakan hewan ternak sebagai salah satu matapencahariannya. Jenis hewan ternak yang dibudidaya adalah sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Pada tahun 2004, jumlah hewan ternak sebagaimana tersebut diatas masing-masing sebanyak 82.624 ekor; 13.236 ekor; 345.738 ekor; 11.971 ekor; dan 10.972 ekor. Berdasarkan data statistik tahun 2008 terlihat bahwa perkembangan populasi semua hewan ternak besar dari tahun 2004-2008 menunjukkan angka yang meningkat. Disamping itu, populasi ternak unggas pun menunjukkan kecenderungan yang sama, yaitu meningkat dari tahun 2004-2008, kecuali

ayam ras petelur yang mengalami penurunan pada tahun 2004 dari tahun sebelumnya 2003, yaitu dari 917.321 ekor menjadi 907.274 ekor. Produksi daging dan telur dari jenis hewan ternak di Kabupaten Lampung Selatan disajikan pada Tabel 20. dan Tabel 21.

Tabel 20 Luas dan Produksi Tanaman Hortikultura Jenis Buah-Buahan dan Sayur-sayuran Tahun 2008

No	Jenis Tanaman	Luas (Ha)	Produksi (Pkg)
A.	Buah-buahan		
1.	Alpukat	137,82	12.999,10
2.	Mangga	879,22	2.805,00
3.	Rambutan	1.261,57	2.234,70
4.	Duku/langsat	302,29	1.068,50
5.	Jeruk	36,17	912,90
6.	Blimbing	47,32	200,87
7.	Manggis	180,73	153,80
8.	Durian	1.583,14	16.621,70
9.	Jambu biji	59,45	304,90
10.	Jambu air	257,12	918,90
11.	Sawo	183,79	350,80
12.	Pepaya	58,99	592,40
13.	Pisang	8.687,35	250.542,30
14.	Nenas	2,14	415,00
15.	Salak	38,18	361,02
16.	Nangka	456,74	1.418,30
17.	Sirsak	47,47	223,70
B.	Sayur-sayuran		
1.	Bawang Daun	83,0	744,5
2.	Melinjo	975,2	2.745,9
3.	Petsai/sawi	216,0	2.297,9
4.	Cabe	338,0	846,7
5.	Terong	139,0	1.355,1
6.	Tomat	159,0	1.790,3
7.	Ketimun	255,0	3.264,3
8.	Kacang Panjang	275,0	1.394,3
9.	Buncis	108,0	1.088,9
10.	Kangkung	155,0	1.709,9
11.	Bayam	178,0	283,6
13.	Labu Siam	12,0	266,8
14.	Petai	683,1	2.670,4

Sumber : Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura Kab. Lampung Selatan

Tabel 21 Produktivitas Tanaman Perkebunan Lampung Selatan tahun 2008.

No	Jenis Komoditas	Luas Area (ha)				Produksi (ton)	Produktivitas (kg/ha)
		TEBM	TM	TEATR	Jumlah		
1.	Kopi	289,0	1.191,0	269,0	1.749,0	555,6	466,5
2.	Cengkeh	207,0	674,0	462,0	1.343,0	132,1	196,0
3.	Lada	42,0	247,0	23,0	312,0	56,0	226,7
4.	Kelapa Dalam	2.183,0	31.918,0	1.250,0	35.351,0	33.370,5	1.045,5
5.	Kelapa Hybrid	-	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
6.	Kelapa Sawit	3.589,0	2.289,0	15,0	5.893,0	4.614,0	2.015,7
7.	Karet	874,0	933,0	15,0	1.822,0	643,0	689,2
8.	Kakao	2.741,0	8.183,0	143,0	9.151,0	7.898,0	965,2
9.	Vanili	51,0	314,0	45,0	410,0	98,0	312,1
10.	Aren	48,0	29,0	-	77,0	28,0	965,5
11.	Jarak	2.018,0	817,0	16,0	2.851,0	188,5	230,7
12.	Kapuk Randu	7,0	17,0	-	24,0	7,0	411,4
13.	Kemiri	21,0	41,0	10,0	72,0	7,0	170,7
14.	Kenanga	-	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
15.	Jambu Mete	2,0	8,0	-	10,0	1,0	125,0
16.	Kumis kucing	-	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
17.	Pinang	65,0	75,0	3,0	143,0	51,0	680,0
18.	Kapulaga	-	1,0	2,0	3,0	4,0	5,0
19.	Cabe Jawa	-	12,0	-	12,0	4,0	333,3
20.	Jahe	6,4	8,5	-	14,9	52,88	-
21.	Kencur	9,3	7,2	-	16,5	49,74	-
22.	Kunyit	6,4	18,9	-	25,3	83,83	-
23.	Lengkuas	10,5	19,5	-	30,0	59,80	-
24.	Temulawak	9,3	7,1	-	16,4	44,05	-

Sumber : Dinas Perkebunan Kabupaten Lampung Selatan

Tabel 22 Perkembangan Populasi Ternak Kabupaten Lampung Selatan, 2004-2008

No	Tahun	Jumlah Ternak							
		Sapi	Kerbau	Kambing	Domba	Cat	Ayam Buras	Ayam Petel	Ayam Broiler
1.	2004	82.624	13.236	345.738	11.971	10.972	6.565.466	907.274	25.666.567
2.	2005	83.084	13.515	349.878	13.606	12.822	6.375.799	1.010.361	15.434.534
3.	2006	71.464	4.048	348.442	9.103	4.614	5.193.838	1.448.263	12.804.049
4.	2007	47.968	3.082	220.465	6.114	4.668	3.395.226	885.385	7.979.003
5.	2008	48.337	2.560	221.681	6.154	4.733	4.409.106	2.346.159	8.487.241

Sumber : LSDA 2009

Tabel 23 Perkembangan Produksi Hasil Ternak (daging dan telur) Kabupaten Lampung Selatan, 2004-2008 (dalam ton)

No.	Tahun	Jenis Ternak						
		Sapi	Kerbau	Kambing	Ayam Ras Pedaging	Babi	Ayam Buras	Ayam Ras Per telur
1.	2004	10.090,62	1.096,68	889,70	10.243,92	721,52	2.390,5	3.343,61
2.	2005	8.121,53	888,20	722,67	12.190,25	584,42	2.988,15	4.197,67
3.	2006	1.069,11	71,98	125,97	334,59	48,81	10,61	3,51
4.	2007	972,08	41,07	81,80	210,75	38,71	11,89	7,39
5.	2008	740,07	45,57	78,98	169,66	37,38	88,16	5,17

Sumber : LSDA 2009

2.6.3 Potensi Perikanan

Potensi, pemanfaatan dan produksi budidaya kolam yang dilakukan masyarakat pada tahun 2006 merupakan titik kulminasi selama periode tahun 2004-2008, dimana luas area budidaya mencapai 1.459 hektar dengan produksi 5.772,92 ton ikan. Pada tahun 2004 luas area budidaya 1.155,14 hektar menghasilkan 3.900,21 ton ikan, tahun 2005 luas area 1.201,34 hektar dengan produksi 4.700,95 ton, tahun 2007 luas area seluas 700,50 hektar dengan produksi sebesar 3.672,00 ton dan pada tahun 2008 luas area budidaya mencapai 701,15 hektar dengan produksi sebesar 3.654,41 ton ikan. Adapun budidaya ikan mina padi sejak tahun 2004 hingga 2008 menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. Area budidaya seluas 138,75 hektar tahun 2004 menjadi sebesar 150,75 hektar tahun 2005, dengan produksi masing-masing sebesar 115,60 dan 141,21 ton ikan. Pada tahun 2006 luas area seluas 174,38 hektar dengan produksi sebesar 145,64 ton, tahun 2007 luas area 322,28 hektar dan produksi 258,52 ton, dan pada tahun 2008 luas area budidaya seluas 333,08 hektar dengan produksi sebesar 267,70 ton.

Di perairan umum, produksi ikan tangkap pada tahun 20004 luas areal pemanfaatan hanya berkisar 50 hektar menghasilkan 72,40 ton, tahun 2005 luas area tangkap 45 hektar menghasilkan 65 ton, tahun 2006 luas area tangkap 45 hektar menghasilkan 57 ton, dan pada tahun 2007 luas area tangkap seluas 32 hektar menghasilkan 87,40 ton. Produktivitas perikanan tangkap laut selama pada tahun 2008 sebesar 32.836,30 ton. Alat tangkap yang digunakan para nelayan di pesisir Lampung Selatan secara umum masih sederhana, seperti pancing, rampus, payang, sero, bubu, bagan rakit, bagan tancap, dan jukung.

kerja yang terserap pada industri ini sebanyak 23.293 orang, dengan jumlah terbesar ada pada jenis industri genteng dari tanah liat.

2.6.6 Potensi Pariwisata

Kabupaten Lampung Selatan memiliki potensi pariwisata yang sangat potensial untuk dikembangkan, meliputi wisata alam Gunung Rajabasa, Pulau Sebesi, Pulau Sebu, Gugusan Pulau Krakatau, dan Air Panas Belerang Kalianda; wisata budaya Makam Pahlawan Radin Intan II di Penengahan dan Makam Kuno Palas di Palas; Air Terjun Way Kalam di Kec. Penengahan; dan wisata pantai yang tersebar dari kawasan Pesisir Barat hingga Pesisir Timur Kabupaten Lampung Selatan. Untuk mengembangkan potensi wisata tersebut perlu ditunjang sarana dan prasarana, dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.

2.6.7 Potensi Lahan

a. Geologi

Secara geologis wilayah Kabupaten Lampung Selatan terdiri dari bagian-bagian sebagai berikut :

1. Pegunungan *Vulkanis* muda.
2. Sebagian besar berbatuan Andesit, ditutupi oleh Turfizam. Batuan Andesit meluas ke Timur sampai sekitar jalan Kereta Api ke arah Kota Bumi, keadaan tanah bergelombang sampai berbukit.
3. Dataran landai bagian Timur yang termasuk wilayah Kabupaten Lampung Selatan tidak begitu luas, berbatuan Andesit ditutupi Turfizam.
4. Dataran *Alluvial* berawa dengan pohon bakau.

b. Klimatologi

Iklim di daerah Kabupaten Lampung Selatan sama halnya dengan daerah lainnya di Indonesia, dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah dan tekanan tinggi yang berganti di daratan sentra Asia dan Australia pada bulan Januari dan Juli. Karena pengaruh angin *Muson*, daerah Lampung Selatan tidak terasa adanya musim peralihan (pancaroba) antara musim kemarau dan musim hujan.

Pada daerah daratan dengan ketinggian 60 m temperatur udara berkisar antara 26°C - 28°C. Temperatur maksimum yang sangat jarang dialami adalah 33,2°C dan temperatur minimum 20,6°C. Kelembaban udara, rata-rata berkisar antara 82% - 93%, dan ternyata kelembaban udara akan lebih tinggi pada tempat-tempat yang lebih tinggi.

c. Jenis Tanah

Jenis tanah yang banyak terdapat di Kabupaten Lampung Selatan adalah tanah *Latosol*, hampir menutupi seluruh wilayah Barat dan sebagian besar bagian Tengah, tanah *Podsolik* yang tersebar pada wilayah bagian Utara, tanah *Andosol* yang tidak begitu banyak, tanah *Hidromorf* yang tersebar di bagian Timur, dan tanah *Alluvial* yang tersebar di seluruh daerah pantai bagian Timur.

2.6.8 Kondisi Kesejahteraan Masyarakat

a. Ketenagakerjaan

Banyaknya perusahaan di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2008 adalah 7.222 dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 30.900 orang, dengan rincian 30.844 orang WNI dan 56 orang WNA laki-laki. Rata-rata besarnya kebutuhan minimum di Kabupaten Lampung Selatan per bulan meningkat dari Rp.657.891 pada tahun 2006 menjadi Rp. 692.557 pada tahun 2007.

Banyaknya pasar kerja yang terdaftar di Disnaker Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2007 sebesar 4.638 orang dengan rincian 2.166 laki-laki dan 2.472 perempuan. Sedangkan permintaan kerja yang terdaftar 1.469 orang dengan rincian 337 orang laki-laki dan 1.132 orang perempuan. Jumlah penempatan sama dengan jumlah penerimaan, dan pada tahun 2007 terdapat penghapusan sebesar 4.588 orang. Jumlah yang dihapuskan adalah 2.469 orang laki-laki dan 2.126 orang perempuan. Adapun jumlah yang belum ditempatkan sampai dengan tahun 2007 adalah 6.694 orang laki-laki dan 5.679 orang perempuan.

b. Pentahapan Keluarga dan Program Keluarga Berencana (KB)

Jumlah keluarga pra sejahtera pada tahun 2007 di seluruh wilayah Lampung Selatan sebesar 102.999 KK, sejahtera I sebesar 49.698 KK, sejahtera II sebesar 39.570 KK, sejahtera III sebesar 26.220 KK dan sejahtera III plus sebesar 1.279 KK.

Program keluarga berencana (KB) di Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2004 dapat dinilai cukup berhasil, yang dibuktikan dengan meningkatnya jumlah akseptor aktif yang umumnya memilih KB Suntik dan Pil sebagai alat untuk kontrasepsi. Jumlah akseptor baru pada tahun 2007 mencapai 121.975 orang, sedangkan realisasi peserta KB baru pada tahun yang sama mencapai 29.346 orang. Dampak dari program KB yang terus digalakan tersebut selama selang waktu 2007 adalah laju pertumbuhan penduduk rata-rata hanya sebesar 0,72% per tahun dan distribusi usia penduduk terbanyak pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebesar 67,4%.

c. Kesehatan Masyarakat

Ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Lampung Selatan hingga tahun 2008, telah memberikan dampak positif yang cukup besar terhadap tingkat kesehatan lingkungan dan masyarakat Lampung Selatan. Dengan dukungan 12 (dua belas) gedung farmasi, 83 orang tenaga kesehatan di Dinas Kesehatan Lampung Selatan, 792 orang tenaga medis dan paramedis yang tersebar di seluruh puskesmas yang ada di Lampung Selatan dan 173 tenaga medis dan paramedis di RSUD Kalianda, telah mampu melayani 4.204 kasus penderita rawat jalan di rumah sakit selama tahun 2008 dengan 22 pola jenis penyakit yang sering diderita masyarakat seperti infeksi akut lain pada saluran pernafasan bagian atas sekaligus sebagai jenis penyakit yang paling sering diderita (12,37%).

Di samping itu, program imunisasi bayi dan ibu hamil selama tahun 2008 telah memberikan pelayanan kepada 19.639 bayi dengan BCG, 20.168 DPT I, 19.417 Folio-4, 19.235 Campak, 18.126 bumil dengan TT 1 dan 16.953 bumil dengan TT 2. Dampak yang dapat dilihat dari pembangunan sektor kesehatan tersebut di atas antara lain adalah meningkatnya angka harapan hidup (AHH) dari 67,5 tahun pada tahun 2006 menjadi 67,9 tahun pada tahun 2008.

d. Pendapatan Per Kapita Masyarakat

Berdasarkan perhitungan PDRB atas dasar harga berlaku sebagaimana disajikan pada Tabel 6 dan jumlah penduduk Kabupaten Lampung Selatan pada pertengahan tahun 2008 maka dapat diperhitungkan tingkat pendapatan regional per kapita penduduk Lampung Selatan pada tahun 2008 adalah sebesar Rp. 6.855.426,- sedangkan berdasarkan atas harga konstan 2000 maka tingkat pendapatan regional perkapita tahun 2008 sebesar Rp. 3.673.369,-. Jika melihat kepada data tahun 2007 dan sebelumnya nampak bahwa terjadi peningkatan pendapatan per kapita masyarakat sebesar Rp. 955.591,- (harga berlaku) atau Rp. 97.222,- (harga konstan) dengan laju pertumbuhan rata-rata PDRB 5,13 per tahun.

2.6.9 Pemerintahan Daerah

Kabupaten Lampung Selatan pada tahun 2008 terbagi dalam 17 kecamatan, 248 desa, 3 kelurahan, dan 1.366 dusun/lingkungan. Dari keseluruhan desa yang ada, 243 desa sudah berstatus definitif, sedangkan 5 desa masih berstatus persiapan.

Pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan melibatkan 9.816 orang pegawai negeri sipil (PNS) Pemda Kabupaten Lampung Selatan dengan berbagai

jenjang pendidikan dan tingkat kepangkatan. Berdasarkan jenjang pendidikan, PNS berpendidikan tamat SLTA menempati porsi terbesar sebanyak 3.574 orang, diikuti dengan PNS berpendidikan sarjana (S1) sebanyak 2.550 orang, akademi 39 orang, sekolah dasar 206 orang, SLTP 186 orang, pascasarjana (S2) 73 orang, pascasarjana (S3) 1 orang dan diploma 3.187 orang.

Berdasarkan tingkat kepangkatan PNS Pemda Lampung Selatan didominasi oleh staf berpangkat Pembina (IVa), Penata Tk. I (Gol IIId), kemudian Penata (Gol IIIC), Penata Muda Tk. I (Gol IIIB), dan Penata Muda (Gol IIIA). Jumlah PNS berpangkat Pengatur Tk. I dan yang lebih rendah sebanyak 1300 orang, sedangkan yang berpangkat Pembina, Pembina Tk. I dan Pembina Utama Muda masing-masing sebanyak 2.576 orang, 96 orang dan 24 orang.

Pelaksanaan pemerintahan daerah Kabupaten Lampung Selatan juga diawasi oleh wakil-wakil rakyat melalui DPRD. Pada tahun 2009, sebagian besar anggota DPRD berasal dari fraksi Partai Demokrat. DPRD Kabupaten Lampung Selatan terdiri atas beberapa komisi, yaitu Komisi A (Bidang Pemerintahan), Komisi B (Bidang Perekonomian), Komisi C (Bidang Pembangunan), dan Komisi D (Bidang Kesejahteraan Masyarakat). Jumlah anggota DPRD secara keseluruhan adalah 45 orang, yang berasal dari Partai Demokrat 8 orang, PDIP 7 orang, PAN 6 orang, PKS 6 orang, Partai Golkar 5 orang, PNBKI 3 orang, Partai Hanura 3 orang, PPP 2 orang, PDK 1 orang, PIS 1 orang, PK 1 orang, PBR 1 orang, dan PKB 1 orang.

III. VISI DAN MISI

III. VISI DAN MISI KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2011-2015

3.1 Visi

Dalam perencanaan pembangunan daerah, formulasi visi sangat penting sebagai pedoman implementasi dalam pembangunan. Visi yang baik (*vision of success*) dapat didefinisikan sebagai deskripsi tentang apa yang akan dicapai setelah organisasi tersebut mengimplementasikan strateginya dan mencapai potensi sepenuhnya.

Pada umumnya visi dibangun untuk mendorong semangat seluruh stakeholders agar dapat berperan serta aktif dalam pembangunan dan sekaligus sebagai inspirasi untuk menggerakkan seluruh kemampuan stakeholders untuk secara bersama dan sinergis membangun daerah.

Masyarakat Lampung selatan berkehendak untuk menjadikan visi pembangunan sebagai aspirasi, peta jalan atau langkah strategik, energi masyarakat untuk pembangunan, dan identitas masyarakat untuk bergerak ke arah yang lebih maju, baik secara komparatif ataupun secara kompetitif. Visi pembangunan Kabupaten Lampung selatan ini merupakan kondisi akhir daerah dan wilayah Lampung selatan yang dikehendaki oleh seluruh komponen pemangku kepentingan (stakeholders) di Kabupaten Lampung selatan dalam periode 2011-2015.

Salah satu hal penting adalah bahwa Kabupaten Lampung selatan pada tahun 2011-2015 memasuki tahapan II dari RPJPD Kabupaten Lampung selatan. Tahapan II meliputi proses mengembangkan kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan. Hal ini berarti bahwa tahap II merupakan kelanjutan dari RPJPD Tahap I dan merupakan jembatan bagi pelaksanaan Tahap III, dan pada akhirnya akan mengarah kepada pencapaian visi RPJP 2005-2025.

Oleh karenanya penting sekali menjadikan visi pembangunan Kabupaten Lampung selatan menjadi visi bersama (*shared vision*). Dengan mendasarkan kepada: modal dasar Kabupaten Lampung selatan, tantangan yang dihadapi dalam 5 (lima) tahun ke depan, dan mengacu pada Visi Nasional Tahun 2005-2025 dan Visi Kabupaten Lampung selatan 2005-2025, maka visi dalam RPJM 2011-2015 adalah :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN ”

Lampung Selatan yang MAJU dimaksudkan bahwa, tingkat kemajuan suatu masyarakat dinilai berdasarkan berbagai ukuran. Ditinjau dari indikator sosial, tingkat kemajuan suatu masyarakat diukur dari kualitas sumber daya manusianya. Suatu masyarakat dikatakan makin maju apabila sumber daya manusianya memiliki kepribadian, berakhlak mulia, dan berkualitas pendidikan yang tinggi. Tingginya kualitas pendidikan penduduk ditandai oleh makin menurunnya tingkat pendidikan terendah serta meningkatnya partisipasi pendidikan dan jumlah tenaga ahli serta profesional yang dihasilkan oleh sistem pendidikan.

Kemajuan suatu masyarakat juga diukur berdasarkan indikator kependudukan, ada kaitan erat antara kemajuan suatu masyarakat dengan laju pertumbuhan penduduk, termasuk derajat kesehatan. Masyarakat yang sudah maju ditandai dengan laju pertumbuhan penduduk yang seimbang dengan jumlah penduduk, angka harapan hidup yang lebih tinggi, dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Ditinjau dari tingkat perkembangan ekonomi, kemajuan suatu masyarakat diukur dari tingkat kemakmurnya yang tercermin pada tingkat pendapatan dan pembagiannya. Tingginya pendapatan rata-rata dan ratanya pembagian ekonomi suatu penduduk menjadikan penduduk tersebut lebih makmur dan lebih maju. Masyarakat yang maju pada umumnya adalah masyarakat yang sektor industri dan sektor jasanya telah berkembang. Peran sektor industri manufaktur sebagai penggerak utama laju pertumbuhan makin meningkat, baik dalam segi penghasilan, sumbangan dalam penciptaan pendapatan daerah maupun dalam penciptaan tenaga kerja. Selaian itu, dalam proses produksi berkembang keterpaduan antar sektor, terutama sektor industri, sektor pertanian, dan sektor-sektor jasa, serta pemanfaatan sumber daya alam yang bukan hanya ada pada pemanfaatan ruang daratan, tetapi juga ditransformasikan kepada pemanfaatan ruang kelautan secara rasional, efisien, dan berwawasan lingkungan, mengingat Kabupaten Lampung Selatan mempunyai pantai dan pesisir yang cukup luas. Lembaga dan pranata ekonomi telah tersusun, tertata, dan berfungsi dengan baik, sehingga mendukung perekonomian yang efisien dengan produktivitas yang tinggi. Daerah yang maju pada umumnya adalah daerah yang perekonomiannya stabil. Gejolak yang berasal dari dalam maupun luar daerah dapat diredam oleh ketahanan ekonominya.

Selain memiliki berbagai indikator sosial ekonomi yang lebih baik, daerah yang maju juga telah memiliki sistem dan kelembagaan politik, termasuk pelaksanaan hukum yang mantap. Daerah yang maju juga ditandai oleh adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan, baik ekonomi, sosial, politik, maupun

pertahanan keamanan. Dalam aspek politik, sejarah menunjukkan adanya keterkaitan erat antara kemajuan suatu daerah dan sistem politik yang berlaku. Daerah yang maju pada umumnya menganut sistem demokrasi yang sesuai dengan budaya dan latar belakang sejarahnya. Daerah yang maju adalah daerah yang hak-hak masyarakatnya, keamanannya, dan ketentramannya terjamin dalam kehidupannya. Selain unsur-unsur tersebut, daerah yang maju juga harus didukung dengan infrastruktur yang maju.

SEJAHTERA yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan jasmani dan rohani. Kebutuhan jasmani ditunjukkan dengan terpenuhinya kebutuhan sosial dan ekonomi masyarakat, kemampuan pendayagunaan segenap sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi yang dikelola secara bijaksana

Lampung Selatan yang sejahtera ditandai dengan terpenuhinya seluruh kebutuhan dasar masyarakat baik yang tinggal di perkotaan maupun perdesaan. Hal tersebut ditunjukkan dengan meningkatnya daya beli, menurunnya tingkat kemiskinan, meningkatnya penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, meningkatnya akses yang lebih merata terhadap sumberdaya ekonomi bagi seluruh masyarakat, dan terjaminnya ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat Lampung Selatan dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Menjadi daerah yang maju dan sejahtera **BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN** mempunyai pengertian bahwa Kabupaten Lampung Selatan menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dengan melibatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah pengembangan ekonomi yang didasarkan pada pengembangan semua sumber daya dan potensi lokal, serta mampu mengoptimalkan semua keunggulan wilayah yang dimiliki.

Untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan wilayah, maka diperlukan ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; pengaturan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi; peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan untuk mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (*entrepreneurship government*); pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal; serta kondisi masyarakat yang percaya diri dan bersifat positif. Semua pertumbuhan dan perkembangan akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ekonomi kerakyatan yang tumbuh dan berkembang umumnya berbasis pertanian, namun kemudian bergerak mengarah ke industri, perdagangan, dan jasa, didukung oleh

infrastruktur masa depan yang memadai. Proses produksi mulai didukung dengan penerapan sains dan teknologi.

Tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan mulai meningkat dengan sebaran lebih merata. Sistem dan kelembagaan politik, dan hukum mulai mantap, serta berkehidupan demokratis, tidak diskriminatif dalam bentuk apapun, menjunjung tinggi HAM, beretika, disiplin, tertib, serta menghargai profesi.

Keunggulan dan daya saing wilayah terlihat pada pelayanan pendidikan dan kesehatan yang mengarah ke peningkatan kualitas, sehingga dihasilkan manusia terdidik, terlatih, dan sehat. Laju pertumbuhan penduduk lebih kecil; dengan angka harapan hidup yang lebih tinggi; dan kualitas pelayanan sosial yang lebih baik. Secara keseluruhan kualitas sumber daya manusia yang makin baik akan tercermin dalam produktivitas yang makin tinggi.

Menjadi wilayah unggul dan berdaya saing berbasis ekonomi kerakyatan mempunyai pengertian bahwa Kabupaten Lampung selatan menjadi daerah dengan kinerja ekonomi tinggi dengan melibatkan masyarakat sebagai pemeran utama dalam pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi kerakyatan yang dimaksud adalah pengembangan ekonomi yang didasarkan pada pengembangan semua sumber daya dan potensi lokal, serta mampu mengoptimalkan semua keunggulan wilayah yang dimiliki.

Untuk menjaga keberlangsungan dan kesinambungan pertumbuhan dan perkembangan wilayah, maka diperlukan ketersediaan infrastruktur fisik serta infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi; pengaturan pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan; penciptaan iklim usaha kondusif untuk peningkatan investasi; peningkatan kemampuan aparatur pemerintahan untuk mendukung terwujudnya organisasi berkewirausahaan (*entrepreneurship government*); pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal; serta kondisi masyarakat yang percaya diri dan bersifat positif. Semua pertumbuhan dan perkembangan akan berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2 Misi

Misi adalah upaya yang harus dilakukan oleh organisasi secara terencana dalam rangka mewujudkan Visi. Dalam organisasi pemerintah daerah, misi menjadi *direction* untuk tugas-tugas yang harus diemban oleh satuan kerja. Dalam upaya mewujudkan Visi Kabupaten Lampung selatan 2011-2015, dapat dilaksanakan melalui Misi berikut :

1. Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur skala tinggi, ekonomi, dan pelayanan sosial.

2. Meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial.
4. Mengembangkan masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia.
5. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang demokratis.
7. Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan, dan bertatakelola yang baik.

Misi-1 : Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur skala tinggi, ekonomi, dan pelayanan sosial.

Misi ini adalah upaya untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas infrastruktur guna pengembangan ekonomi daerah dan pelayanan sosial. Melalui misi ini mulai diletakkan dasar pembangunan infrastruktur skala tinggi yang bersifat visioner, fungsional, sekaligus monumental. Pembangunan infrastruktur yang dimaksud juga meliputi pengembangan cakupan infrastruktur (transportasi, darat, air, sungai, dan udara, energi, dan telematika) yang berorientasi pada pengembangan ekonomi lokal dalam bingkai pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan infrastruktur ini diorientasikan untuk menarik investasi lebih lanjut dalam rangka pengembangan daerah secara keseluruhan.

Misi-2 : Meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan

Misi ini adalah upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan mengembangkan potensi dan keunggulan yang dimiliki Kabupaten Lampung Selatan guna memperkuat ekonomi yang telah berkembang di masyarakat. Ekonomi kerakyatan ini terus dikembangkan, dimantapkan, dan diperkuat melalui proses Revitalisasi Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan dan untuk selanjutnya kemudian ditransformasikan ke ekonomi berbasis industri, sehingga membentuk ekonomi agro industri. Sementara itu, perdagangan dan jasa dikembangkan berbasis teknologi. Investasi baru di sektor riil terus dipacu untuk memperluas kesempatan kerja.

Pemerataan ekonomi tercermin pada distribusi aset produktif seperti tanah dan pengembangan UKM yang menyerap banyak tenaga kerja. Pembangunan ekonomi diarahkan untuk mengurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan jumlah penduduk miskin, dan meredam efek dan dampak krisis global. Pembangunan ekonomi selaras dengan pelestarian sumber daya alam dan tidak merusak lingkungan.

Misi-3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

Misi ini adalah upaya mengembangkan dan memperkuat kualitas sumber daya manusia (SDM) dengan mengembangkan dan meningkatkan kualitas pendidikan di semua jalur, jenis, dan jenjang. Pengembangan SDM berkualitas didukung dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan olahraga. Bagi golongan masyarakat kurang mampu peningkatan kualitas SDM akan didukung dengan pelayanan kesejahteraan sosial yang memadai.

Misi-4 : Mengembangkan masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia

Misi ini adalah merupakan upaya memperkuat jati diri dan karakter masyarakat melalui pendidikan yang membentuk manusia yang bertakwa kepada Tuhan YME, mematuhi aturan hukum, memelihara kerukunan internal dan antar umat beragama, melaksanakan interaksi antar budaya, mengembangkan modal sosial, menerapkan nilai-nilai luhur budaya bangsa, dan memiliki kebanggaan sebagai bagian dari Bangsa Indonesia dalam rangka memantapkan landasan spritual, moral, dan etika pembangunan bangsa.

Misi-5 : Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Misi ini merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara keberadaan dan pemanfaatan kegunaan sumber daya alam dan lingkungan hidup. Keseimbangan ini diupayakan dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan kehidupan pada masa kini dan masa depan, serta mengantisipasi perubahan iklim global. Pemanfaatan ruang diupayakan serasi antara penggunaan untuk pemukiman, kegiatan sosial ekonomi, serta upaya konservasi dan pemanfaatan nilai ekonomis sumber daya alam yang berkelanjutan.

Pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk mendukung kualitas kehidupan diperbaiki dengan meningkatkan pemeliharaan dan pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan. Selain itu juga diupayakan memberikan keindahan dan kenyamanan kehidupan pada semua fasilitas umum, sosial dan wilayah pemukiman.

Misi-6 : Meningkatkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang demokratis

Misi ini adalah upaya untuk mendukung pemantapan kemampuan dan peningkatan profesionalisme aparat keamanan dalam melindungi dan mengayomi masyarakat. Juga dimaksudkan untuk memantapkan kelembagaan demokrasi yang kokoh, memperkuat peran masyarakat sipil, menjamin pengembangan dan kebebasan pers, melakukan pembenahan struktur hukum, meningkatkan kesadaran hukum, dan menegakkan hukum serta memberantas KKN.

Misi-7 : Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan, dan bertatakelola yang baik

Misi ini adalah upaya mewujudkan pemerintahan daerah bertatakelola baik, sehingga terwujud pemerintah yang bersih, berwibawa, bertanggung jawab, dan profesional. Dalam kaitan ini perlu diperkuat desentralisasi pemerintahan atau otonomi daerah serta keserasian dan keterpaduan pembagian tugas pelayanan antar Pemerintah Kabupaten dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Mewujudkan pemerintahan daerah yang berorientasi pada kewirausahaan (*entrepreneurial government*) yang mendorong inovasi dalam manajemen pemerintahan untuk pelayanan lebih baik kepada masyarakat dan dunia usaha

IV. ANALYSIS ISU STRATEGIES

IV. ANALISIS ISU STRATEGIS

4.1 Isu Global

Lingkungan global di era abad 21 ini ditandai dengan isu *Revolusi Industri* yang dikenal dengan *Revolusi 3 T* yaitu *Transportasi, Telekomunikasi dan Tourism*. Dengan semakin banyak dan beragam serta canggihnya sarana transportasi, telah menyebabkan semakin cepat dan mudahnya pergerakan manusia atau barang dari suatu tempat ke tempat lain; memberikan kemudahan dan kecepatan dalam penyampaian informasi keseluruh pelosok dunia; serta memberikan dorongan dan rangsangan luar biasa bagi perkembangan pariwisata.

Isu global kedua lain yang menonjol pada kurun waktu beberapa tahun terakhir ini masalah terorisme, khususnya sejak peristiwa Gedung WTC di Amerika Serikat dan peristiwa Bom Bali di Indonesia. Isu ini telah memunculkan fenomena paranoid, berupa ketakutan akan terjadinya terorisme di seluruh dunia, terutama pada dunia Muslim. Masalahnya, Indonesia dikenal sebagai negara Muslim terbesar di dunia, sehingga ikut terimbas dampak paranoid ini.

Pada sisi lingkungan, isu global yang telah muncul adalah adanya Global Warming yang mampu mengubah pola musim di seluruh dunia. Perubahan pola musim ini akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia karena perubahan pola musim akan mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja dan penyediaan pangan bagi manusia. Dengan demikian, isu Global Warming cepat atau lambat akan berpengaruh terhadap perjalanan hidup bangsa Indonesia, Provinsi Lampung pada umumnya dan Kabupaten Lampung Selatan pada khususnya, yang masih bertumpu pada bidang pertanian.

Isu global yang lain adalah adanya krisis ekonomi global, yang dampaknya akan dapat segera terlihat dan berlangsung sampai 3-4 tahun ke depan. Persoalan yang kemudian muncul adalah bahwa RPJM 2011-2015 akan melalui suatu periode yang merupakan kurun waktu dari berlangsungnya dampak krisis global tersebut.

Berbagai isu global di atas, maka secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh besar bagi Indonesia, baik dampak positif maupun negatif. Dengan demikian,antisipasi terhadap dampak yang mungkin muncul harus dilakukan melalui perencanaan yang cermat dan tepat.

4.2 Isu Nasional

Berbagai masalah saat ini tengah dihadapi bangsa Indonesia, antara lain sebagai dampak dari krisis berkepanjangan khususnya di bidang politik, pemerintahan dan keamanan, yang kemudian mendorong terjadinya reformasi pemerintahan, hukum, dan HAM. Beberapa isu pokok yang menonjol terkait dengan reformasi tersebut antara lain : demokrasi, dis-integrasi, desentralisasi dan debirokratisasi.

Reformasi ini telah memicu terjadinya percaturan atau pergolakan politik nasional. Kemajuan yang cukup menonjol pada aspek demokrasi adalah terlaksananya pemilihan umum secara langsung, baik pemilihan anggota legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, maupun pemilihan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah. Masalah yang kemudian muncul ke permukaan pada aspek demokrasi adalah demokrasi yang kebablasan, yang ditandai dengan maraknya unjuk rasa yang kerap kali disertai dengan anarkisme.

Pada sisi lain, desentralisasi sebagai salah satu kaidah dalam implementasi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, telah memberikan ruang lebih luas bagi daerah untuk membangun rumah tangganya sendiri. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kaidah desentralisasi ini belum berjalan sebagaimana yang dihayatkan, bahkan terjadinya berbagai gejolak di beberapa daerah, yang antara lain sebagai akibat dari belum dipahaminya UU tersebut secara utuh. Disamping itu, masih cukup banyak substansi penting dalam implementasi UU tersebut belum ditindaklanjuti dengan penerbitan pedoman petunjuk pelaksanaan.

Ketidakefektifan UU Nomor 32 tahun 2004 juga muncul karena masih adanya perbedaan persepsi antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, termasuk antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam implementasi otonomi daerah, khususnya terkait dengan pembagian urusan yang menjadi kewenangan masing-masing.

Sementara itu, konsep dan implementasi NKRI sudah merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia. Namun demikian, jika tidak diwaspadai dengan cermat, isu disintegrasi bangsa masih mungkin untuk muncul, terutama melalui celah isu-isu SARA dan kesenjangan ekonomi, baik berupa kesenjangan antar wilayah maupun antar golongan.

Problem lain yang lebih mungkin muncul adalah isu debirokratisasi. Hal ini dapat terjadi karena Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki birokrasi yang lamban, berbelit, dan tidak efisien. Kondisi ini dalam jangka panjang akan sangat merugikan, terutama dari iklim investasi.

Isu lain yang berkembang di Indonesia adalah adanya kesenjangan pembangunan. Kesenjangan ini muncul, baik antar wilayah IBB (Indonesia Bagian Barat) dan IBT (Indonesia Bagian Timur), maupun antar daerah di dalam suatu wilayah. Isu kesenjangan pembangunan ini pada gilirannya memunculkan isu lanjutan berupa isu kemiskinan, pengangguran, dan adanya daerah tertinggal.

Selain itu aspek yang tidak kalah pentingnya adalah isu lingkungan, yang ditandai dengan berbagai kerusakan lingkungan yang berdampak terhadap penurunan kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Isu lingkungan hidup akan terkait dengan isu global warming, sehingga memunculkan isu lanjutan berupa isu carbon trade, ketahanan air, serta ketahanan pangan.

4.3 Isu Provinsi Lampung

Isu global maupun nasional, secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh terhadap perkembangan isu lokal di Provinsi Lampung. Isu lokal ini akan meliputi berbagai aspek kehidupan masyarakat Lampung, sehingga perlu dilakukan pemahaman secara tepat dan akurat semua isu yang berkembang agar dapat direncanakan antisipasi sekaligus solusi untuk menjaga keberlangsungan pembangunan di Provinsi Lampung. Berbagai isu lokal di Provinsi Lampung adalah sebagai berikut:

4.3.1 Isu Bidang Ekonomi :

1. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Lokal

Isu pertama pada bidang ekonomi adalah berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi lokal sehingga mampu meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat. Secara makro, pertumbuhan ekonomi akan terukur melalui laju pertumbuhan ekonomi daerah dan perkembangan PDRB. Sedangkan bagi pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi akan terukur melalui pertumbuhan daya beli masyarakat seperti terdapat pada komponen Indeks Pembangunan Masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi lokal harus mempunyai karakteristik yang sangat spesifik agar pertumbuhan tersebut kontinyu dan langgeng. Salah satu parameter spesifikasi lokal adalah adanya pertumbuhan ekonomi yang sesuai dengan potensi dan kondisi lahan setempat. Berdasarkan parameter ini, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung harus bertumpu dan didasarkan pada kegiatan agribisnis, sesuai dengan potensi Provinsi Lampung.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi lokal harus sesuai dengan kemampuan dan ketersediaan SDM yang terdapat di Provinsi Lampung, sehingga penduduk Provinsi Lampung akan mampu berperan aktif dan tidak akan menjadi penonton di rumah sendiri. Meskipun demikian, sebagai bagian dari NKRI, maka tidak tertutup kemungkinan adanya impor SDM yang benar-benar dibutuhkan. Hanya saja, SDM yang masuk ke Provinsi Lampung harus memberikan transfer of knowledge kepada penduduk Lampung, sehingga secara bertahap kemampuan dan skill penduduk Lampung akan meningkat seiring dengan perjalanan waktu.

Pertumbuhan ekonomi lokal yang dimaksudkan juga harus memiliki karakteristik yang berbasis pada ekonomi kerakyatan. Artinya pertumbuhan ekonomi yang diharapkan mesti bertumpu kepada perekonomian yang tumbuh dan berkembang secara nyata di tengah masyarakat, dan bukan bentuk perekonomian yang merupakan introduksi baru.

Karakteristik lain yang menjadi tantangan adalah bagaimana membangun perekonomian lokal yang mampu menghasilkan produk dengan nilai komparatif gain terhadap produk dari daerah lain, sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi nilai kompetitif lokal.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi yang dimaksudkan juga memerlukan dukungan pertumbuhan dan perkembangan industri lokal yang mampu mem- perkuat pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian produk yang dihasilkan bukan saja berupa produk setengah jadi, melainkan juga produk jadi.

Salah satu aspek penting berkaitan dengan tantangan dalam penumbuhan ekonomi lokal adalah bagaimana meningkatkan investasi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Dengan demikian tantangannya adalah bagaimana upaya yang dapat dilakukan agar tercipta iklim kondusif bagi munculnya investasi baru. Kondusivitas investasi dapat terukur mulai dari rencana, pengajuan ijin investasi, sampai dengan implementasi.

Selanjutnya, investasi yang dimaksudkan adalah investasi yang sesuai dan mendukung potensi daerah, sehingga investasi tersebut dapat menjadi lokomotif pergerakan perekonomian wilayah yang berbasis ekonomi kerakyatan. Investasi ini dapat berupa ekstensifikasi usaha ekonomi yang telah berkembang di masyarakat. Selain itu, investasi dapat juga berupa industrialisasi pada lini hulu dan hilir dari produk yang telah ada dan berkembang di masyarakat.

Pada sisi lain, simultan dengan karakteristik yang telah diungkapkan, maka investasi yang dimaksudkan adalah tidak bersifat kontra produktif terhadap ekonomi yang berbasis ekonomi kerakyatan. Dengan demikian investasi yang dikembangkan tidak mematikan ekonomi yang berbasis kerakyatan, melainkan justru akan mendukung dan memperkuatnya.

Aspek penting lain yang harus diperhatikan dalam pengembangan investasi di Provinsi Lampung adalah penyerapan tenaga kerja. Dengan demikian, investasi yang masuk diharapkan mampu menyerap tenaga kerja lokal. Efek lanjutan dari penyerapan tenaga kerja ini adalah adanya penurunan angka pengangguran, dan pada akhirnya memungkinkan terjadinya penurunan angka kemiskinan di Provinsi Lampung.

2. Mempertahankan Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan suatu kondisi atau keadaan yang meliputi kemampuan suatu wilayah untuk menyediakan pangan dengan jumlah, kualitas, waktu yang tepat, serta dengan harga terjangkau. Isu ketahanan pangan ini mempunyai arti sangat penting karena berkaitan secara langsung dengan hajat hidup masyarakat. Dengan demikian, isu ketahanan pangan telah berkembang menjadi isu strategis.

Kebutuhan primer pangan adalah berbagai sumber karbohidrat. Meskipun demikian, agar proses kehidupan manusia dapat berjalan dengan normal dan sempurna, maka kebutuhan pangan harus diikuti dengan pemenuhan akan kebutuhan protein. Selanjutnya akan diikuti dengan pemenuhan berbagai kebutuhan tambahan, seperti : vitamin dan feed additive.

Sementara itu, kondisi ketahanan pangan akan terkait dengan produksi dan produktivitas bahan pangan. Sedangkan produksi dan produktivitas bahan pangan akan terkait dengan aspek iklim; pengelolaan sumber daya air; input sarana produksi (bibit, pupuk, pakan, peralatan); serta berbagai aspek lain yang terkait dengan aspek agribisnis. Dengan demikian, Isu ketahanan pangan akan terkait dengan berbagai Isu lingkungan hidup yang lain, termasuk isu Global Warming dan Carbon Trade.

Isu ketahanan pangan pada dasarnya adalah tantangan dalam pembangunan pertanian secara luas, mulai dari aspek hulu sampai dengan aspek hilir. Tantangan terbesar adalah bagaimana upaya untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas per satuan luas lahan pada setiap komoditas bahan pangan. Hal ini perlu dilakukan mengingat perluasan lahan dan ekstensifikasi akan terkendala dengan keterbatasan lahan.

Keterbatasan lahan ini, baik dari segi kesesuaian lahan maupun dari segi peruntukan lahan, memunculkan tantangan mengenai perlu adanya jaminan bagi keberlangsungan swasembada pangan di Provinsi Lampung. Dengan demikian sudah saatnya untuk mempersiapkan regulasi mengenai lahan abadi pertanian.

Kendala pada ekstensifikasi juga menyebabkan penyediaan input menjadi faktor kunci dalam pengembangan agribisnis. Dalam hal penyediaan input, selain diperlukan

regulasi, maka juga diperlukan adanya koordinasi terus menerus pada semua stake holder terkait.

Masalah lain adalah bahwa ketahanan pangan tidak lagi dapat dipandang hanya bersumber dari bahan pangan beras. Hal ini dapat dipahami karena beras merupakan komoditas strategis, sehingga tekanan terhadap komoditas beras dari berbagai aspek semakin berat dari tahun ke tahun. Dengan demikian tantangan yang kemudian muncul adalah bagaimana Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mulai dapat mendorong penganekaragaman sumber bahan pangan, terutama bahan pangan non beras.

Pada sisi lain, cara pandang terhadap penyediaan komoditas bahan pangan dalam rangka ketahanan pangan juga perlu mengalami perubahan. Sebab, pada prinsipnya yang harus dibangun adalah peningkatan daya beli masyarakat, sehingga ketika daya beli meningkat, maka dengan sendirinya ketahanan pangan akan terbangun. Peningkatan daya beli masyarakat ini hanya mungkin dilakukan dengan pembangunan ekonomi secara keseluruhan, sehingga konsep dasar pembangunan ketahanan pangan adalah pembangunan ekonomi.

3. *Pengembangan Agro Industri*

Sesuai dengan potensi dasar bahwa Provinsi Lampung sebagai "Bumi Agribisnis", maka isu penting yang kedua adalah pengembangan Provinsi Lampung sebagai provinsi agro industri. Hal ini dilakukan guna mendukung perkuatan ketahanan pangan yang telah berkembang menjadi isu pertama, sekaligus merupakan pengembangan keunggulan potensi daerah.

Komoditas yang dikembangkan dalam agro industri adalah beberapa komoditas yang merupakan unggulan daerah dan dapat dikembangkan lebih lanjut ke arah produk industri. Dengan demikian produk akhir yang dipasarkan berupa produk setengah jadi atau produk jadi. Selain itu, produk yang dihasilkan merupakan sebuah produk yang dapat berkembang menjadi trade mark Provinsi Lampung. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung produk yang dihasilkan mempunyai nilai komparatif terhadap produk dari luar daerah.

Pada bidang perikanan komoditas yang dapat dikembangkan adalah produk ikan laut; pada bidang peternakan adalah sapi potong dan ayam potong. Pada bidang perkebunan adalah: tebu, sawit, karet, singkong, dan nanas. Sedangkan produk bidang tanaman pangan adalah jagung dan hortikultura.

Kata kunci bagi pengembangan isu agro industri adalah nilai ekonomis, kualitas produk, dan berbasis ekonomi kerakyatan. Ketiga kata kunci ini menjadi aspek pembeda

dengan isu ketahanan pangan yang lebih merupakan pengembangan komoditas strategis untuk memenuhi hajat hidup orang banyak.

Parameter nilai ekonomis akan terkait dengan berbagai aspek lain, seperti : iklim investasi, pertumbuhan ekonomi, efisiensi proses, penyerapan tenaga kerja lokal, pemasaran, serta penggunaan input berupa potensi dan keunggulan daerah. Sedangkan kualitas produk akan terkait dengan standar kualitas sesuai dengan target pasar nasional yang sesuai dengan situasi krisis.

Produk agro industri yang dihasilkan juga harus bertumpu kepada usaha agribisnis yang berbasiskan perekonomian rakyat. Dengan demikian produk tersebut akan mempunyai nilai kompetitif gain terhadap produk lain dari dalam daerah. Hal ini penting diupayakan, mengingat semakin besar nilai kompetitif gain sebuah produk akan menimbulkan implikasi profit yang secara ekonomis lebih besar. Akumulasi dari nilai kompetitif ini secara meluas akan menimbulkan terjadinya pertumbuhan ekonomi lokal.

Selanjutnya, dalam pengembangan isu agro industri perlu diupayakan keseimbangan antara peningkatan produksi di satu sisi, namun pada sisi lain proses produksi masih mampu didukung oleh sumber daya alam yang tersedia. Artinya, proses produksi tersebut tidak justru menguras sumber daya alam. Konsep ini dikenal dengan konsep pertanian berkelanjutan.

4. *Penciptaan Lapangan Kerja*

Data komposisi penduduk yang disajikan memperlihatkan bahwa 64,5% merupakan angkatan kerja. Sedangkan angka pengangguran untuk angkatan kerja mencapai 6,2%. Pada sisi lain, data Angka Beban Tanggungan (Dependency Ratio) mencapai 55%, sehingga beban penduduk usia produktif Provinsi Lampung cukup banyak. Data yang diungkapkan mempunyai arti bahwa penciptaan lapangan kerja menjadi isu penting yang harus dengan segera diatasi. Sebab, jika persoalan penciptaan kerja ini tidak ditangani dengan seksama, maka dikhawatirkan akan memunculkan dampak lanjutan, yang imbasnya menjadi lebih sulit untuk diprediksikan.

Pada sisi lain, penciptaan lapangan kerja bukan hanya persoalan ekonomi yang berdiri sendiri, namun terkait erat dengan berbagai upaya pembangunan ekonomi lain, seperti: peningkatan peluang investasi, penegakan hukum, dunia perbankan, peningkatan kualitas SDM, serta lingkungan hidup.

Kondisi yang telah dikemukakan menunjukkan bahwa penciptaan lapangan kerja merupakan tantangan yang tidak serta merta menjadi parameter aspek ekonomi saja.

Penciptaan lapangan kerja dengan demikian merupakan resultante dari berbagai aspek lain yang secara langsung maupun tidak langsung terkait dengan aspek ekonomi.

Selanjutnya, tantangan dalam pembangunan ekonomi guna penciptaan lapangan kerja adalah bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal, baik berupa potensi lahan maupun potensi produksi. Potensi lahan pada umumnya berupa lahan pertanian. Selain itu potensi produksi seperti tergambar pada struktur perekonomian pada PDRB, menunjukkan bahwa pertanian merupakan pendukung utama perekonomian di Provinsi Lampung. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa secara umum potensi lokal adalah bidang pertanian, sehingga perekonomian yang akan dibangun adalah ekonomi berbasis pertanian.

Pembangunan ekonomi Provinsi Lampung diharapkan mampu melibatkan lebih banyak masyarakat, sehingga diperlukan model pembangunan ekonomi yang berbasis kerakyatan. Model pendekatan yang mampu mengadopsi konsep ekonomi kerakyatan tersebut adalah konsep Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Sementara itu, pengembangan UMKM adalah terkait dengan perbankan. Artinya, pada satu sisi dunia perbankan harus mampu mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM, namun pada sisi lain harus terdapat jaminan kelangsungan dunia perbankan melalui penerapan aturan baku perbankan.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja secara langsung jelas memerlukan adanya investasi baru, terutama yang bersifat *direct investment*. Dengan masuknya investasi, maka akan terbuka lapangan kerja baru. Dengan demikian diperlukan adanya suatu prakondisi yang mampu merangsang iklim investasi. Prakondisi tersebut antara lain meliputi penyiapan dan peningkatan kualitas berbagai aspek yang pada umumnya justru berada di luar ranah ekonomi, seperti: penegakan hukum, kepastian lahan, dan penyediaan SDM.

Investasi baru yang diharapkan, baik dalam skala menengah maupun skala besar, harus tetap dalam koridor kesesuaian lahan dan potensi wilayah. Dengan demikian investasi diharapkan muncul dalam bidang pertanian dalam arti luas, perdagangan, dan energi terbarukan.

Selain berkaitan dengan kesesuaian lahan, investasi baru tersebut harus mampu menyerap tenaga kerja sesuai dengan ketrampilan yang dimiliki oleh penduduk Lampung. Artinya jangan sampai terjadi investasi baru di Provinsi Lampung namun menggunakan tenaga kerja trampil dari luar Provinsi Lampung. Pada sisi lain, hal ini juga menjadi tantangan bagi Pemerintah Provinsi Lampung untuk bagaimana meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu mengimbangi kebutuhan dunia kerja.

Tantangan lain dalam penciptaan tenaga kerja adalah bagaimana proses dalam pembangunan ekonomi tetap berjalan, namun pada saat yang sama, kegiatan dan proses produksi dalam rangka penciptaan tenaga kerja tersebut tetap mampu melestarikan kondisi lingkungan hidup. Hal ini terutama dengan upaya untuk tetap menjaga dari adanya pencemaran lingkungan dan mempertahankan *cachtment area*.

5. Optimalisasi Hasil Bagi Migas

Provinsi Lampung memiliki beberapa daerah yang mempunyai potensi tambang migas. Bahkan pada beberapa lokasi, tambang tersebut telah berhasil dieksploitasi. Sementara itu, peraturan perundangan menyebutkan bahwa daerah memiliki hak untuk ikut mengelola dan memperoleh hasil 10% (sepuluh persen) dari total penambangan migas. Berkaitan dengan hal ini, maka muncul isu mengenai perlunya optimalisasi hasil bagi tambang migas. Hasil bagi migas ini akan dapat dipergunakan sebagai PAD dan pada akhirnya dapat dipergunakan untuk pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan yang memerlukan perhatian adalah bentuk peran serta Provinsi Lampung dalam optimalisasi hasil bagi migas tersebut. Masalah ini memunculkan berbagai alternatif bentuk kerja sama dengan pihak penambang, sehingga perlu dilakukan pengaturan sedemikian rupa sehingga menghasilkan *win-win solution*.

4.3.2 Isu Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan

1. Penurunan Jumlah Penduduk Miskin

Data memperlihatkan bahwa pada tahun 2006 di Provinsi Lampung terdapat 785.041 RTM. Jika keluarga di Provinsi Lampung mencapai mencapai 1.840.931 KK, maka penduduk miskin tersebut secara statistik mencapai 42,6% dari total KK yang ada di Provinsi Lampung. Penduduk miskin tersebut pada umumnya berada dan tinggal di daerah Desa Tertinggal (DT). Secara keseluruhan DT di Provinsi Lampung mencapai 765 desa.

Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang multifaset dan multidimensi, sehingga penanganan kemiskinan tidak akan mungkin diselesaikan oleh satu pihak. Dengan demikian sinergi dari semua stake holder merupakan kata kunci yang harus diterapkan pada semua lini.

Faktor penting yang menjadi perhatian adalah bahwa kemiskinan bukan saja berpengaruh secara langsung terhadap kualitas kehidupan penduduk, namun juga memberikan implikasi ikutan yang merupakan side effect dari kondisi kemiskinan yang sedang berlangsung. Side effect tersebut antara lain berupa gangguan keamanan,

peningkatan prostitusi, peningkatan jumlah tenaga kerja anak dan jumlah anak jalanan, peningkatan angka drop out sekolah, kerusakan lingkungan hidup, serta berbagai masalah ikutan, baik secara sosial, hukum, maupun secara politis.

Sebagai sebuah masalah multifaset, maka pendekatan masalah kemiskinan harus dilakukan dari semua sektor dan semua lini, baik dari aspek ekonomi aspek politik, maupun hukum, serta dilakukan secara serempak dan berkesinambungan. Dengan demikian pendekatan melalui satu sisi, dari aspek ekonomi saja misalnya, secara keseluruhan akan memberikan akibat yang kontra produktif bagi kinerja pembangunan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Penanganan terhadap masalah kemiskinan dapat dihadapi secara langsung maupun tidak langsung. Pengentasan kemiskinan secara tidak langsung dimulai dengan berbagai program pembangunan ekonomi, seperti melalui pembukaan investasi baru, terutama yang berupa direct investment. Dengan berjalannya ekonomi, maka akan dibutuhkan tenaga kerja baru, sehingga pengangguran akan dapat dikurangi dan pada akhirnya ekonomi akan bertumbuh.

Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi tersebut akan menyebabkan terjadinya pertumbuhan lanjutan secara multiplier effect, termasuk peningkatan daya beli masyarakat. Pembangunan ekonomi tersebut akan melibatkan semua aspek kehidupan, termasuk upaya pengentasan kemiskinan, sehingga pembangunan ekonomi pada dasarnya merupakan pembangunan daerah secara menyeluruh.

Sementara itu, pengentasan kemiskinan secara langsung dilakukan dengan membantu Rumah Tangga Miskin (RTM) dan/atau Desa Tertinggal (DT) secara langsung. Program ini dilakukan pada RTM dan/atau DT yang benar-benar sudah sangat membutuhkan bantuan, sehingga harus sangat selektif. Pada tahun 2007 Pemerintah Daerah Provinsi Lampung melalui berbagai program khusus, telah ditangani sebanyak 200 DT, sedangkan pada tahun 2008 dan 2009 masing-masing akan ditangani 300 dan 265 DT.

Pada masa mendatang, berbagai program penurunan jumlah penduduk miskin harus tetap dilanjutkan. Peningkatan perlu dilakukan, terutama dari aspek stake holder yang terlibat, sektor dan aspek yang ditangani, maupun kualitas dan kuantitas program yang akan diimplementasikan.

2. *Pengendalian Pertumbuhan Penduduk*

Seluruh upaya pembangunan dan pelayanan masyarakat yang dilakukan di Provinsi Lampung dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan melayani kebutuhan penduduk. Semakin besar jumlah penduduk, maka akan semakin besar juga beban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah Provinsi Lampung, sehingga semua persoalan yang berkembang di masyarakat pada dasarnya terjadi karena adanya peningkatan jumlah penduduk.

Berdasarkan hal yang telah dikemukakan, maka perkembangan jumlah penduduk akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat. Dengan demikian pengendalian jumlah penduduk menjadi faktor sangat penting dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat dan peningkatan pelayanan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.

Pengendalian jumlah penduduk memerlukan dukungan dan partisipasi aktif dari masyarakat secara keseluruhan. Pada sisi lain, pengendalian jumlah penduduk memerlukan revitalisasi dari institusi Badan Koordinasi Kependudukan Nasional di Provinsi Lampung, sehingga fungsi koordinasi serta penyediaan SDM dan sarana prasarana dalam pengendalian jumlah penduduk menjadi lebih tertata.

3. *Peningkatan Kualitas Pendidikan*

Sumber daya manusia (SDM) dalam konteks pembangunan merupakan subjek sekaligus objek pembangunan. Dengan demikian isu peningkatan SDM melalui peningkatan pendidikan mempunyai peran sentral dalam pembangunan. Peran SDM ini semakin jelas ketika kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang sangat berpengaruh dalam program pengurangan kemiskinan dan pengangguran, peningkatan investasi, serta berbagai program lain. Berkaitan dengan peningkatan kualitas SDM, maka pendidikan sebagai dasar bagi pengembangan SDM menjadi faktor kunci dalam pembangunan.

Masalah yang muncul dari bidang pendidikan adalah sarana dan prasarana pendidikan yang belum merata sehingga kualitas pendidikan di Provinsi Lampung menjadi tidak merata. Sarana dan prasarana tersebut selain berupa fisik, seperti: bangunan sekolah, buku, dan laboratorium; juga berupa non fisik, seperti: tenaga kependidikan, kurikulum, dan teknik kependidikan.

Ketidakmerataan kualitas pendidikan tersebut terutama terjadi pada daerah terpencil dan daerah yang merupakan kantong kemiskinan. Pada sisi lain, tenaga kependidikan yang merupakan lulusan perguruan tinggi sebagian besar menumpuk di daerah perkotaan. Dengan demikian, tantangan yang muncul adalah bagaimana

memberikan rangsangan bagi lulusan tenaga kependidikan untuk bersedia bekerja di daerah terpencil.

Masalah lain adalah bagaimana menambahkan kurikulum yang mampu memberikan "life skill" kepada peserta didik. Dengan demikian diharapkan lulusan pendidikan di Provinsi Lampung tidak selalu terjebak menjadi barisan pencari kerja dan akan mampu mandiri, sehingga secara tidak langsung akan mampu menurunkan angka pencari kerja.

Selain itu juga perlu dikembangkan materi pendidikan yang mampu mengadopsi "local wisdom". Diharapkan dengan adopsi ini maka lulusan pendidikan di Provinsi Lampung akan mampu hidup mandiri dengan mempergunakan semua kelebihan dan potensi yang dimiliki oleh Provinsi Lampung sendiri.

Berkaitan dengan era globalisasi, maka tidak tertutup kemungkinan pergerakan masyarakat antarwilayah, bahkan antarnegara, secara sangat cepat. Kondisi ini memerlukan SDM dengan kualitas berstandar internasional. Dengan demikian diperlukan adanya suatu institusi pendidikan berstandar internasional, sehingga mampu mempersiapkan SDM dalam menghadapi tantangan global.

Era globalisasi juga memerlukan SDM dengan kemampuan spesifik dan khusus pada bidang tertentu. Dengan demikian, model pendidikan yang dikembangkan, selain berstandar internasional juga mempunyai karakteristik khusus atau bersifat kejuruan.

4. Peningkatan Kualitas Kesehatan

Isu utama pada bidang kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang terjangkau dan cepat, terutama kepada masyarakat miskin. Selain itu juga bagaimana jangkauan pelayanan kesehatan tersebut dapat merata ke seluruh pelosok dan daerah terpencil. Dengan demikian perlu dikembangkan sarana dan prasarana kesehatan di masyarakat. Sarana dan prasarana tersebut minimal berupa Puskesmas Pembantu; adanya Mantri Kesehatan yang ditempatkan di perdesaan; ataupun peningkatan operasionalisasi Puskesmas Keliling.

Selain itu, juga perlu dikembangkan berbagai upaya guna mempermudah perolehan layanan kesehatan dan obat yang terjangkau, terutama untuk kalangan penduduk miskin. Salah satu konsep yang dapat dikembangkan adalah perluasan peserta Asuransi Kesehatan hingga dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.

Masalah pada bidang kesehatan juga meliputi upaya pencegahan dari penyebaran dan penyalahgunaan NAPZA serta berbagai penyakit menular seperti HIV/AIDS. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat posisi Provinsi Lampung yang tepat berada

di persimpangan antara pulau Jawa dan Sumatra, sehingga mobilitas barang dan manusia sebagai vektor penyakit menjadi sangat tinggi.

5. *Penanganan Dampak Krisis Global*

Krisis global yang terjadi pada tahun 2008 tidak pernah diprediksikan oleh siapapun dan imbas dari krisis tersebut telah melanda ke seluruh dunia. Dampak yang kemudian muncul adalah timbulnya kelesuan ekonomi, yang berujung pada pemutusan hubungan kerja di berbagai sektor industri.

Dampak krisis global ini akan mulai terlihat pada awal tahun 2009 dan diperkirakan akan berlangsung selama 3-4 tahun ke depan. Akibatnya, RPJMD II Provinsi Lampung akan melalui suatu periode yang merupakan efek dari sebuah krisis global. Berkaitan dengan hal ini, maka isu penanganan dampak krisis global mau tidak mau telah berkembang menjadi isu lokal.

Implikasi dari adanya krisis global adalah terjadinya berbagai pemutusan hubungan kerja, sehingga akan menghasilkan pengangguran baru. Di Indonesia diperkirakan akan muncul lebih dari 1 juta orang penganggur baru. Penganggur baru ini secara langsung akan menambah beban bagi pemerintah yang telah cukup banyak memiliki beban tanggungan penganggur.

Peningkatan jumlah penganggur ini memerlukan antisipasi, solusi, dan perencanaan program penanganan yang lebih baik agar tidak memunculkan berbagai dampak ikutan sebagai akibat adanya peningkatan jumlah penganggur. Berkaitan dengan hal ini maka perlu dikembangkan berbagai program yang berorientasi ke rakyat kecil dan mampu menyerap banyak tenaga kerja.

Efek lain dari terjadinya krisis global adalah terhentinya pasar ekspor. Hal ini berarti bahwa berbagai komoditas dari Provinsi Lampung yang berorientasi ekspor akan mengalami hambatan dan kemunduran. Dengan demikian tidak ada pilihan lain kecuali mengembangkan pasar domestik dengan skala nasional.

6. *Peningkatan Budaya Daerah dan Pariwisata*

Salah satu isu global penting saat ini adalah Revolusi 3T. Isu ini mengakibatkan adanya mobilitas manusia yang sangat cepat dan tidak terbatas. Salah satu akibat positif yang terjadi adalah berkembangnya industri pariwisata di seluruh dunia. Berkaitan dengan isu global yang telah mengakibatkan berkembangnya industri pariwisata di atas, maka Provinsi Lampung harus memposisikan diri untuk mengambil peran dan kesempatan, sehingga dapat memperoleh benefit guna meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Peningkatan peran dalam pengembangan industri pariwisata ini dimungkinkan karena secara alami Provinsi Lampung memiliki SDA yang layak untuk dikembangkan sebagai sebuah industri pariwisata. Sementara itu, pengembangan pariwisata tidak dapat dilepaskan dari pengembangan budaya daerah. Dengan demikian, kedua kepentingan ini, telah melahirkan isu berupa pentingnya pengembangan budaya daerah dan pariwisata.

Barangkali masalah yang memerlukan pertimbangan dan perhatian adalah upaya untuk menjaga supaya pengembangan pariwisata dan budaya tidak menjadi bumerang yang justru mengakibatkan degradasi budaya lokal. Berkaitan dengan hal ini, maka diperlukan adanya suatu kearifan sehingga pengembangan pariwisata justru akan mengembangkan dan memperkuat budaya lokal.

4.3.3 Isu Bidang Infrastruktur

1. Pengembangan Infrastruktur

Isu infrastruktur seperti diketahui mempunyai peran sangat penting dalam proses pengembangan ekonomi pada suatu wilayah. Hal ini dimungkinkan karena infrastruktur merupakan pendorong, pendukung, sekaligus pemacu bagi tumbuhnya berbagai kegiatan ekonomi.

Peran infrastruktur sebagai pendorong perkembangan ekonomi adalah pada saat suatu wilayah belum berkembang atau terisolasi. Sementara peran pendukung, dimiliki pada saat suatu wilayah telah terdapat kegiatan ekonomi, sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih lanjut. Sedangkan bila ekonomi pada suatu wilayah telah berkembang baik, maka pembangunan infrastruktur akan berperan untuk memacu pertumbuhan ekonomi lebih lanjut.

Satu aspek penting adalah bahwa infrastruktur tidak dapat dipahami secara sempit, yakni hanya meliputi: jalan, jembatan, pelabuhan, dan sarana pengairan, namun infrastruktur mesti dipahami dalam konteks lebih luas. Dengan demikian termasuk dalam cakupan infrastruktur ini akan meliputi: pengembangan teknologi informasi, pembangunan gedung, pengadaan sarana transportasi, serta pembangunan berbagai sarana lain, baik berupa fisik maupun non fisik, yang berperan dalam mendukung berbagai kegiatan ekonomi.

Tantangan utama dalam implementasi isu pengembangan infrastruktur adalah bagaimana format pembangunan infrastruktur mampu secara mantap dan konsisten mendukung perkembangan ekonomi lokal secara keseluruhan. Dengan demikian,

pembangunan infrastruktur diharapkan mampu menjangkau seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil, agar memungkinkan terjadinya penyebaran dan pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya inherent dengan penyebaran pembangunan infrastruktur, maka tantangan lain adalah bagaimana pembangunan infrastruktur tersebut dirancang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat, baik dalam rangka pengembangan ekonomi maupun sosial. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur akan mampu meningkatkan kapasitas dan ekonomi masyarakat.

Tantangan selanjutnya yang sangat menarik adalah bagaimana upaya pembangunan infrastruktur mempunyai kerangka berpikir yang bersifat long term, berkesinambungan, dan mempunyai visi yang jauh ke masa depan; sehingga tidak akan terjadi pembangunan infrastruktur yang tambal sulam dan tidak well program. Dengan demikian sangat dimungkinkan untuk mulai merancang dan membangun infrastruktur yang bersifat fungsional sekaligus monumental.

Berbagai infrastruktur visioner, fungsional, sekaligus monumental yang mulai dapat dikembangkan antara lain: Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatera (IPJS); Jalan Toll Bakaheuni-Terbanggi Besar, Pelabuhan Internasional Panjang; Bandara Inten II, Kota Baru Lampung; serta pengembangan jalur akses utama utara-selatan.

Sementara itu, seperti diketahui anggaran Pemda Provinsi Lampung mempunyai berbagai keterbatasan. Kondisi ini akan memunculkan tantangan dalam hal pendanaan program pembangunan infrastruktur. Sehingga, perlu dikembangkan alternatif pendanaan, seperti : merancang skala prioritas; merancang kerja sama dengan pihak di luar Pemda untuk membiayai pembangunan infrastruktur; atau merancang kombinasi kedua desain secara akurat dan konsisten.

2. Adaptasi dan Mitigasi Bencana

Provinsi Lampung secara “given” berada pada daerah rawan bencana alam, sehingga isu mitigasi bencana menjadi suatu keniscayaan. Kondisi ini mengharuskan Pemda Provinsi Lampung untuk mampu secara komprehensif mempersiapkan diri guna mengantisipasi semua aspek yang terkait dengan bencana alam. Jadi, meski bencana alam tidak dapat diramalkan kapan akan terjadi, namun paling tidak dapat diminimalkan resiko dan akibat susulan yang terjadi pasca bencana. Dengan demikian sangat diperlukan adanya suatu konsep mitigasi bencana yang jelas.

Mitigasi bencana harus meliputi suatu konsep yang menyeluruh, komprehensif, dan mendasar; serta akan menyangkut aspek hard ware maupun soft ware dalam penanganan bencana. Aspek hard ware akan terkait dengan penyediaan semua peralatan, fasilitas,

serta sarana dan prasarana pendukung dalam penanganan bencana, termasuk aspek pendanaan. Sedangkan aspek soft ware akan terkait dengan konsep, strategi, manajemen, dan kemampuan SDM dalam penanganan bencana.

Konsep mitigasi bencana juga harus melibatkan partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat sangat diperlukan mengingat masyarakat merupakan komponen yang terlibat secara langsung sebagai obyek dan sekaligus subyek dalam mitigasi bencana. Dengan demikian pendampingan masyarakat akan situasi riil yang terkait dengan posisi Provinsi Lampung yang tepat berada di daerah rawan bencana menjadi keharusan yang tidak dapat dinafikkan.

Mitigasi bencana tidak saja terkait dengan kejadian bencana alam, namun juga menyangkut semua bencana yang berpengaruh dan berdampak besar terhadap kehidupan masyarakat. Dengan demikian, termasuk dalam konsep ini adalah bagaimana mengantisipasi dan menangani bencana yang disebabkan oleh kejadian berbagai penyakit menular dan berdampak luas, seperti penyakit HIV/AIDS dan Flu Burung.

4.3.4 Isu Bidang Tata Ruang dan Pertanian

1. Pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB)

UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memungkinkan setiap daerah untuk melakukan pengelolaan dan pengaturan daerahnya sendiri. Dalam hal ini termasuk pengembangan daerah dalam pengertian untuk melaksanakan pemekaran wilayah sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah.

Pada satu sisi, setiap daerah sesuai dengan UU, mempunyai kewenangan untuk memekarkan daerahnya sesuai dengan kepentingan dan kebutuhannya. Namun pada sisi lain, pemekaran tersebut mempunyai berbagai implikasi, baik secara politis, ekonomis, maupun kesejahteraan masyarakat. Sehingga pemekaran wilayah jika tidak dikelola dengan baik justru akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang berada di daerah yang telah dimekarkan.

Berkaitan kontradiksi ini maka muncul isu pentingnya pengelolaan dan penanganan pemekaran wilayah dengan cermat dan terprogram. Kebutuhan ini menunjukkan bahwa pemekaran wilayah harus berada pada suatu kondisi keseimbangan optimal antara kebutuhan wilayah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, sehingga pada tahap selanjutnya fokus kegiatan lebih diarahkan kepada konteks pengembangan Daerah Otonomi Baru (DOB).

2. *Optimalisasi Keunggulan Wilayah*

Perubahan paradigma pembangunan yang lebih bertumpu pada aspek kewilayahan memungkinkan Provinsi Lampung untuk dapat berperan lebih baik. Posisi Provinsi Lampung yang berada di ujung selatan Pulau Sumatra mempunyai beberapa keunggulan yang dapat dioptimalkan karena menjadi titik penghubung antara Pulau Sumatera dengan Pulau Jawa. Posisi wilayah Provinsi Lampung memungkinkan untuk menjadi titik tumpu dari 8 provinsi yang berada di Pulau Sumatra sebelum mencapai Pulau Jawa. Sebaliknya, posisi ini juga menjadi titik masuk dari 6 provinsi di Pulau Jawa sebelum masuk ke Pulau Sumatra.

Posisi geografis Provinsi Lampung dengan demikian menjadi sangat strategis dan secara langsung membentuk suatu keunggulan wilayah. Berkaitan dengan posisi geografis ini, maka muncul isu tentang pentingnya optimalisasi keunggulan wilayah yang secara geografis dimiliki oleh Provinsi Lampung.

Keunggulan wilayah ini juga telah diamati oleh Pemerintah Pusat, sehingga muncul beberapa program berskala nasional di Provinsi Lampung. Beberapa program nasional yang memanfaatkan keunggulan wilayah Provinsi Lampung antara lain: pembangunan Infrastruktur Penghubung Jawa-Sumatra (IPJS); Pelabuhan Internasional di Panjang; jalan toll; serta pembukaan jalur utara-selatan di kawasan bagian timur Provinsi Lampung.

3. *Pengembangan Kawasan Strategis*

Undang Undang No. 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Undang Undang No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, serta Undang Undang No 32 tahun 2004 telah mengamatkan kewenangan pelaksanaan pembangunan, termasuk perencanaan tata ruang kepada setiap daerah.

Provinsi Lampung telah menyusun tata ruang dalam bentuk Rencana Struktur Tata Ruang (RSTR) Provinsi Lampung yang kemudian pada tahun 1998 telah direvisi menjadi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi (RTRWP). RTRW tersebut selanjutnya mendapatkan legal aspect dengan ditetapkannya Perda No 5 Tahun 2001 tentang Penataan Ruang Wilayah Provinsi tahun 2001-2015.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah merevisi kembali RTRW Provinsi Lampung sejak TA 2006 dan telah difinalisasi pada tahun 2009. Dengan demikian, RTRW Provinsi Lampung yang telah direvisi akan digunakan sebagai acuan untuk RPJM 2011-2015.

RTRWP ini merupakan penjabaran dari strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka meningkatkan keseimbangan dan keserasian perkembangan antarwilayah serta keserasian antarsektor agar dapat berkelanjutan. RTRW Provinsi

Lampung sendiri berfungsi sebagai penyalaras kebijakan penataan ruang nasional, provinsi, dan kabupaten di dalam provinsi sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah, khususnya yang berkaitan dengan struktur dan pola tata ruang wilayah.

Dengan adanya RTRWP yang telah direvisi dan menjadi salah satu dasar bagi penyusunan RPJMD II, maka telah memunculkan isu mengenai pentingnya pengembangan berbagai kawasan strategis. Berdasarkan RTRWP yang telah direvisi maka dapat dikembangkan berbagai kawasan strategis untuk tujuan tertentu. Dengan adanya perencanaan tata ruang untuk kawasan strategis untuk tujuan tertentu yang baik akan mampu mengakomodasi dan memungkinkan untuk mengendalikan berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi di Provinsi Lampung secara terpadu dan serasi.

4.3.5 Isu Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan

1. Konservasi Lingkungan dan SDA

Isu kerusakan lingkungan dan SDA telah menjadi topik yang berkembang selama dekade terakhir. Isu ini menjadi sangat penting mengingat lingkungan dan SDA merupakan daya dukung utama bagi keberlangsungan kehidupan manusia secara normal. Isu kerusakan lingkungan dan SDA juga telah memunculkan permasalahan lanjutan berupa: pengamanan dan pelestarian hutan, peningkatan lahan kritis, pencemaran, bencana banjir, ataupun kekeringan.

Isu kerusakan lingkungan dan SDA tidak hanya menyangkut kerusakan hutan semata, namun juga melibatkan kerusakan ekosistem secara lebih luas. Kerusakan lingkungan tidak terbatas pada wilayah maupun matra, sehingga kerusakan lingkungan dapat terjadi di berbagai lini kehidupan.

Kerusakan lingkungan akan menyebabkan terjadinya ketidaknormalan kehidupan manusia secara umum. Hal ini antara lain terlihat dari terjadinya penurunan produktivitas dalam bidang pertanian dalam arti luas, sehingga akan mempengaruhi ketersediaan pangan. Penurunan produktivitas juga dapat terjadi pada manusia sendiri sebagai akibat adanya penurunan tingkat kenyamanan lingkungan tempat manusia hidup.

Berkaitan dengan hal ini maka pengelolaan lingkungan saat ini tidak lagi hanya berorientasi pada produk semata, namun juga harus memperhatikan masyarakat yang berusaha dan berada di sekitar/dalam lingkungan, sehingga diperlukan pelibatan secara aktif masyarakat yang berada di lingkungan tersebut.

2. *Antisipasi Krisis Air*

Isu krisis air bermula dari kondisi hutan di Provinsi Lampung sudah sangat memprihatinkan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Penurunan luas kawasan hutan cukup cepat dan signifikan. Tingkat kerusakan cukup berat, yakni mencapai $\pm 65\%$, sehingga pada saat ini luas kawasan hutan di Provinsi Lampung hanya tinggal $\pm 30\%$ dari luas daratan Provinsi Lampung. Kenyataan ini telah memunculkan pentingnya isu kerusakan lingkungan dan SDA.

Meskipun secara status hukum kawasan hutan Lampung masih cukup luas, namun adanya kerusakan menyebabkan fungsi hutan secara ekologis tidak dapat berjalan secara optimal. Hal tersebut terbukti dengan semakin luasnya lahan kritis, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan. Pada saat ini diperkirakan luas lahan kritis Provinsi Lampung 768.284,94 Ha.

Fungsi hutan secara ekologis yang sangat vital adalah sebagai catchment area, yakni sebagai daerah resapan air. Sementara itu, peningkatan lahan kritis akan menyebabkan daya ikat tanah terhadap aliran air akan semakin rendah. Dengan demikian, kerusakan hutan telah memunculkan isu krisis air.

Krisis air ini menjadi isu penting yang harus ditangani, mengingat perekonomian di Provinsi Lampung sangat bertumpu pada pertanian dan agribisnis. Ancaman Isu krisis air ini secara langsung akan sangat mempengaruhi keberlangsungan kegiatan pertanian dan agribisnis di Provinsi Lampung. Hal ini berarti krisis air telah menjadi isu yang berpengaruh besar terhadap kehidupan penduduk di Provinsi Lampung.

3. *Antisipasi Global Warming*

Global Warming telah berkembang menjadi isu dunia. Isu ini berkembang sedemikian cepat dan menyebar ke seluruh dunia karena pengaruhnya yang sedemikian besar terhadap kehidupan manusia. Global Warming telah memungkinkan terjadinya perubahan iklim global, dan perubahan iklim ini akan sangat berpengaruh terhadap kegiatan pertanian dan agribisnis secara keseluruhan.

Pada saat ini Provinsi Lampung telah mencanangkan diri sebagai provinsi agribisnis, sehingga berbagai isu yang mempengaruhi kegiatan pertanian dan agribisnis secara langsung juga akan mempengaruhi kehidupan masyarakat di Provinsi Lampung. Dengan demikian, mau tidak mau, isu Global Warming juga telah berkembang menjadi isu lokal.

Berkaitan dengan isu Global Warming, maka Provinsi Lampung harus mampu mengoptimalkan potensi SDA dan lingkungan hidup yang tersedia guna meningkatkan posisi

tawar. Selanjutnya posisi tawar ini dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Posisi tawar ini dimungkinkan melalui pengembangan hutan sebagai bahan dalam carbon trade.

Pada sisi lain, isu Global Warming juga mengharuskan pengelolaan sumber daya air dengan cermat dan bijak. Hal ini perlu dilakukan mengingat Global Warming memungkinkan terjadinya banjir dan kekeringan dalam kondisi kontras, ekstrim, dan tidak terprediksi.

4. *Pengembangan Energi Terbarukan*

Bahan bakar karbon mempunyai batas jumlah yang dapat ditambang, sehingga hanya soal waktu bahan bakar karbon tersebut menjadi habis. Fakta ini memunculkan isu mengenai pentingnya pengembangan berbagai sumber energi alternatif dan terbarukan. Selain itu, menjadi sangat penting untuk melakukan penghematan penggunaan bahan bakar yang bersumber dari karbon.

Penghematan energi dapat dilakukan antara lain melalui pengalihan bahan bakar minyak (BBM) dengan gas. Meskipun demikian, konsep ini masih terkendala dengan mekanisme dan penyediaan sarana prasarana pengalihan bahan bakar. Salah satu penyebabnya adalah belum siapnya sarana pendukung seperti tabung gas. Selain itu masyarakat secara psikologis juga belum siap karena kurangnya sosialisasi tentang penghematan energi.

Masalah dalam isu pengembangan energi alternatif adalah bagaimana mengupayakan penyediaan bio fuel sebagai substitusi untuk bahan bakar karbon secara efisien dan murah. Hal ini perlu dilakukan mengingat meskipun Provinsi Lampung menyediakan bahan dasar bagi pengembangan bio fuel seperti singkong, tebu, dan sawit dalam jumlah melimpah, namun masih terdapat masalah berkaitan dengan efisiensi ekonomis. Selain itu masih diperlukan adanya investor untuk dapat menanamkan modalnya bagi pengembangan bio fuel di Provinsi Lampung.

Hal lain yang memerlukan perhatian adalah bagaimana menjaga titik keseimbangan antara penyediaan bahan mentah untuk kebutuhan bio fuel dengan untuk kebutuhan konsumsi. Dengan demikian harus terdapat blocking wilayah tanam dan pengaturan sumber bahan mentah sehingga tidak terjadi kerawanan pangan sebagai akibat pengalihan bahan pangan menjadi energi.

Energi alternatif terbarukan juga sangat dimungkinkan dari eksploitasi terhadap energi yang berasal dari panas bumi. Provinsi Lampung memiliki cadangan energi panas bumi yang sudah menjadi perhatian nasional, yakni di Suoh, Kabupaten Lampung Barat.

Dengan adanya potensi bahan dasar bio fuel yang melimpah dan cadangan panas bumi yang dimiliki, maka terbuka kemungkinan untuk mengembangkan Provinsi Lampung sebagai lumbung energi alternatif terbarukan. Dengan demikian dimungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk Pemerintah Pusat, guna mengoptimalkan berbagai sumber energi alternatif terbarukan, baik untuk memenuhi kebutuhan lokal maupun nasional.

4.3.6 Isu Bidang Politik dan Keamanan

1. Peningkatan Sinkronisasi dan Koordinasi Pembangunan

Desentralisasi sebagai implementasi UU Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan di Daerah, telah memberikan kesempatan bagi daerah untuk mengatur dan mengendalikan rumah tangganya sendiri. Meskipun demikian, pelaksanaan konsep desentralisasi ini belum berjalan dengan optimal.

Banyak faktor yang menjadi penyebab ketidakefektifan konsep desentralisasi ini. Salah satu penyebab utama adalah belum dipahaminya jiwa dari UU tersebut secara utuh. Selain itu, penerbitan UU tersebut belum diikuti dan ditindaklanjuti dengan penerbitan pedoman petunjuk pelaksanaan.

Persoalan juga muncul ketika persepsi mengenai UU Nomor 32 tahun 2004 antara stakeholder masih belum sama. Perbedaan persepsi bukan hanya muncul antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, namun juga terjadi antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Ketidaksamaan persepsi terutama muncul pada pembagian urusan yang menjadi kewenangan masing-masing stakeholder.

Berkaitan dengan masalah yang telah diungkapkan, maka timbul isu mengenai pentingnya peningkatan sinkronisasi dan koordinasi pembangunan antar stakeholder pada setiap lini pemerintahan. Diharapkan dengan adanya koordinasi dan sinkronisasi yang baik akan menghasilkan sebuah sinergitas pembangunan sehingga tidak terjadi *over lapping* maupun *double funding*.

Selanjutnya, peningkatan sinkronisasi dan koordinasi juga akan mampu meningkatkan efisiensi sumber daya, baik berupa SDA maupun SDM. Selain itu, isu sinkronisasi dan koordinasi menjadi sangat relevan ketika paradigma pembangunan dalam RPJM II adalah bertumpu kepada aspek kewilayahan.

2. Pengembangan Jaminan Sosial

Berbagai krisis yang melanda Indonesia sejak 1998 dan kemudian diikuti dengan krisis global tahun 2008 telah melahirkan kelompok masyarakat yang termarginalkan dan tertinggal. Betapapun, kelompok masyarakat ini tidak dapat ditinggalkan dan memerlukan penanganan secara serius dan manusiawi. Pengelolaan yang salah, baik secara konseptual maupun penanganan terhadap kelompok masyarakat, ini akan justru menimbulkan berbagai masalah lain.

Upaya pemberdayaan pada kelompok masyarakat tertinggal ini, tidak dapat dilakukan secara langsung, sehingga memerlukan proses pendampingan dan penyapihan secara kontinyu dan berkesinambungan. Kondisi ini memunculkan pentingnya isu pengembangan berbagai Jaminan Sosial (Jamsos), khususnya bagi kelompok masyarakat tertinggal.

Pengembangan Jamsos dapat dilakukan pada berbagai bidang dan sektor kehidupan. Pengembangan program JPS terutama dimaksudkan sebagai buffer yang mampu meredam terhadap berbagai guncangan dan krisis yang terjadi di masyarakat, sehingga tidak menimbulkan masalah susulan. Dengan demikian pengembangan program Jamsos akan berbeda dengan pengembangan ekonomi produktif pada kelompok masyarakat lain yang lebih berdaya.

4.4 Isu Kabupaten Lampung Selatan

Memperhatikan isu-isu strategis pada tingkat global, nasional, dan provinsi, maka isu strategis pembangunan Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 dirumuskan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pendidikan
2. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
3. Pengembangan potensi keparawisataan daerah
4. Pengembangan ekonomi kerakyatan dan optimalisasi sumber-sumber pendapatan
5. Peningkatan efektivitas pembangunan antar kawasan dan percepatan pembangunan infrastruktur
6. Peningkatan efektivitas pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup
7. Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan serta pembangunan perdesaan
8. Peningkatan pelayanan kependudukan, tenaga kerja, transmigrasi dan pemberdayaan masyarakat
9. Pemeliharaan kehidupan beragama, sosial dan politik yang kondusif
10. Penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik

V. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

V. STRATEGI PEMBANGUNAN DAERAH

5.1 Strategi Pembangunan Daerah

Strategi Pembangunan Daerah merupakan kebijakan yang disusun guna mengimplementasikan program kerja, sebagai payung pada perumusan program dan kebijakan pembangunan di dalam mewujudkan visi dan misi.

Misi-1 : Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur skala tinggi, ekonomi, dan pelayanan sosial.

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan dan pemerataan daya dukung, kapasitas, kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana fisik dasar bagi percepatan pertumbuhan ekonomi di setiap wilayah kecamatan dan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut penting untuk dilakukan mengingat revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan tidak mungkin berhasil tanpa infrastruktur yang memadai, mengingat biaya pemasaran makin dominan dalam struktur biaya akhir suatu komoditas pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan. Keluarga miskin tidak akan mampu ikut dalam gelombang pertumbuhan ekonomi jika terisolasi akibat ketiadaan infrastruktur. Masalah lingkungan hidup seperti polusi air, udara dan tanah, atau banjir di lingkungan perkotaan memiliki keterkaitan yang kuat dengan ketiadaan infrastruktur yang memadai. Walaupun pengeluaran dalam bidang infrastruktur telah ditingkatkan, kesenjangan infrastruktur masih terasa. Karena itu, pembangunan infrastruktur dasar harus menjadi prioritas pembangunan.
2. Pengembangan kawasan-kawasan strategis dan cepat tumbuh sehingga diharapkan dapat menjalankan perannya sebagai 'motor penggerak' pembangunan wilayah-wilayah di sekitarnya maupun dalam melayani kebutuhan warga kotanya dan pada akhirnya akan dapat mendorong keterkaitan kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan dengan kegiatan ekonomi di wilayah perdesaan secara sinergis (hasil produksi wilayah perdesaan merupakan backward linkages dari kegiatan ekonomi di wilayah perkotaan) dalam suatu 'sistem wilayah pengembangan ekonomi'

Misi-2 : Meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Pemerataan pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah Lampung Selatan, terutama daerah-daerah yang masih memiliki tingkat kemiskinan yang cukup tinggi untuk mengurangi kesenjangan antar daerah. Pertumbuhan di seluruh wilayah perlu memperhatikan keterkaitan terhadap pelaku dan sumber daya lokal sehingga masyarakat lebih banyak berperan di dalamnya dan ikut menikmati hasil pertumbuhan, sekaligus nilai tambah yang dinikmati di daerah-daerah.
2. Pertumbuhan ekonomi yang tercipta harus dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya dan lebih merata ke sektor-sektor pembangunan, yang banyak menyediakan lapangan kerja untuk mengurangi kesenjangan antar pelaku usaha. Pertumbuhan ekonomi melalui investasi, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Usaha mikro, kecil, dan menengah, diharapkan juga dapat tumbuh dan berkembang dengan sehat agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing yang lebih baik.
3. Meningkatkan pengembangan dan pendapatan pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan berbasis agribisnis dan agroindustri. Potensi sumber daya alam Lampung Selatan akan dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat jika pola dan sistem pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan yang dikembangkan tidak lagi bertumpu kepada ekstensifikasi lahan pertanian melainkan kepada peningkatan daya saing produk pertanian dan pemasarannya melalui konsep agribisnis dan agroindustri sehingga diharapkan pada akhirnya akan dapat memberikan sumbangan yang terbaik dalam perekonomian daerah seiring dengan semakin besarnya tekanan penduduk terhadap lahan daratan potensial dan produktif.
4. Meningkatkan PAD dan PDRB sektor pertambangan dan penggalian. Sumberdaya bahan tambang dan galian yang tersebar di seluruh wilayah Lampung Selatan merupakan potensi perekonomian daerah yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat jika dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Meningkatkan SDM pelaku koperasi dan UMKM. Koperasi sebagai soko guru perekonomian bangsa sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 perlu terus diberikan kesempatan dalam mendukung perekonomian daerah. Kegiatan-kegiatan usaha kecil dan menengah yang banyak berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah merupakan mitra usaha yang potensial dikembangkan dalam mendorong perekonomian lokal dan daerah.

Misi-3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Peningkatan produktifitas sebagai sumber pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas sangat ditentukan oleh peningkatan kualitas sumber daya manusia, utamanya dalam penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, maupun derajat kesehatannya. Sumber daya manusia, bukan hanya sebagai faktor produksi melainkan ikut berfungsi mengkoordinasi faktor produksi lain dalam kegiatan ekonomi. Karenanya, peningkatan kualitas manusia Lampung Selatan, khususnya dalam bidang pendidikan, penguasaan dan akses ilmu pengetahuan dan teknologi, baik melalui pendidikan formal dan nonformal serta pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan menjadi faktor penentu dalam mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya, di bidang kesehatan, peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan serta pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan serta layanan kesehatan keluarga dan lingkungan kepada semua lapisan masyarakat akan menjadi factor yang menentukan bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Lampung Selatan. Dengan demikian, dalam lima tahun ke depan pendidikan dan kesehatan harus terfokus pada peningkatan kualitas manusia secara keseluruhan dan memperbaiki kesenjangan kualitas manusia, baik dilihat dari status golongan pendapatan, gender maupun antar daerah.
2. Meningkatkan prestasi olahraga unggulan daerah. Melalui pembinaan yang bermutu dan berkelanjutan diharapkan generasi muda dan pemuda Lampung Selatan dapat mencapai tingkat prestasi yang tertinggi di bidang olah raga yang sesuai dengan nilai-nilai budaya yang sudah ada dan berkembang sejak lama dan menjadi ciri khas kedaerahan Lampung Selatan.
3. Meningkatkan prestasi dan partisipasi pemuda dalam pembangunan. Peran serta pemuda diharapkan akan menjadi tulang punggung (motor) penggerak dalam berbagai sektor dan bidang pembangunan.
4. Meningkatkan pelayanan sosial dasar. Pemerataan dan peningkatan kualitas layanan sosial dasar kepada masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) akan mendorong motivasi dan semangat kebersamaan dalam kesetaraan pembangunan.
5. Meningkatkan kualitas hidup penyandang masalah kesejahteraan sosial. Strategi ini diperlukan dengan pertimbangan bahwa masyarakat penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) merupakan bagian dari masyarakat sosial lainnya yang

juga mempunyai hak-hak dan kewajiban yang sama sebagai anak bangsa Lampung Selatan dalam pembangunan daerah.

6. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi kelembagaan perempuan. Peranan perempuan dalam pembangunan daerah Lampung Selatan perlu semakin ditingkatkan dan diberikan kesetaraan dalam memperoleh kesempatan berperan aktif melaksanakan pembangunan sesuai dengan kodrat dan derajat sosialnya.
7. Mengembangkan kelompok kegiatan KB dan KS. Tingkat pertumbuhan penduduk dan kesenjangan kesejahteraan keluarga yang semakin meluas menuntut semakin diperlukannya keberadaan dan peranan kelompok-kelompok kegiatan KB dan KS.

Misi-4 : Mengembangkan masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan kualitas pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama. Strategi ini didasari pada pemahaman bahwa pembangunan yang dilaksanakan tanpa dilandasi dengan penerapan nilai-nilai dasar keagamaan diyakini tidak akan memberikan manfaat sebesar-besarnya untuk kesejahteraan umat manusia (masyarakat). Oleh karena itu, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan ajaran agama perlu senantiasa di tumbuhkan dan dikembangkan kepada setiap orang baik secara formal melalui lembaga pendidikan maupun informal melalui forum-forum keagamaan yang dilakukan secara swadaya dan swakarsa oleh masyarakat.
2. Meningkatkan hubungan harmonisasi antar umat beragama. Kabupaten Lampung Selatan dengan beragam agama dan kepercayaan yang dianut oleh masyarakatnya, memiliki potensi konflik sosial yang cukup besar karena perbedaan faham dan tata cara pengamalan agama dan kepercayaannya tersebut. Namun demikian, perbedaan tersebut sekaligus dapat dipandang sebagai keragaman potensi yang dapat dikembangkan dalam pembangunan masyarakat Lampung Selatan.
3. Meningkatkan pelestarian dan pengembangan kekayaan budaya daerah. Budaya yang tumbuh dan berkembang dalam kehidupan masyarakat Lampung Selatan tidak lepas dari beragamnya suku dan adat istiadat. Perbedaan khasanah budaya yang dimiliki tersebut dapat menjadi pendorong atau penghambat dalam pelaksanaan pembangunan yang berbasis masyarakat. Oleh karena itu kekayaan budaya daerah yang dimiliki harus dapat dipandang sebagai potensi yang cukup besar untuk melaksanakan percepatan pembangunan.

4. Mengembangkan kepariwisataan daerah berdasarkan budaya, potensi daerah dan lingkungan hidup yang dimiliki dengan prinsip pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan.

Misi-5 : Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan kualitas dan pelaksanaan pengelolaan sumberdaya alam dan ruang. Potensi sumberdaya alam dan lingkungan hidup pada dasarnya ditujukan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh rakyat Lampung Selatan. Oleh karena itu, dalam pengelolaannya harus dilakukan dengan cara yang bijaksana mempertimbangkan tiga aspek, yaitu aspek kelestarian produksi, kelestarian fungsi sumberdaya alam dan lingkungan, serta keseimbangan sosial dan kesejahteraan masyarakat.
2. Meningkatkan pembangunan industri yang ramah lingkungan. Kegiatan industri sebagai suatu proses merubah bentuk suatu produk sumberdaya alam menjadi produk lain yang bernilai ekonomis lebih baik diyakini akan dapat meningkatkan nilai jual produk atau jasa yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun dilain pihak, proses produksi barang dan jasa tersebut akan menimbulkan masalah terhadap lingkungan jika tidak dilakukan dengan cara yang berwawasan lingkungan (ramah lingkungan). Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip pembangunan yang berwawasan lingkungan pada semua sektor pembangunan termasuk kegiatan industri yang semakin berkembang di Lampung Selatan saat ini perlu semakin mendapat perhatian pemerintah daerah beserta masyarakatnya.

Misi-6 : Meningkatkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang demokratis

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan aktivitas penegakan supremasi hukum dan HAM secara adil. Penegakan hukum pada semua sendi kehidupan bermasyarakat secara adil pada era reformasi dan pelaksanaan otonomi daerah yang semakin luas dan nyata saat ini semakin dirasakan sebagai suatu tuntutan kebutuhan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang bersih dan berwibawa.
2. Meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pelaksanaan Pemilu. Sejak diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka proses pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota masyarakat yang sudah memiliki hak pilih dalam proses pemilu.

Demokratisasi pun bergulir melalui perwakilan masyarakat dalam lembaga legislatif yang dipilih melalui proses pemilu. Oleh karena itu, dalam upaya tetap menjaga keterwakilan suara rakyat dalam lembaga eksekutif dan legislatif pemerintahan daerah maka peran serta seluruh komponen bangsa dan masyarakat Lampung Selatan demi terlaksananya pemilu yang jujur dan adil juga semakin menjadi tuntutan dan kebutuhan pembangunan daerah Lampung Selatan pada masa yang akan datang.

Misi-7 : Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan, dan bertatakelola yang baik

Strategi Pembangunan Daerah :

1. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan desa berbasis masyarakat dan potensi desa. Desa sebagai unit terkecil dalam tataran pemerintahan daerah sebagai ujung tombak dan indikator pelaksanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu perencanaan pembangunan daerah harus bertumpu kepada potensi dan kebutuhan desa (basic needs).
2. Meningkatkan dan menumbuhkembangkan peran forum-forum musyawarah pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan yang aspiratif dan partisipatif diyakini akan dapat didukung dan dilaksanakan oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, peran serta seluruh masyarakat dalam pembangunan yang dijewantahkan dalam forum-forum musyawarah perencanaan pembangunan perlu semakin dikembangkan dan dibudayakan secara lebih meluas
3. Meningkatkan budaya kerja aparatur pemerintah daerah. Budaya kerja seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Lampung Selatan mendapat penekanan pertama dalam upaya meningkatkan kualitas manajemen pemerintahan, pada semua level dan jenjang pemerintahan hingga pada tingkat kecamatan dan desa. Budaya kerja terkait dengan ethos kerja dan kedisiplinan pegawai. Dengan tingginya ethos kerja dan kedisiplinan maka peran aparatur pemerintah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat akan semakin dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh komponen bangsa di Lampung Selatan pada satu sisi serta efisiensi dan efektifitas pendayagunaan aparatur juga semakin meningkat pada sisi yang lain.
4. Meningkatkan efektifitas pengawasan aparatur pemerintah daerah. Pelaksanaan pembangunan yang difasilitasi oleh pemerintah daerah akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan sasarannya jika disertai dengan adanya mekanisme dan pelaksanaan pengawasan, baik yang dilakukan oleh pemerintah sendiri (pengawasan internal) maupun oleh masyarakat (pengawasan eksternal). Dengan demikian

diharapkan bias pembangunan dapat diminimalisasi sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pemanfaatannya.

5. Menindaklanjuti hasil-hasil pengawasan dan pemeriksaan aparat pemerintah daerah. Inspektorat Daerah sebagai lembaga institusi internal yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemerintahan, akan semakin mempunyai arti jika hasil-hasil kegiatan pengawasan dan pemeriksaannya ditindaklanjuti dan disikapi sebagai bentuk umpan balik penyempurnaan dan peningkatan kualitas pelayanan pemerintahan secara luas.
6. Meningkatkan kesejahteraan pegawai pemerintah daerah. Aparatur pemerintah daerah sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat akan dapat menjalankan peranannya dengan baik jika didukung dengan tingkat kesejahteraan yang baik. Dengan demikian profesionalitas terhadap tugas pokok dan fungsi semua aparat dapat diharapkan pada kondisi yang prima yang pada gilirannya meningkatkan budaya dan ethos kerja individu aparat dan kelembagaan.
7. Melaksanakan jenjang karier berdasarkan prestasi. Penerapan mekanisme *Reward and Punishment* kepada seluruh jajaran aparat pemerintahan secara adil dan transparan akan meningkatkan motivasi kerja menuju kepada pencapaian prestise individu yang lebih baik disamping meminimalisasi terjadinya praktek-praktek KKN.
8. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi ketatalaksanaan pemerintah daerah, dilakukan melalui peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi aparat pemerintahan serta penataan kembali (evaluasi) fungsi-fungsi kelembagaan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian visi dan misi 2011 - 2015 Kabupaten Lampung Selatan tersebut di atas, sangatlah tepat apabila kebijaksanaan dalam pengembangan perekonomian guna mencapai visi 2015 tersebut harus didasarkan pada keunggulan komparatif dan kompetitif sesuai dengan kompetensi dan produk unggulan daerah, serta memberdayakan para pelaku dan potensi ekonomi di daerah dalam rangka mempercepat pembangunan ekonomi secara efektif dan efisien. Oleh karenanya, pada masa yang akan datang, pembangunan daerah di Kabupaten Lampung Selatan harus didasarkan pada pendayagunaan potensi daerah dalam mendukung pengembangan ekonomi rakyat yang dilakukan melalui strategi kombinasi yaitu kewenangan daerah untuk dapat berdiri sendiri dengan basis sumberdaya yang dimiliki dengan kemampuan menciptakan interaksi dan keterkaitan secara ekonomi dengan daerah sekitarnya atau dengan wilayah ekonomi yang lebih luas.



Gambar 3. Keterkaitan Aspek Utama Pengembangan Ekonomi Daerah Menuju
Visi Kabupaten Lampung Selatan 2015

Segitiga pertama dan kedua yaitu kelompok sasaran pengembangan ekonomi daerah dan faktor lokasi merupakan instrumen kunci dari pengembangan ekonomi daerah. Segitiga ketiga dan keempat yaitu keterkaitan dan fokus kebijakan serta pembangunan yang berkelanjutan merupakan factor inovatif yang akan memperluas cakupan pengembangan ekonomi daerah. Factor kelima dan keenam merupakan isu penting yang terjadi dalam proses penerapan pengembangan ekonomi daerah. Dengan ke 6 (enam) faktor kunci tersebut, diharapkan untuk 5 (lima) tahun ke depan, 2011 - 2015, akan dapat:

- (1) Terlaksananya upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal melalui pelibatan pemerintah, dunia usaha, masyarakat lokal, dan organisasi masyarakat madani dalam suatu proses yang partisipatif.
- (2) Terbangun dan berkembangnya kemitraan dan aliansi strategis dalam upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal diantara stakeholder secara sinergis.
- (3) Terbangunnya sarana dan prasarana ekonomi yang mendukung upaya percepatan pengembangan ekonomi lokal.
- (4) Terwujudnya pengembangan dan pertumbuhan UKM secara ekonomis dan berkelanjutan.
- (5) Terwujudnya peningkatan PAD dan PDRB.
- (6) Terwujudnya peningkatan pendapatan masyarakat, berkurangnya pengangguran, menurunnya tingkat kemiskinan.

- (7) Terwujudnya peningkatan pemerataan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah.
- (8) Terciptanya ketahanan dan kemandirian ekonomi masyarakat lokal.

Dengan didasarkan pada hal tersebut di atas dan sebagai salah satu upaya mewujudkan Visi Kabupaten Lampung Selatan 2015, kebijakan strategis yang akan dilakukan adalah melalui pengembangan sector pariwisata daerah. Sektor pariwisata merupakan salah satu kegiatan yang memiliki banyak alasan untuk dikembangkan. Cleverdon dalam Supriatna (1997) menyatakan bahwa manfaat ekonomi tumbuh jauh lebih cepat dari industri pariwisata dibandingkan dengan banyak industri lainnya yang padat modal, mengingat pariwisata dapat menimbulkan multiplier effect bagi kegiatan sektor lain yang terkait dengan pariwisata. Kegiatan ekonomi yang berlangsung akan membuka lapangan pekerjaan yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat dan pemerintah. Dengan meningkatnya pendapatan pemerintah melalui pajak dari pariwisata, selanjutnya dapat dipergunakan untuk membangun fasilitas prasarana dan pelayanan masyarakat.

Oleh karenanya, pembangunan kepariwisataan merupakan upaya untuk mengembangkan dan memanfaatkan objek dan daya tarik yang terwujud antara lain dalam bentuk keindahan alam, keragaman flora dan fauna, kemajemukan tradisi dan budaya, serta peninggalan sejarah purbakala. Pemaduan objek dan daya tarik wisata dengan pengembangan usaha jasa dan sarana wisata akan berfungsi untuk meningkatkan daya tarik wisatawan maupun pengembangan objek dan daya tarik wisata yang baru. Pembangunan kepariwisataan, apabila ditinjau dari aspek kegiatan sosio-ekonomi dan sosio-budaya serta lingkungan fisik yang terkait di dalamnya, haruslah terintegrasi dalam pola kebijaksanaan pembangunan nasional maupun daerah.

Kabupaten Lampung Selatan sebagai bagian integral dari Propinsi Lampung, apabila ditinjau dari aspek tata ruang memiliki keunggulan komparatif dikarenakan letaknya sebagai "transit point" masuk/ keluar Pulau Sumatera, (pintu gerbang Pulau Sumatera). Berkaitan dengan keunggulan komparatif tersebut dan dengan dukungan luas wilayah yang dimiliki dengan berbagai macam potensi sumberdaya alam yang dimiliki dari masing-masing wilayah serta berbagai corak kegiatan perekonomian, maka kegiatan pariwisata di Kabupaten Lampung Selatan berpotensi untuk dikembangkan sebagai salah satu sektor unggulan daerah yang tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perekonomian Kabupaten Lampung Selatan, dimana hal tersebut sesuai dengan Mathiesen, A dan Wall, G (1994) yang menyatakan bahwa kegiatan pariwisata memberikan keuntungan ekonomi bagi sebuah wilayah, yang meliputi kontribusi pariwisata terhadap neraca pembayaran,

peningkatan pendapatan, peningkatan peluang kerja, penyempurnaan struktur ekonomi, dan membangkitkan aktivitas kewiraswastaan.

Selain memberikan keuntungan ekonomi, kegiatan pariwisata juga memiliki efek pengganda yang sangat dipengaruhi oleh struktur internal perekonomian dan sikap wisatawan dalam membelanjakan uangnya demi memenuhi kebutuhannya yang akan didistribusikan dalam berbagai sektor.

Dalam konteks ini, upaya yang dilakukan untuk mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai faktor pengungkit adalah dengan mensinergikannya dengan faktor pendorong yaitu sektor pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan maupun dengan sektor UMKM. Dengan mensinergikan ke 3 (tiga) faktor tersebut, diharapkan pengembangan ekonomi Kabupaten Lampung Selatan selama 5 (lima) tahun ke depan dapat berkelanjutan melalui pengoptimalan pemanfaatan sumberdaya lokal guna mempercepat pertumbuhan ekonomi wilayah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pengurangan kesenjangan antar kelompok masyarakat, antar sektor dan antar wilayah sebagai mana terlihat pada Gambar 2.



Gambar 4. Sinergi Pengembangan Sektor Pariwisata Dengan Sektor UMKM dan Sektor Pertanian, Perkebunan, Peternakan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan

5.2 Indikator Kinerja Utama

Dalam kerangka pembangunan *good governanc*, kebijakan umum pemerintah daerah adalah ingin menjalankan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (*result oriented government*). Orientasi pada input, terutama uang, seperti yang selama ini dijalankan, hendak ditinggalkan. Pemerintahan yang berorientasi pada hasil pertama-tama akan fokus pada kemaslahatan bagi masyarakat, berupa upaya untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. *Output* merupakan hasil langsung dari program-program atau kegiatan yang dijalankan pemerintah dan dapat berwujud sarana, barang, dan jasa pelayanan kepada masyarakat, sedangkan *outcome* adalah berfungsinya sarana, barang, dan jasa tersebut sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. *Output* dan *outcome* inilah yang selayaknya dipandang sebagai kinerja, bukan kemampuan menyerap anggaran seperti persepsi yang ada selama ini. Namun demikian, uang tetap merupakan faktor penting untuk mencapai kinerja tertentu berupa baik *output* maupun *outcome*. *Money follows function*, bukan sebaliknya, karena itu prinsip dasar manajemen berbasis kinerja adalah *no performance, no money*.

Sehubungan dengan itu maka sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang telah dibangun dalam rangka upaya mewujudkan *good governance* dan sekaligus *result oriented government*, perlu terus dikembangkan dan informasi kinerjanya diintegrasikan kedalam sistem penganggaran dan pelaporan sesuai dengan amanat UU No.17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UU No. 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara serta berbagai peraturan perundangan dibawahnya. Dengan demikian, kedepan anggaran negara baik pusat maupun daerah menjadi anggaran berbasis kinerja, yaitu anggaran yang dihitung dan disusun berdasarkan perencanaan kinerja, atau dengan kata lain dihitung dan disusun berdasarkan kebutuhan untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang diinginkan masyarakat. Dengan anggaran berbasisi kinerja ini akan dapat dilakukan penelusuran alokasi anggaran kekinerja yang direncanakan, dan pada setiap akhir tahun anggaran juga dapat dilakukan penelusuran realisasi anggaran dengan capaian kinerjanya. Hal ini akan memudahkan evaluasi untuk mengetahui *cost efficiency* dan *cost effectiveness* anggaran instansi bersangkutan, sekaligus memudahkan pencegahan dan deteksi kebocoran anggaran.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam kerangka penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia adalah telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah. Berdasarkan peraturan tersebut indikator kinerja utama (*Key Performance*

Indicators) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Setiap instansi pemerintah wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara formal untuk tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing tingkatan (*level*) secara berjenjang. IKU instansi pemerintah harus se;aras antar tingkatan unit organisasi meliputi Indikator Kinerja Keluaran (*output*) dan hasil (*outcome*). IKU pada tingkat Kementerian Negara/ Departemen/ LNPDP/ Pemprop/ Pemkab/ Pemkot sekurang-kurangnya adalah indikator hasil (*outcome*) dan atau keluaran dibawahnya, sedangkan IKU pada unit kerja setingkat Eselon I adalah Indikator Hasil (*outcome*) dan atau keluaran (*output*) yang setingkat lebih tinggi dari keluaran (*output*) unit kerja dibawahnya, sedangkan IKU pada unit organisasi setingkat Eselon II/ Satuan Kerja/ Unit Kerja mandiri sekurang-kurangnya adalah Indikator Keluaran (*output*).

Dengan ditetapkannya IKU secara formal dalam suatu lembaga pemerintah, diharapkan akan diperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta diperolehnya ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan, untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Dengan mempertimbangkan kondisi saat ini dan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan tersebut diatas, maka dipandang perlu IKU dimasukkan dalam RPJMD 2011 - 2015 Kabupaten Lampung Selatan walaupun belum dibuat dalam Keputusan Bupati. IKU perlu dimasukkan agar setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dapat memahami pentingnya IKU dalam perencanaan, penganggaran, pengukuran, pelaporan maupun pemberian penghargaan dan sanksi.

Berikut ini disampaikan IKU Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan IKU Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011 - 2015, dan untuk selanjutnya akan ditetapkan melalui Keputusan Bupati Lampung Selatan.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DAN
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
TAHUN 2011 - 2015

Nama Organisasi	: PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
VISI	: “TERWUJUDNYA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN YANG MAJU DAN SEJAHTERA BERBASIS EKONOMI KERAKYATAN”
MISI	: 1. Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur skala tinggi, ekonomi, dan pelayanan sosial. 2. Meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. 4. Mengembangkan masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia. 5. Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan. 6. Menegakkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang demokratis. 7. Mewujudkan pemerintahan yang bersih, berorientasi kemitraan, dan bertatakelola yang baik.
Indikator Kinerja Utama	:

No	URUSAN PEMERINTAH/ PRIORITAS/AGENDA		SASARAN UTAMA RPJMD	INDIKATOR KINERJA UTAMA		SKPD PENANGGUNGJAWAB	KETERANGAN
1.	Pengembangan Infrastruktur wilayah dalam Skala Tinggi, Pelestarian Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang berkelanjutan	a.	Meningkatnya Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	-	Prosentase Perbaikan dan bertambahnya jaringan dan jembatan di Kabupaten Lampung Selatan	Dinas Pekerjaan Umum	
		b.	Meningkatnya Pemeliharaan Jaringan Irigasi	-	Prosentase Perbaikan jaringan irigasi di Kabupaten Lampung Selatan	Badan Lingkungan Hidup	
				-	Prosentase luas sawah yang terdiri dengan baik dan luas jaringan irigasi yang terpelihara	Dinas Kehutanan	
		c.	Meningkatnya sarana dan prasarana publik termasuk transportasi dan air bersih	-	Tingkat Perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana publik	Dinas Pertambangan dan Energi	
		d.	Pengembangan Infrastruktur yang dapat mengantisipasi bencana	-	Prosentase sarana dan prasarana air bersih		
				-	Tingkat Pembangunan Infrastruktur yang dapat mengantisipasi bencana		
				-	Jumlah sarana dan prasarana dalam penanggulangan bencana		
		e.	Meningkatnya Perencanaan Tata ruang	-	Prosentase Peningkatan Perencanaan Tata Ruang		
		f.	Peningkatan Pembangunan sarana dan prasarana pedesaan berbasis masyarakat pola sistem padat karya	-	Tingkat keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan sarana dan prasarana pedesaan		
		g.	Pelatihan dan pengembangan community kader dan bantuan modal awal di Kecamatan dan desa potensial	-	Tingkat Pengembangan peran serta masyarakat dan modal awal yang diberikan kepada Kecamatan dan desa		
		h.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	-	Tingkat pemeliharaan lingkungan hidup dan SDA		
				-	Tingkat Perusakan lingkungan hidup		
		i.	Pengendalian pencemaran dan berkurangnya perusakan lingkungan hidup	-	Jumlah penanganan kasus/pengaduan masyarakat		
		j.	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	-	Tingkat kualitas udara ambien perkotaan dan kualitas air		
				-	Prosentase jumlah industri yang diawali dalam ketaatan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan		

VI. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

VI. ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

6.1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

6.1.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah

Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah diarahkan secara optimal dalam rangka pencapaian target pendapatan daerah baik dari sektor Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun sektor Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak sehingga rencana penerimaan dapat dicapai secara maksimal.

Disamping itu dilaksanakan juga kegiatan investasi daerah dalam rangka peningkatan PAD serta pembentukan Sistem Informasi Basis Data Pendapatan Daerah dalam rangka penyebaran informasi dan membangun transparansi serta akuntabilitas publik administrasi pendapatan daerah.

Adapun program yang dilaksanakan antara lain meliputi :

- a. Pengamanan pencapaian paket realisasi penerimaan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak maupun penerimaan lainnya dalam rangka pencapaian penerimaan target APBD;
- b. Program pelayanan administrasi perkantoran;
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur;
- d. Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur;
- e. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan;
- f. Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah;
- g. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah;
- h. Memfasilitasi pelaksanaan revisi berbagai peraturan daerah serta dasar hukum pengenaan pajak daerah/retribusi daerah dan pendapatan asli daerah lainnya yang dilakukan bersama-sama dengan dinas/instansi terkait dalam rangka peningkatan pendapatan daerah;
- i. Melaksanakan penyusunan database potensi sumber-sumber penerimaan daerah secara periodik dan kontinyu;

- j. Optimalisasi kinerja dinas/instansi pengelola pendapatan daerah di Kabupaten Lampung Selatan melalui upaya pelaksanaan rapat koordinasi bulanan, evaluasi monitoring dan pelaporan oleh dinas terkait secara kontinyu serta mengkoordinasikan pelaksanaan sosialisasi/penyuluhan dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi;
- k. Evaluasi perhitungan penetapan target penerimaan oleh masing-masing dinas pengelola pendapatan daerah agar diperoleh target penerimaan yang realistis sesuai dengan potensi yang ada.

Target dan Realisasi Pendapatan

Selama periode Tahun 2005-2009 perkembangan realisasi Pendapatan Asli daerah (PAD) Kabupaten Lampung Selatan mengalami peningkatan yang cukup baik, meskipun secara rata-rata belum dapat mencapai 100% dari target yang telah ditetapkan (Tabel 26). Khusus Tahun Anggaran 2008 dan 2009 realisasi penerimaan PAD memang dirasakan jauh dari target yang telah ditetapkan, hal ini disebabkan ekspektasi penetapan target PAD masih besar dilain pihak realisasi penerimaannya terlihat kecil. Untuk itu diperlukan perhitungan penetapan target pendapatan Asli Daerah yang tepat yang disesuaikan dengan potensi PAD yang kita miliki. Untuk Tahun 2010 dari Rp. 36.252.534.994,00 target PAD yang ditetapkan, sampai dengan akhir Bulan Maret 2010 sudah terealisasi Rp. 2.959.693.290,00 (8,16%), diharapkan target PAD Tahun 2010 di akhir Tahun Anggaran 2010 dapat terealisasi 100%.

Tabel 25 Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2005-2010

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2005	16.173.140.780,00	15.937.349.798,65	98,54
2	2006	20.851.708.685,00	19.101.371.672,67	91,61
3	2007	25.325.430.800,00	24.459.293.346,78	96,58
4	2008	50.370.555.902,00	25.572.134.451,21	50,77
5	2009	91.339.376.702,67	25.030.107.579,55	27,40

Ket: * Data realisasi sampai dengan Bulan Maret 2011

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah

Realisasi penerimaan Dana Perimbangan selama periode Tahun 2005-2008 selalu mengalami peningkatan, dimana pada Tahun 2005 dana perimbangan yang diterima sebesar Rp. 431.028.987.658,00 dan pada Tahun 2008 dana perimbangan yang diterima meningkat sebesar Rp. 806.565.815.225,00 (Tabel 27). Salah satu komponen penyumbang

dana perimbangan yang cukup besar adalah berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU). Pada Tahun 2009 realisasi penerimaan dana perimbangan sebesar Rp. 563.921.335.972,00 atau menurun sebesar Rp. 242.644.479.253,00 (30,08%) dari realisasi Tahun 2008. Penurunan penerimaan dana perimbangan tersebut juga disebabkan menurunnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang diterima, dimana pada Tahun 2008 DAU yang diterima masih sebesar Rp. 658.043.647.000,00 dan pada Tahun 2009 menjadi sebesar Rp. 444.670.385.000,00. Penurunan jumlah DAU yang diterima disebabkan karena terjadinya pemekaran Kabupaten Lampung Selatan, sehingga mempengaruhi jumlah penduduk dan jumlah pegawai yang dimiliki oleh Kabupaten Lampung Selatan, yang secara langsung juga mempengaruhi perhitungan Dana Alokasi Umum yang diberikan pemerintah pusat ke Kabupaten Lampung Selatan. Sampai dengan Bulan Maret 2010, realisasi penerimaan dana perimbangan sudah mencapai Rp. 197.838.886.130,00 (30,80%) dan diharapkan sampai berakhirnya Tahun Anggaran 2010 realisasi penerimaan dapat terealisasi 100% atau sebesar Rp. 642.320.876.003,33.

Tabel 26 Target dan Realisasi Dana Perimbangan Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2005-2010

No.	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2005	428.401.210.978,00	431.028.987.658,00	100,61
2	2006	692.069.792.156,00	701.119.109.011,00	101,31
3	2007	733.573.316.526,00	718.927.397.894,00	98,00
4	2008	838.159.293.342,00	806.565.815.225,00	96,23
5	2009	588.738.047.319,15	563.921.335.972,00	95,78

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah

Tabel 27 Target dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2005-2010

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
1	2005	26.208.240.000,00	26.235.452.248,00	100,10
2	2006	2.769.000.000,00	2.762.566.912,00	99,77
3	2007	133.400.000.000,00	101.106.294.200,00	75,79
4	2008	92.123.614.000,00	43.951.558.400,00	47,71
5	2009	207.479.470.000,00	91.988.177.900,00	44,34

Ket: * Data realisasi sampai dengan Bulan Maret 2011

Sumber: Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan & Asset Daerah

Pada periode 2005-2009 jumlah target dan realisasi Lain-lain Pendapatan daerah Yang Sah mengalami fluktuasi (Tabel 28), hal ini terkait dari perubahan nomenklatur dari berbagai komponen yang termasuk di Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yang disesuaikan dengan peraturan penatausahaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

6.1.2. Permasalahan dan Solusi

Jika dilihat dari komposisi pembentuk pendapatan daerah, tingkat kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih relatif rendah yaitu sebesar 3,46% (Tahun 2005), 2,64% (Tahun 2006), 2,87% (Tahun 2007), 2,87% (Tahun 2008), 3,67% (Tahun 2009), dan 1,58% (hingga akhir Maret 2010), sedangkan sebagian besar sumber keuangan berasal dari dana perimbangan yang terdiri dari: Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan masih harus terus berupaya untuk meningkatkan kemandiriannya dalam membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan.

Guna mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, dicoba untuk mencari solusi pemecahan dan upaya-upaya yang telah dilakukan adalah antara lain meliputi :

- Penerapan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIKPD).
- Penertiban Rekening Bank SKPD;
- Menindaklanjuti hasil temuan Tim TPTGR;
- Menerapkan Pengawasan Internal dalam alur pelaksanaan administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah mulai dari penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban keuangan SKPD;

- e. Melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak baru khususnya menyangkut Wajib Pajak Pajak Restoran, Pajak Reklame, dan Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;
- f. Meningkatkan pengawasan dan monitoring pada Unit-unit kerja Pengelola Pendapatan Daerah melalui sistem pelaporan dan monitoring obyek serta pelaksanaan Rapat Koordinasi Penerimaan Daerah secara berkala;
- g. Melakukan monitoring dan verifikasi penerimaan PBB sampai tingkat Desa dan Dusun khususnya pada sektor Pedesaan dan Perkotaan;
- h. Dalam rangka optimalisasi sumber-sumber Pendapatan Daerah telah dilakukan pembelajaran di tiga Kabupaten/Kota di Pulau Jawa (Kota Cilegon, Kabupaten Bekasi dan Kabupaten Tangerang) dengan fokus Bidang Perizinan, Pajak Daerah dan sumber-sumber pendapatan baru yang mungkin diterapkan di Kabupaten Lampung Selatan

6.2 Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah

Adapun kebijakan umum pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Lampung Selatan disusun berdasarkan pada visi dan misi serta isu-isu strategis yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lampung Selatan tahun 2011-2015 sebagai berikut:

- 1) Pengamanan pencapaian target realisasi penerimaan daerah, baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, maupun penerimaan lainnya dalam rangka pencapaian penerimaan target APBD 2011 sampai APBD 2015
- 2) Meningkatkan program pelayanan administrasi perkantoran
- 3) Meningkatkan program peningkatan sarana dan prasarana aparatur
- 4) Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
- 5) Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
- 6) Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
- 7) Program pembinaan dan fasilitas pengelolaan keuangan daerah
- 8) Melaksanakan sepenuhnya program strategis pembangunan sesuai visi dan misi Bupati terpilih periode tahun 2011-2015 yang berhubungan dengan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan

6.3 Proyeksi Penerimaan Daerah Lampung Selatan Tahun 2011 - 2015

Proyeksi penerimaan daerah Lampung Selatan tahun 2011 - 2015 disusun berdasarkan 3 (tiga) skenario (alternatif) perencanaan sebagai berikut :

1. Skenario I (alternatif I), dimana penerimaan daerah diproyeksikan dengan asumsi pendapatan daerah (PAD) tumbuh sebesar 10%, Dana perimbangan tumbuh sebesar 5% dan SILPA tidak ada.
2. Skenario II (alternatif II), penerimaan daerah diproyeksikan dengan asumsi pertumbuhan sebesar 10% dan SILPA tidak ada.
3. Skenario III (alternatif III), penerimaan daerah diproyeksikan dengan asumsi pertumbuhan sama dengan tahun 2009.

Skenario I Proyeksi Penerimaan Daerah

Berdasarkan asumsi pada skenario I, proyeksi total penerimaan daerah tahun 2011 adalah sebesar Rp. 716.238.107.903,1 dengan perincian PAD sebesar Rp. 27.533.118.337,5; penerimaan dari dana transfer Rp. 688.704.989.565,6 (terdiri dari: Transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp. 592.117.402.770,6; Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya Rp. 58.611.861.945,0; serta Transfer dari Pemerintah Propinsi Rp.37.975.724.850,-). Lain-lain pendapatan yang sah dan SILPA tidak diperhitungkan dalam total penerimaan daerah.

Selanjutnya, untuk proyeksi tahun 2015 diharapkan total penerimaan daerah adalah sebesar Rp. 877.436.457.781,1 dengan perincian PAD sebesar Rp. 40.311.238.557,9; penerimaan dana transfer Rp. 837.125.219.223,17 (terdiri dari: Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp. 719.722.403.801,4; Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya Rp. 71.243.084.518,3; serta Transfer dari Pemerintah Propinsi Rp.46.159.730.903,5,-). Lain-lain pendapatan yang sah dan SILPA tidak diperhitungkan dalam total penerimaan daerah.

Skenario II Proyeksi Penerimaan Daerah

Berdasarkan asumsi pada skenario II, proyeksi total penerimaan daerah tahun 2011 adalah sebesar Rp. 749.033.583.596,7 dengan perincian PAD sebesar Rp. 27.533.118.337,5; penerimaan dari dana transfer Rp. 721.500.465.259,2 (terdiri dari: Transfer dari Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp. 620.313.469.569,2; Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya Rp. 61.402.902.990,0; serta Transfer dari Pemerintah Propinsi

Rp. 39.784.092.700,0,-). Lain-lain pendapatan yang sah dan SILPA tidak diperhitungkan dalam total penerimaan daerah.

Selanjutnya, untuk proyeksi tahun 2015 diharapkan total penerimaan daerah adalah sebesar Rp. 1.096.660.069.743,9 dengan perincian PAD sebesar Rp. 40.311.238.557,9; penerimaan dana transfer Rp. 1.056.348.831.185,99 (terdiri dari: Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp. 908.200.950.796,3; Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya Rp. 89.899.990.267,7; serta Transfer dari Pemerintah Propinsi Rp. 58.247.890.122,1). Lain-lain pendapatan yang sah dan SILPA tidak diperhitungkan dalam total penerimaan daerah.

Skenario III Proyeksi Penerimaan Daerah

Berdasarkan asumsi pada skenario III, proyeksi total penerimaan daerah tahun 2011-2015 tidak mengalami perubahan, sehingga total penerimaan daerah adalah konstan sebesar Rp. 680.939.621.451,55 dengan perincian PAD sebesar Rp. 25.030.107.579,55; penerimaan dana transfer Rp. 655.909.513.872,00 (terdiri dari: Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Rp. 563.921.335.972,00; Transfer dari Pemerintah Pusat-Lainnya Rp. 55.820.820.900,00; serta Transfer dari Pemerintah Propinsi Rp. 36.167.357.000,0). Lain-lain pendapatan yang sah dan SILPA tidak diperhitungkan dalam total penerimaan daerah.

Secara lengkap proyeksi penerimaan daerah tahun 2011 - 2015 dapat dilihat pada Tabel 28 - 29.

Tabel 28. Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2015

Alternatif I (PAD Tumbuh 10 % dan Pendapatan Transfer Tumbuh 5 %)

NO	URAIAN	PENERIMAAN TA. 2009	PROYEKSI				
			2011	2012	2013	2014	2015
I	PENDAPATAN ASLI DAERAH						
1	Hasil Pajak Daerah	25,030,107,579.55	27,533,118,337.5	30,286,430,171.3	33,315,073,188.4	36,646,580,507.2	40,311,238,557.9
2	Hasil Retribusi Daerah	7,215,853,685.00	7,937,439,053.5	8,731,182,958.9	9,604,301,254.7	10,564,731,380.2	11,621,204,518.2
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (Bagian Laba Usaha Daerah)	12,742,714,583.79	14,016,986,042.2	15,418,684,646.4	16,960,553,111.0	18,656,608,422.1	20,522,269,264.3
4	Hasil Pengeluaran Asli Daerah Yang Sah	2,898,841,467.39	3,188,725,614.1	3,507,598,175.5	3,858,357,993.1	4,244,193,792.4	4,668,613,171.6
	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	2,172,697,843.37	2,389,967,627.7	2,628,964,390.5	2,891,860,829.5	3,181,046,912.5	3,499,151,603.7
II	PENDAPATAN TRANSFER						
		655,909,513,872.00	688,704,989,565.60	723,140,239,043.88	759,297,250,996.07	797,262,113,545.88	837,125,219,223.17
A	TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN						
1	Pendapatan Hasil Pajak	563,921,335,972.00	592,117,402,770.6	621,723,272,909.1	652,809,436,554.6	685,449,908,382.3	719,722,403,801.4
2	Pendapatan Hasil Bukan Pajak/ SDA	29,970,578,237.00	31,469,107,148.9	33,042,562,506.3	34,694,690,631.6	36,429,425,163.2	38,250,896,421.3
3	Pendapatan Dana Alokasi Umum (DAU)	11,973,372,735.00	12,572,041,371.8	13,200,643,440.3	13,860,675,612.4	14,553,709,393.0	15,281,394,862.6
4	Pendapatan Dana Alokasi Khusus (DAK)	444,670,385,000.00	466,903,904,250.0	490,249,099,462.5	514,761,554,435.6	540,499,632,157.4	567,524,613,765.3
		77,307,000,000.00	81,172,350,000.0	85,230,967,500.0	89,492,515,875.0	93,967,141,668.8	98,665,498,752.2
B	TRANSFER DARI PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA						
1	Dana Penyesuaian	55,820,820,900.00	58,611,861,945.0	61,542,455,042.3	64,619,577,794.4	67,850,556,684.1	71,243,084,518.3
		55,820,820,900.00	58,611,861,945.0	61,542,455,042.3	64,619,577,794.4	67,850,556,684.1	71,243,084,518.3
C	TRANSFER DARI PEMERINTAH PROPINSI						
1	Pendapatan Bagi Hasil	36,167,357,000.00	37,975,724,850.0	39,874,511,092.5	41,868,236,647.1	43,961,648,479.5	46,159,730,903.5
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	36,167,357,000.00	37,975,724,850.0	39,874,511,092.5	41,868,236,647.1	43,961,648,479.5	46,159,730,903.5
		-	-	-	-	-	-
III	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH						
1	Pendapatan Hibah	-	-	-	-	-	-
2	Pendapatan Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
3	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-	-
	TOTAL	680,939,621,451.55	716,238,107,903.1	753,426,669,215.1	792,612,324,184.5	833,908,694,053.1	877,436,457,781.1

Tabel 29. Proyeksi Penerimaan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2015

Alternatif II (PAD dan Pendapatan Transfer Tumbuh 10 %)									

VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

VII. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Prioritas pembangunan di Kabupaten Lampung Selatan disusun untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul dalam issue pembangunan. Program prioritas pembangunan 2011-2015 disusun sedemikian rupa sesuai dengan misi-misi yang akan dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan selama periode waktu tersebut. Program prioritas pembangunan menurut misi meliputi:

Misi-1 : Mengembangkan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur skala tinggi, ekonomi, dan pelayanan sosial.

Program Prioritas :

1. Pengembangan jalan, jembatan, serta sarana dan prasarana transportasi
2. Peningkatan sarana dan prasarana irigasi perdesaan
3. Pengembangan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan infrastruktur skala tinggi
4. Pengembangan fasilitas energi konvensional dan energi terbarukan
5. Pengembangan infrastruktur yang telah mengantisipasi bencana

Program Strategis :

1. Pengembangan Kota Baru Jati Agung
2. Pengembangan Embarkasi Haji Raden Intan II
3. Pembangunan Jalan Tol Bakauheni - Terbanggi Besar
4. Pembangunan Kota Kalianda Modern
5. Pengembangan Menara Siger
6. Pembangunan Terminal Agribisnis di Kecamatan Penengahan
7. Pengembangan Kawasan Bakauheni sebagai Kota Pelabuhan terkait rencana perkembangan wilayah akibat tersambunganya Sumatera dengan Jawa melalui pembangunan Jembatan Selat Sunda.
8. Pembangunan Jalur Kereta Api Perkeretaapian Umum Bakauheni - Bandar Lampung - Rejosari.
9. Pembangunan Short Cut Jalur Kereta Api Rejosari - Panjang
10. Pembangunan Stadion Olah Raga Terpadu
11. Pembangunan Pelabuhan penyeberangan lokal yang berfungsi sebagai penghubung antara daratan dengan pulau-pulau terluar, meliputi Canti - Pulau Sebesi - Pulau Sebuk

12. Pengembangan Jaringan Air Baku Air Minum
13. Pengembangan perekonomian (pasar), baik pasar desa, pasar Induk dan pertokoan
14. Pengembangan kawasan strategis, seperti kawasan agropolitan di Kecamatan Sidomulyo dan Agro Minapolitan di Kecamatan Ketapang maupun kawasan strategis lainnya.
15. Pengembangan Rest Area
16. Pembangunan Jogging Track di lapangan Raden Intan Kalianda
17. Pelebaran jalan pantai pesisir kalianda
18. Pembangunan terminal
19. Pembuatan Batas Kabupaten dengan Tugu Modern
20. Perubahan nama-nama jalan dan gedung di lingkungan Pemda dengan nama-nama pilihan ideal
21. Pembangunan dan Rehabilitasi Jalan dan Jembatan
22. Pemeliharaan dan pengembangan bidang ketenaga listrikan
23. Desa mandiri energi
24. Pengembangan dan rehabilitasi infrastruktur pertanian dan perdesaan bagi peningkatan ketahanan pangan
4. Pengembangan simpul transportasi
5. Perencanaan lalu lintas
6. Pembangunan fasilitas pemberhentian pengguna jasa transportasi pada lintas tengah dan timur pada Kab.Lampung Selatan
7. Pemasangan fasilitas lalu lintas dan angkutan jalan (LLAJ)
8. Pengelolaan pelabuhan local dan pelabuhan khusus
9. Peningkatan pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi
10. Pembangunan jalan dan jembatan
11. Rehabilitasi pemeliharaan jalan dan jembatan
12. Pembangunan/peningkatan jaringan irigasi
13. Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi
14. Pembangunan jalan lingkungan
15. Pembangunan jaringan air bersih/air minum
16. Perbaikan/peningkatan prasarana pemukiman
17. Penanganan pasca bencana alam
18. Penataan dan penertiban mendirikan bangunan

Misi-2 : Meningkatkan kesejahteraan melalui pengembangan ekonomi kerakyatan

Program Prioritas:

1. Revitalisasi pertanian, perkebunan, peternakan, kehutanan, kelautan dan perikanan secara luas
2. Penciptaan lapangan kerja untuk menurunkan pengangguran
3. Pengembangan UMKM dan dana perguliran untuk menurunkan kemiskinan
4. Pengembangan investasi
5. Pengembangan komoditas unggulan daerah

Program Strategis:

1. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
2. Pengembangan Budidaya Perikanan
3. Pengembangan Perikanan Tangkap
4. Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
5. Peningkatan mutu produksi pasca panen perikanan
6. Pengembangan kawasan budidaya laut, air payau, dan air tawar
7. Pengawasan dan Pengendalian
8. Peningkatan promosi dan kerjasama investasi
9. Program Peningkatan kerjasama investasi
10. Pemetaan potensi daerah
11. Program pengembangan pelayanan penanaman modal
12. Peningkatan kesejahteraan petani
13. Revitalisasi areal komoditas perkebunan rakyat (kopi, lada, sawit dan kakao)
14. Pemberdayaan kelompok tani dan gabungan kelompok tani (GAPOKTAN)
15. Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian
16. Peningkatan penerapan teknologi pertanian
17. Peningkatan sarana dan prasarana penyuluhan
18. Pemantapan sistem penyuluhan pertanian
19. Pemberdayaan kelembagaan petani dalam usaha tani
20. Peningkatan kapasitas tenaga penyuluh pertanian
21. Penyuluhan dan pendampingan bagi penyuluhan pertanian
22. Pengembangan kewirausahaan usaha kecil, menengah dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah
23. Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri
24. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
25. Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan

26. Pengembangan industri kecil dan menengah
27. Pengembangan usaha mikro , kecil menengah
28. Pengembangan sarana dan prasarana ekonomi
29. Pengembangan komoditas unggulan daerah
30. Pengembangan investasi
31. Peningkatan ketahanan pangan
32. Peningkatan kesejahteraan petani
33. Peningkatan produksi, produktivitas dan mutu tanaman perkebunan berkelanjutan
34. Peningkatan ketahanan pangan
35. Pengembangan Agribisnis
36. Peningkatan pendapatan petani
37. Peningkatan produktivitas ternak desa miskin
38. Pemanfaatan sumberdaya ternak dan hasil ternak sebagai sumber ekonomi masyarakat
39. Pemanfaatan biomasa (kotoran ternak) sebagai bahan biogas dan kompos
40. Pemanfaatan lahan tidur dan pengembangan komoditi lokal
41. Penguatan sistem pemasaran dan manajemen usaha peternakan
42. Peningkatan SDM petugas dan petani ternak
43. Perlindungan ternak/hewan dari penyakit menular
44. Monitoring kesehatan ternak dan hasil ternak
45. Pembangunan zona agribisnis
46. Pemetaan kawasan peternakan
47. Aplikasi teknologi usaha ternak rakyat
47. Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan
48. Pelatihan keterampilan berorientasi lapangan kerja
49. Pengentasan desa tertinggal
50. Pengurangan masyarakat miskin
51. Pengembangan pengetahuan dan teknologi tepat guna dan pelestarian lingkungan hidup
52. Koordinasi dan Pembina terhadap pekerja sosial profesional dan fungsi panti sosial dan swasta
53. Peningkatan kesempatan kerja
54. Perlindungan pengembangan lembaga ketenagakerjaan
55. Pengerahan dan fasilitasi perpindahan serta penempatan transmigrasi

Misi-3 : Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial

Program Prioritas :

1. Bidang pendidikan :

- a. Pelayanan pendidikan gratis
- b. Penuntasan wajar dikdas 9 tahun
- c. Beasiswa bagi keluarga miskin
- d. Pengembangan insentif bagi guru di daerah terpencil
- e. Pelatihan keterampilan berorientasi lapangan pekerjaan
- f. Pengembangan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan

Program strategis :

1. Wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
2. Pendidikan menengah
3. Pendidikan nonformal
4. Kepemudaan & olahraga
5. Peningkatan kualitas hidup (PKH) & perlindungan perempuan
6. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak & perempuan
7. Penguatan kelembagaan PUG dan anak
8. Pengembangan pusat informasi dan konseling KRR
9. Ketahanan dan pemberdayaan keluarga

2. Bidang kesehatan :

- a. Pelayanan kesehatan gratis
- b. Peningkatan Puskesmas menjadi Puskesmas rawat inap
- c. Peningkatan Puskesmas keliling
- d. Pengembangan insentif bagi dokter di daerah terpencil
- e. Pengembangan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan

Program strategis :

1. Pengembangan RSUD Kalianda sebagai Rumah Sakit Rujukan
2. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap (1 Kecamatan / Puskesmas)
3. Peningkatan pelayanan kesehatan
4. Pencegahan dan pemberantasan penyakit

5. Perbaikan gizi masyarakat
6. Pemerataan keterjangkauan kualitas pelayanan kesehatan
7. Peningkatan jumlah dan kualitas puskesmas, puskesmas pembantu dan poskesdes
8. Peningkatan sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
9. Pelayanan UPTD balai laboratorium kesehatan
10. Penyiapan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)
11. Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
12. Pemerataan keterjangkauan dan kualitas pelayanan
13. Kemitraan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan
14. Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit
15. Keluarga berencana penyiapan bahan pelaksanaan & pelayanan SDM bidang pendidikan, budaya, pembinaan lembaga/organisasi bidang pendidikan, kebersihan, kesehatan masyarakat, gizi dan sarana kesehatan masyarakat

3. Bidang kesejahteraan sosial :

- a. Pengembangan jaminan sosial untuk masyarakat miskin (Askeskin, BLM, dll)
- b. Pengembangan olahraga berprestasi

Program strategis :

1. Peningkatan ketahanan pangan (operasional dan monitoring raskin)
2. Pelatihan keterampilan berorientasi lapangan kerja
3. Peningkatan keterampilan (skill) calon tenaga kerja
4. Pemasaran hasil diklat ketenagakerjaan
5. Analisis kebutuhan diklat aparatur & diklat calon tenaga kerja
6. Pengembangan olahraga berprestasi
7. Seleksi administrasi monitoring evaluasi bagian sosial
8. Pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

Misi-4 : Mengembangkan masyarakat berbudaya dan berakhlak mulia

Program Prioritas :

1. Pengembangan kehidupan beragama yang kondusif
2. Pengembangan budaya daerah
3. Pengembangan kepariwisataan daerah

Program strategis :

1. Pengembangan Wisata Pulau Krakatau dan Sebesi
2. Pengembangan Kawasan Wisata Sebalang
3. Pengembangan nilai budaya
4. Pengembangan pemasaran pariwisata
5. Pengelolaan keragaman budaya
6. Pengembangan destinasi pariwisata
7. Pengembangan kemitraan pariwisata
8. Peningkatan dan pengembangan SDM
9. Peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan
10. Koordinasi penyiapan dan penyelenggaraan peringatan hari-hari besar nasional
11. Peningkatan syiár agama
12. Meningkatkan peran dan fungsi sarana dan prasarana keagamaan
13. Pengembangan wawasan kebangsaan
14. Kemitraan wasbang
15. Pendidikan politik masyarakat
16. Fasilitasi pemberdayaan adat dan sosial budaya masyarakat

Misi-5 : Meningkatkan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup yang berkelanjutan

Program Prioritas :

1. Pengelolaan SDA dan LH berkelanjutan
2. Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan bencana

Program Strategis :

1. Pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian lingkungan pesisir dan laut
2. Peningkatan Kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut
3. Pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan
4. Penanggulangan pengawasan dan penerbitan pertambangan ilegal (ilegal mining)
5. Peningkatan pemanfaatan potensi tambang
6. Pengawasan bidang minyak dan gas bumi
7. Pembinaan, pengawasan pengembangan sumber daya mineral dan air bawah tanah
8. Pemantapan batas difinitif kawasan hutan
9. Penyelenggaran litbang dan perencanaan kehutanan

10. Perlindungan hutan
11. Pengembangan kelembagaan pengelolaan hutan
12. Rehabilitasi hutan dan lahan
13. Pembinaan aneka usaha kehutanan
14. Pembinaan penatausahaan hasil hutan
15. Pengembangan potensi kawasan hutan
16. Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
17. Penataan dan pengembangan keindahan taman kota
18. Pengadaan sarana dan prasarana pemukiman
19. Pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan
20. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
21. Pengembangan kinerja pengelolaan persampahan
22. Peningkatan kualitas dan kinerja di bidang
23. Pemeliharaan dan peningkatan sarana TPA
24. Pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
25. Perlindungan dan konservasi SDA
26. Pengawasan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
27. Pengawasan, pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup, koordinasi AMDAL, penanganan dan pelayanan penegakan hukum lingkungan
28. Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi dan pemulihan cadangan sumber daya alam, Pembinaan dan monitoring penataan peraturan perundang-undangan lingkungan hidup pada perusahaan industry yang menjadi target operasional, Pengendalian dampak perubahan iklim
29. Pengembangan data dan informasi lingkungan
30. Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan
31. Penguatan jejaring informasi pusat dan daerah
32. Penanggulangan bencana alam

Misi-6 : Meningkatkan supremasi hukum untuk menciptakan masyarakat yang demokratis

Program Prioritas:

1. Pengembangan masyarakat sadar hukum
2. Penegakan hukum secara konsisten, cepat, dan murah
3. Pengembangan kebebasan pers yang bertanggungjawab

Program Strategis:

1. Pengawasan dan pengendalian perdagangan sarana dan prasarana telekomunikasi
2. Pengembangan masyarakat sadar hukum
3. Penataan peraturan perundang-undangan
4. Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
5. Keserasian kebijakan peningkatan kualitas anak dan perempuan
6. Penguatan kelembagaan PUG dan anak
7. Pemeliharaan kententraman dan pencegahan tindak Kriminal dan perdagangan orang (TPPO)

Misi-7 : Mewujudkan pemerintah yang bersih, berorientasi kemitraan, dan bertatakelola yang baik

Program Prioritas :

1. Peningkatan pelayanan dan administrasi masyarakat
2. Peningkatan dana pembangunan desa
3. Peningkatan insentif perangkat desa
4. Penyelesaian sengketa pertanahan
5. Pengembangan birokrasi berbasis disiplin dan kinerja
6. Pengembangan birokrasi berorientasi kemitraan
7. Pengembangan sinergi pembangunan antar daerah

Program Strategis :

1. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Kabupaten Lampung Selatan
2. Peningkatan pelayanan bidang perizinan
3. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
4. Asistensi dan penyusunan laporan keuangan SKPD
5. Penyusunan rancangan perda dan perbup tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD
6. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
6. Pelayanan peningkatan pelayanan dan administrasi perkantoran
7. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
8. Peningkatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
9. Pengadaan bahan-bahan keperluan pengujian kendaraan bermotor
10. Pengadaan system informasi public yang terintegrasi dan online
11. Peningkatan aparatur

12. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah
13. Peningkatan dan pengembangan SDM
14. Pelayanan administrasi perkantoran
15. Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
16. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur
17. Pendidikan dan pelatihan
18. Peningkatan pelayanan dan administrasi masyarakat
19. Pengembangan komunikasi, informasi dan media massa
20. Fasilitasi peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
21. Pengembangan perpustakaan
22. Pengembangan kearsipan
23. Pengembangan dokumentasi
24. Fasilitasi pindah/purna tugas PNS
25. Pembinaan & pengembangan aparatur
26. Peningkatan kompetensi pejabat struktural
27. Peningkatan kompetensi teknis & fungsional aparatur
28. Peningkatan image badan diklat
29. Peningkatan sistem pengawasan internal & pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
30. Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja & keuangan
31. Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa & aparatur pengawasan
32. Peningkatan disiplin aparatur
33. Penyiapan bahan kebijakan umum pemda bidang sosial, bahan pelaksana dan pelayanan administrasi sosial untuk petunjuk teknis bidang sosial
34. Penyiapan bahan pelaksanaan sistem informasi administrasi pengumpulan dan pengolahan data monitoring dan evaluasi serta kelembagaan ketenagakerjaan dan transmigrasi
35. Penataan daerah otonom
36. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan umum
37. Penanganan pengaduan masyarakat di bidang pertanahan
38. Pembuatan profil kecamatan sekabupaten lampung selatan
39. Forkopimda
40. Pembuatan buku data inventarisasi kode dan data wilayah kabupaten lampung selatan
41. Data monografi kecamatan
42. Penataan kelembagaan
43. Pelaksanaan analisis jabatan
44. Ketatalaksanaan

45. Evaluasi diklat aparatur dan diklat ketenagakerjaan
46. Peningkatan manajemen pelayanan kesehatan
47. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
48. Peningkatan kemandirian masyarakat pedesaan
49. Peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan desa
50. Mendorong peningkatan kualitas sumber daya masyarakat
51. Perlindungan masyarakat

8.1. Program Transisi

Dalam pelaksanaan program, pemerintah memiliki keterbatasan baik berupa dana maupun tahun anggaran yang dibatasi hanya 1 tahun. Dengan demikian ada beberapa program yang sifatnya berkelanjutan dan jangka panjang (*multiyears*) seperti penanggulangan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat dan pembangunan infrastruktur kunci. Program-program itu memiliki kebutuhan dana yang cukup besar sehingga harus dilakukan beberapa tahap. Selain itu, pendekatan pembangunan yang berubah dari *top-down* ke pendekatan partisipatif, membawa dampak proses penyiapan program dan pemberdayaan yang lebih lama. Oleh karena itu, program-program yang termasuk dalam program transisi memerlukan kajian yang lebih mendalam menyangkut sinergi dan *multiplier effect* yang ditimbulkan.

Dalam implementasi program transisi ini, memerlukan komitmen dari semua unsur pemerintahan (*governance*) meliputi legislatif, eksekutif serta masyarakat luas. Mengingat program seperti ini memerlukan kesabaran dan kesamaan visi, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari pembiayaan yang cukup besar tersebut.

8.2. Kaidah Pelaksanaan

Selanjutnya perlu diperhatikan koordinasi antar program, agar tercipta efisiensi dan efektifitas baik dalam pembiayaan maupun lama waktu pelaksanaan. Untuk itu, diperlukan kaidah pelaksanaan yang menjamin terciptanya tata pamong (*governance*) yang baik, khususnya untuk mengurangi tumpang tindih (*overlapping*) pelaksanaan antar program. Selain itu, tujuan adanya kaidah ini adalah kelanjutan program yang dilakukan. Dengan tata pamong yang baik, diharapkan implementasi program menjadi lebih terukur dampaknya.

8.2.1. RPJM Daerah merupakan pedoman bagi SKPD dalam menyusun Renstra SKPD

Dokumen RPJM Daerah ini, yang disusun mulai Tahun 2006-2011 merupakan penerjemahan visi dan misi bupati terpilih. Dengan demikian setelah dokumen ini tersusun dan dikeluarkan peraturan bupati, maka dokumen ini perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh satuan kerja di lingkungan pemerintahan daerah.

VIII. PENUTUP

Walaupun demikian perlu ditegaskan disini, bahwa satuan kerja yang ada diharapkan bekerja dengan prinsip-prinsip efektifitas dan efisiensi. Dengan SKPD yang mengacu terus kepada RPJM Daerah maka tata pamong yang baik (efisiensi dan efektifitas) akan mudah tercipta.

8.2.2. RPJM Daerah akan digunakan dalam penyusunan RKPD

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah sebagai pedoman untuk penyusunan program-program dan kegiatan tahunan. Untuk itu, kegiatan - kegiatan yang diusulkan didalam RKPD harus memiliki hubungan dan keterkaitan yang erat dengan RPJM Daerah.

Dengan kata lain, penetapan prioritas program dan kegiatan akan muncul dalam RKPD yang diusulkan baik oleh eksekutif dan legislatif. Dalam RPJM Daerah, program-program yang ditawarkan memiliki dimensi umum dan masih perlu diterjemahkan dalam kegiatan-kegiatan riil.

Setelah kegiatan riil dijadwalkan dalam RKPD, maka pembiayaan dapat disusun. Dengan menggunakan prinsip "*money follows function*" maka kegiatan- kegiatan yang diusulkan akan memunculkan pembiayaan.

Sumber pembiayaan yang ada saat ini masih bersumber pada pemerintah (APBD). Dengan sumber pembiayaan hanya dari APBD yang terbatas, berdampak pada pilihan-pilihan kegiatan yang diusulkan. Untuk itu dimasa mendatang pembiayaan dari pihak ketiga, yakni swasta maupun masyarakat (*public-private partnership*), perlu digali dan dimanfaatkan. Dengan semakin banyaknya alternatif sumber-sumber pembiayaan, maka kegiatan yang diusulkan akan semakin besar cakupan dan area/luasan programnya.

8.2.3 Penguatan peran para *stakeholders*/pelaku dalam pelaksanaan RPJM Daerah

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini disusun dengan menggunakan proses partisipasi publik. Dimulai dengan pembentukan pokja (kelompok Kerja) yang melibatkan perwakilan antar dinas di lingkungan pemerintah Kabupaten dengan koordinasi oleh Bapekab. Setelah itu, hasil kerjanya ini disosialisasikan kepada *stakeholders* baik dari kalangan perguruan tinggi, LSM maupun masyarakat. Setelah adanya masukan dan kritik, perbaikan laporan dilakukan dengan menghadirkan beberapa pakar untuk penajaman konsep.

Setelah itu, dokumen RPJM Daerah ini disosialisasikan kembali kepada masyarakat (*stakeholders*) dan masukan masyarakat di terjemahkan kembali dalam program-program yang diusulkan.

Dengan melalui beberapa proses tersebut, diharapkan terjadi proses penguatan *stakeholders* tersebut. Stakeholders yang kuat, akan mendorong proses penyusunan program yang transparan, munculnya kesadaran mengawasi proses penyusunan dan implementasi program (*safe guarding*) dari mereka. Dengan demikian, *stakeholders* yang kuat akan mendorong demokratisasi dan tentunya hal ini akan menjamin efisiensi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan.

8.2.4. Merupakan dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja lima tahunan dan tahunan

Dengan adanya dokumen RPJM Daerah ini, akan sangat membantu kepala daerah untuk melihat sejauh mana capaian dari kebijakan yang sudah dilakukan serta penerjemahan visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan adanya pandangan tersebut, diharapkan RPJM Daerah ini menunjukkan indikator-indikator yang jelas dan terukur agar diperoleh cara yang mudah untuk melihat keberhasilan pemimpin/kepala daerah.

Sebagaimana dijelaskan diatas, RPJM Daerah ini juga akan menjadi acuan bagi RKPD yang merupakan kegiatan pokok tahunan. Dengan demikian kepala daerah nantinya akan mampu melihat tingkat keberhasilan yang dicapai dari indikator kinerja tahunan maupun lima tahunan yang sudah ada dalam RPJMD.

BUPATI LAMPUNG SELATAN

RYCKO MENOZA SZP

LAMPIRAN

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

[illegible]

			5. Peningkatan Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi	1. Pendirian zona Pengawasan menara jaringan telekomunikasi	Terbanya Pembangunan menara telekomunikasi di wilayah Kab. Lampung Selatan.	Hasil : Tersedianya pengelolaan Pelembutan Lokal dan Pelembutan Khusus Masalah : Dana Keluaran : Pendidikan Pembangunan menara jaringan komunikasi Hasil : Tersedianya data menara jaringan komunikasi yang terbit	100.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
			1. Pembinaan dan Pengawasan usaha pertambangan	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaku usaha tambang	Pengusaha Tambang Pemegang IUP	Terdapatnya para pelaku usaha pertambangan	350.000.000	450.000.000	500.000.000	550.000.000	600.000.000	Dinas pertambangan
			2. Peningkatan, Pengawasan dan penerbitan pertambangan legal (legal mining)	Pengawasan dan penerbitan pertambangan legal (legal mining)	Pemegang IUP (PETI)	Berkurangnya pelaku pertambangan liar	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	
			3. Peningkatan Pemasangan Panel Tambang	Pemeliharaan Data Pemegang izin Usaha Pertambangan	Pengusaha Tambang Pemegang IUP	Terdapatnya Pemeliharaan Tambang yang Bereswasesan Lingkungan dan mematuhi Aspek konseptual	150.000.000	200.000.000	250.000.000	300.000.000	350.000.000	
			4. Program Pemeliharaan Dan Pengembangan Bidang Kelengkapan	Kegiatan Penyusunan Rencana Umum Kelengkapan Daerah (RUKD) Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 - 2015	Pemerintah Masyarakat dan PLN	Tersedianya Data para Pelaku Usaha Pertambangan	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000	
			5. Program Desa Mandiri Energi	Kegiatan Penyusunan Rencana Implementasi Desa Mandiri Energi	Pemerintah Masyarakat dan PLN	Tersedianya Blue Print Kelengkapan Daerah	350.000.000					
				Kegiatan Pemasangan dan Pemeliharaan Lampu Jalan	Lokal-lokal yang memerlukan Lampu Penerangan Jalan	Tersedianya Kebutuhan Penerangan Lampu Jalan	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	700.000.000	
				Kegiatan Pemasangan Jaringan Listrik Pedesaan	Masyarakat Pedesaan yang belum terasuh Jaringan Listrik	Tersedianya Jaringan Listrik	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
				Kegiatan Penyusunan Rencana Implementasi Desa Mandiri Energi	Desa-desa yang memiliki potensi energi terbarukan	Tersedianya Blue Print Desa Mandiri Energi	175.000.000					

	Kegiatan penelitian dan pengembangan energi terbarukan	Lokasi desa Mandiri Energi	Adanya penerapan Teknologi/Energi terbarukan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	Dana Penerimaan Umum
6. Program Pengawasan Bidang Minyak dan Gas Bumi	Kegiatan Pengawasan Distribusi Minyak dan Gas Bumi	SF-BU/ Penyakir Minyak Tanah dan Penyakir Elpiji	Optimalnya Penyaluran Migas	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
7. Pembinaan, Pengembangan, Pembangunan Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah	Pembinaan, Pengembangan, Pembangunan Sumber Daya Mineral dan Air Bawah Tanah	Kabupaten Lampung Selatan	Tersedianya data Rincil tentang potensi bahan galian di Kab. LS	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
	Pemeliharaan dan Pemetaan Air Tanah	Kabupaten Lampung Selatan	Tersedianya Data dan Peta tentang Penyebaran Air Tanah	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
	Penataan Wilayah Pertambangan, Pemetaan Zonasi Migas Bencana Alam.	Kabupaten Lampung Selatan	Tersedianya Peta Wilayah Pertambangan dan Migas Bencana Alam di Kab. Lamsel	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	
8. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Jaringan Jalan di Kab. Lampung Selatan	Pelaksanaan Kontribusi fiskal dan pendatangannya	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	50.000.000.000	
9. Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana DAK non DR	Jaringan Jalan di Kab. Lampung Selatan	Pelaksanaan Kontribusi fiskal dan pendatangannya	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
10. Program Pembangunan Jalan Lingkungan	Pembangunan Jalan Lingkungan	Jaringan Jalan di Kab. Lampung Selatan	Pelaksanaan Kontribusi fiskal dan pendatangannya	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	40.000.000.000	
11. Program Pembangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum	Rehabilitasi Jaringan Air Bersih Dana DAK non DR	Mempertuas Lahan Irgasi Tawis	Pelaksanaan Kontribusi fiskal dan pendatangannya	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	
12. Program Perbaikan/ Peningkatan Prasarana Pemukiman	Peningkatan Prasarana Sanitasi Dana DAK non DR	Lahan Pertanian di Kab. Lampung Selatan	Pelaksanaan Kontribusi fiskal dan pendatangannya	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	12.000.000.000	
		Pemukiman di Lampung Selatan	Pelaksanaan Kontribusi fiskal dan pendatangannya	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	
		Wilayah di Lampung Selatan yang belum terlayani oleh air bersih perpipaan maupun non perpipaan	Pelaksanaan Kontribusi fiskal dan pendatangannya	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	
		Pemukiman di Lampung Selatan	Pelaksanaan Kontribusi fiskal dan pendatangannya	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	

[illegible]

3. Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum Dalam Pendederagaman Sumberdaya Laut	1. Operasi laut / penyelamatan kegiatan penangkapan ikan	Pelaku (Legal, Unregulated, Unreported (IUU) Fishing	Memeranya intensitas kejadian IUU Fishing	100.000.000	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	2. Rehabilitasi sumberdaya kelautan dan perikanan	Daerah yang telah rusak sumberdaya lainnya	Sumberdaya kelautan dan perikanan dapat dimanfaatkan secara lestari dan berkelanjutan	-	150.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000
	3. Restocking perikanan umum dan laut	Perairan umum dan laut yang telah mengalami penurunan stock	Stock ikan di perairan umum dan laut dapat dimanfaatkan masyarakat	250.000.000	-	250.000.000	-	-	250.000.000
	4. Sertifikasi Tanah Nelayan	Nelayan yang memiliki lahan tetapi belum memiliki sertifikat	Seluruh lahan milik nelayan telah bersertifikat	100.000.000	150.000.000	200.000.000	-	-	-
4. Pengembangan Budidaya Perikanan	1. Pembiayaan dan Pengembangan Budidaya Ikan	Kelompok Budidaya Ikan (POKOKAN)	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	400.000.000	400.000.000	400.000.000	500.000.000	600.000.000	600.000.000
	2. Pembuatan Model / Percontohan Budidaya Ikan	Kelompok Budidaya Ikan (POKOKAN)	Meningkatnya produksi perikanan budidaya khususnya pada komoditas introduksi	-	400.000.000	-	500.000.000	-	-
	3. Pembiayaan dan Pengembangan Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan HSRT	Unit Pembenihan Rakyat (UPR) dan HSRT	Terjennanya Ketersediaan benih ikan dan udang	-	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000	500.000.000
	4. Pengembangan dan Operasional Operasional BBI	BBI yang dapat menyediakan benih-benih unggul	Kab. LS memiliki 3 unit BBI	1.000.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	-
	5. Diseminasi teknologi budidaya ikan berbasis lingkungan	Kelompok budidaya ikan (Poldakan)	Penerapan CSIB dan CPB	-	150.000.000	200.000.000	200.000.000	-	-
	6. Pengembangan dan Operasional Dempond/Percontohan	Kelompok budidaya ikan (Poldakan), pembudidaya khususnya leleis pemula	Kab. LS memiliki 4 unit Dempond/Percontohan	-	1.000.000.000	1.500.000.000	2.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
	7. Penataan, perbaikan dan penambahan saluran irigasi tambak	Kelompok budidaya ikan (Poldakan) pembudidayaan udang di tambak	Meningkatnya produksi udang, bandeng dan nile	-	-	2.000.000.000	-	3.000.000.000	3.000.000.000
5. Pengembangan Perikanan tangkap	1. Pengembangan sarana dan prasarana Perikanan tangkap	Sentra Perikanan (PPI &ITP) yang belum lengkap sarana dan prasarannya	terperunya sarana dan prasarana perikanan tangkap, sehingga dapat meningkatkan produksi perikanan tangkap	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000	4.000.000.000
	2. Peningkatan penggunaan teknologi penangkapan ikan	Nelayan tradisional	Meningkatnya penggunaan teknologi penangkapan ikan	-	-	200.000.000	-	250.000.000	250.000.000
	3. Bimbingan penerapan pola dan teknologi eksploitasi sumberdaya non hayati	Nelayan khususnya yang mempunyai armada lebih dari 3 GT	SDI ikan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan	-	-	200.000.000	-	250.000.000	250.000.000

[illegible]

2. Investasi	Komoditi Unggulan	Potensi Kecamatan	Lahan Komoditi	50.000.000	50.000.000	50.000.000	40.000.000	40.000.000	
3. Program Pelayanan Administrasi Umum	Rakornis Tingkat Propinsi Nasional	Sinkronisasi Program dan Kegiatan	Terwujudnya kegiatan yang Sektoral	30.000.000	30.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	
	Koordinasi Penanaman Modal	Program terpadu antara Kabupaten/Propinsi	Terwujudnya program terpadu Kabupaten/Propinsi	40.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	
	SPPISE	1 Paket alat Web Site	Terwujudnya Informasi Komoditi Unggulan	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	200.000.000	
4. Promosi	Expo/ Pameran Investasi	Investor	Tercapai Sasaran Investasi	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	300.000.000	
	Kemitraan	PMU/ PMDN	Terwujudnya CSR	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	
	- Pelatihan Pembinaan Penyusunan LUPM	Terwujudnya peningkatan pengetahuan para pengusaha	70 Orang Perusahaan	125.000.000	125.000.000	125.000.000	150.000.000	150.000.000	
5. Program peningkatan promosi dan kerjasama Investasi	- Penyusunan potensi daerah dan peluang Investasi	Terdapat minat berinvestasi	SPPISE	250.000.000	250.000.000	75.000.000	50.000.000	50.000.000	
	- Promosi dan penanaman modal	Diketahui produk dan Potensi Kabupaten Lampung Selatan	Pameran/ Expo 9 Kali	200.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	250.000.000	
	- Pembinaan dan pengendalian PMU/ PMDN	Terwujudnya pembinaan dan pengendalian PMU/ PMDN Kecamatan	55 perusahaan PMU/ PMDN	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	
6. Potensi Daerah	- Pemetaan		Potensi Wilayah (Lus, Lahan Komoditi Unggulan)	300.000.000	200.000.000	200.000.000	150.000.000	150.000.000	
	- Penyediaan makanan dan minuman	Terwujudnya pemesanan makanan dan minuman	324 Orang (27 x 12) 1 Tahun	8.000.000	8.000.000	10.000.000	10.000.000	12.000.000	
	- Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar Daerah	Terwujudnya pelaksanaan tugas bimbingan	8 Kali	50.000.000	50.000.000	50.000.000	55.000.000	55.000.000	
7. Program pengembangan pelayanan penanaman modal	- Pengembangan informasi potensi Investasi	Terkasuknya pelaksanaan tugas menjadi efektif	Buletin Media	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	90.000.000	
	- Mengingat dan studi pelayanan penanaman modal	Terwujudnya peningkatan pengetahuan	2 Orang BKPM	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	
1. Peningkatan Keajaiban Potensi	a. Pembinaan masyarakat mitra (Siger Mas) b. Saranahan	Petani	- Penurunan tingkat kemiskinan petani - Peningkatan pengetahuan dan keterampilan pengurus GAPOKTAN	150.000.000	165.000.000	181.000.000	199.000.000	209.000.000	BP4K
		Pengurus GAPOKTAN		45.000.000	49.500.000	54.500.000	60.000.000	63.000.000	

2. Pemberdayaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN)	a. Tenu usaha kemitraan b. Bimtek dan Money GAPOKTAN dan penerima PUAP	Pengurus GAPOKTAN GAPOKTAN Penerima PUAP	- Terjadi hubungan kemitraan GAPOKTAN dengan pihak swasta, BUMD dan BUMD serta lembaga keuangan.	150.000.000	165.000.000	181.500.000	200.000.000	210.000.000
3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Pertanian	a. Saran pedesaan b. Promosi dan hasil produk pertanian c. Lomba Desa d. Lomba PK/SS	Masyarakat tani Masyarakat tani pelaku agribisnis Kecamatan Kecamatan	- Terlaksananya siaran pedesaan - Terlaksananya pameran Tk Proptad dan Kabupaten - Terlaksananya lomba desa - Terlaksananya lomba PK/SS	75.000.000	82.500.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000
4. Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian	Penyuluhan, Pemasaran teknologi tepat guna	1. Penyuluh Pertanian 2. Petani	SL PTT/SL PHT SL PTT/SL PHT	200.000.000	275.000.000	325.000.000	425.000.000	525.000.000
5. Peningkatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan	1. Pengadaan perlengkapan penyuluhan 2. Pengembangan Demplok	Penyuluh pertanian	17 BPP Terseleenggaranya 17 unit demplot	800.000.000	750.000.000	775.000.000	810.000.000	850.000.000
6. Pemantapan Sistem Pelatihan Pertanian	Pemantapan kelincahan penyuluh pertanian	Penyuluh Pertanian	Terseleenggaranya magang bagi penyuluh	241.000.000	243.000.000	245.000.000	247.000.000	251.000.000
7. Pemantapan Sistem Penyuluhan Pertanian	Pendidikan dan penguatan kelembagaan penyuluhan a. Pendidikan kelembagaan Penyuluh sesuai dengan UU. NO 16/2008	Penyuluh pertanian	1. Terseleenggaranya sidem LAKU dengan baik 2. Terbentuknya wadah kelembagaan penyuluh pertanian 3. Terpenuhinya satu penyuluh satu desa di 250 desa 4. Terbentuknya sidem informal penyuluh pertanian 5. Tercapainya penyuluh pertanian kelurahan Terseleenggaranya sidem LAKU dengan baik	75.000.000 100.000.000 400.000.000 150.000.000 25.000.000 150.000.000	82.500.000 105.000.000 420.000.000 165.000.000 37.500.000 165.000.000	90.000.000 110.000.000 440.000.000 181.000.000 50.000.000 181.000.000	100.000.000 115.000.000 460.000.000 196.000.000 70.000.000 196.000.000	110.000.000 120.000.000 480.000.000 208.000.000 83.000.000 208.000.000
8. Pemberdayaan Kelembagaan Petani dalam Usaha Tani	a. Pemberdayaan kelompok tani	1. Kelompok Tani	- Terseleenggaranya pelatihan kelas kemitraan kelompok	75.000.000	82.500.000	90.000.000	100.000.000	110.000.000
		2. GAPOKTAN	- Terlaksananya kemitraan GAPOKTAN di 17 BPP	50.000.000	65.000.000	81.500.000	90.000.000	100.000.000

[illegible]

[illegible]

|--|

[illegible]

[illegible]

8. Peningkatan Efisiensi Penanganan Panen dan Pasca Panen Padi	Terdapatnya efisiensi penanganan panen dan pasca panen padi	menurunnya angka kehilangan hasil padi dari 13,36% menjadi 12,50%	25.000.000	30.000.000	40.000.000	50.000.000	50.000.000
9. Rehabilitasi Pengaliran Padi Scaled Kecil	Berjalannya usaha pengaliran padi scaled kecil	Terdapat dan terbunnya usaha pengaliran padi scaled kecil	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
10. Pengembangan Usaha Pengaliran, Pergudangan dan Kemiripan Padi/Jagung	Berkembangnya usaha pengaliran dan pergudangan padi jagung	Berjalannya usaha pengaliran dan pergudangan padi jagung setiap panen raya	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000
11. Pengembangan Agribudaya dan Lembaran Lupa-lupaun berbas sumber daya lokal	Berkembangnya agribudaya lupa-lupaun berbas sumber daya lokal	Terdapatnya cluster agribudaya lupa-lupaun (moca) yang terdiri dari 4 kelompok tani	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
12. Pengembangan rumah kompos	- Kelompok tani yang memiliki potensi untuk dikembangkan rumah kompos di 17 Kecamatan	Terdapatnya rumah kompos di 17 kecamatan	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000	400.000.000
13. Peningkatan produksi Produktifitas dan mutu produk tanaman sayuran	- Daerah sentra produksi tanaman pangan dan hortikultura	Terdapatnya jumlah kompos yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan kelompok tani dan luas areal tanaman pangan dan hortikultura	500.000.000	550.000.000	600.000.000	650.000.000	700.000.000
14. Peningkatan Produksi Produktifitas dan mutu produk tanaman buah-buahan	Meningkatnya produksi produk Sayur, dan mutu produk tanaman buah-buahan	Pengembangan kawasan tanaman sayur seluas 10 ha	250.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000
15. Pengembangan alat mesin pertanian	Pemerintah/kelompok tani	Fasilitas alat mesin : Hand Traktor Power Thresher Pompa Air dan Corn Seler	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
16. Rehabilitasi Jaringan Irigasi desa (JIDES)	Irigasi pedesaan	Terdapatnya perbaikan irigasi pedesaan	200.000.000	300.000.000	400.000.000	450.000.000	500.000.000
17. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT)	Irigasi di tingkat usaha tani	Terdapatnya perbaikan irigasi di tingkat usaha tani	300.000.000	400.000.000	500.000.000	550.000.000	600.000.000
18. Pembinaan Embung	Lahan sawah tadah hujan	Terdapatnya Air di muatir kemarau	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000
19. Lomba PSA	PSA	Terdapatnya peningkatan SDM melalui lomba PSA	50.000.000	750.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000

				Lahan-lahan produksi pertanian	Terdapatnya jalan usaha tani untuk kelancaran produksi pertanian Mengembalikan kesuburan lahan kritis	100.000.000	200.000.000	300.000.000	400.000.000	500.000.000
				Lahan-lahan kritis		50.000.000	100.000.000	150.000.000	200.000.000	250.000.000
				Berkembangnya Agroindustri dan kemitraan tanaman pangan dan hortikultura (komoditas pisang)	Terbangunnya grading & packaging house di 2 kecamatan	30.000.000	350.000.000	40.000.000	45.000.000	50.000.000
				Berkembangnya STA/pasar tani dan pasar belang	Beroperasinya STA diklatibung sebagai pasar tani	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
				Berkembangnya sistem informasi pasar komoditas strategis	Terpentangnya dan terselarnya informasi pasar komoditi strategis di 17 kecamatan	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000
				Terselenggaranya promosi, etsebel dan persembaan	Ruf sertanya dalam kegiatan pameran dan promosi	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
				Terlaksananya pengembangan kawasan hortikultura di daerah aliran sungai (DAS)	Berkembangnya kawasan di DAS seluas 25 ha	500.000.000	525.000.000	550.000.000	575.000.000	600.000.000
				Terbangunnya kebun bibit buah-buahan di 5 lokal	Terbangun kebun bibit buah-buahan di 5 lokal	100.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	225.000.000
				Berkembangnya kelembagaan agribisnis hortikultura	Terlaksananya pendirian retail komoditas hortikultura di daerah sentra produksi	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000	40.000.000
				Bertumbuh dan berkembangnya usaha pengolahan dan pemasaran hasil pertanian di LMG	Terpentangnya kondisi usaha lembaga yang memperoleh bantuan LMG dari pusat	15.000.000	20.000.000	25.000.000	30.000.000	35.000.000
				Terlaksananya magang sekolah lapang GAP/SOP tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan	Terlaksananya magang sekolah lapang GAP/SOP tanaman sayuran dan tanaman buah-buahan (4 kali)	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
				Terlaksananya pelatihan administrasi keuangan bagi petugas dan pelaku usaha agribisnis hortikultura	Terlaksananya pelatihan administrasi keuangan bagi petugas dan pelaku usaha agribisnis hortikultura	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000	100.000.000
				Pelatihan terhadap petani penerima bantuan skema	Pelatihan kelompok tani dapat memahami pentingnya skema	200.000.000	300.000.000	350.000.000	400.000.000	450.000.000
				- Petani - Manajer UPJA - Operator Alatan						

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4. Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Pembangunan pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	Pengadaan lingkungan wisatawan ke pulau sebelah Gunung Krakatau	Meningkatkan PAD sektor pariwisata. Adanya kapal wisata ke pulau sebelah, Gunung Krakatau, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya meningkatkan kepuasan wisatawan	400.000.000	-	-	-	-	-	-
		Pengadaan Alet Dukung Pengadaan Rambu-rambu petunjuk objek wisata Pengembangan Web-site dan profil Daerah Pembuatan Tapis Wisata Alam Gunung Raja Basa	Adanya petunjuk bagi wisatawan Periklanan iklan promosi dan proses promosi Adanya Sarana Wisata Alam	75.000.000	-	600.000.000	-	300.000.000	300.000.000	-
5. Pengembangan Kermas	1. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Data Base	1. Kajian ulang terhadap Penyusunan RPPDA 2. Pembuatan Rencana Detail Kawasan pengembangan Pariwisata (RDKP) Kepulauan Krakatau 3. Pembuatan Rencana Detail Kawasan Pengembangan Pariwisata (RDKP) Gunung Raja Basa 4. Pembuatan Rencana Teknis Objek Wisata (RTOW) Pulau Sebel 5. Pembuatan Rencana Teknis Objek Wisata (RTOW) G.Raja Basa	Adanya Strategi program pengembangan pariwisata daerah Adanya Detail pengembangan kawasan pariwisata Adanya Detail pengembangan kawasan pariwisata alam Adanya Rencana Teknis Objek Wisata Adanya Rencana Teknis Objek Wisata Adanya Rencana Teknis Objek Wisata	250.000.000	-	400.000.000	-	-	-	-
		2. Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Bidang Pariwisata 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pariwisata	Adanya Pemandu Wisata Adanya Pemandu Wisata Adanya Pemandu Wisata Meningkatnya dampak pariwisata terhadap masyarakat dan pariwisata Adanya Pemandu Wisata Meningkatnya dampak pariwisata terhadap masyarakat dan pariwisata Adanya Pemandu Wisata Meningkatnya dampak pariwisata terhadap masyarakat dan pariwisata	35.000.000	35.000.000	50.000.000	230.000.000	35.000.000	50.000.000	280.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

Pengembangan Insentif bagi guru di daerah terpencil	Bantuan Sekolah Pemenuhan Lomba UKS Tingkat Nasional	Sekolah	Pembinaan Keolahragaan	27.500.000	30.250.000	33.275.000	36.802.500
Pelatihan keterampilan berorientasi lapangan pekerjaan	Rehab gedung SD	Sekolah/Unit	Peningkatan Sarana	1.500.000.000	1.815.000.000	1.998.500.000	2.196.150.000
	USB SD	5 Unit	Peningkatan Sarana	300.000.000	363.000.000	398.300.000	439.230.000
	Rehab gedung TK	45 Ruang	Peningkatan Sarana	180.000.000	198.000.000	229.580.000	263.538.000
	Bantuan Alat Bermain TK	50 Sekolah	Peningkatan Sarana	180.000.000	217.800.000	239.580.000	263.538.000
Pengembangan standar pelayanan minimal (SPM) pendidikan	USB SMP	12 Sekolah	Peningkatan Sarana	350.000.000	423.500.000	465.850.000	512.435.000
	Dana Akadik Khusus (DAK) SDN	478 Sekolah	Peningkatan Sarana dan Prasarana	26.884.800.000	32.851.808.000	35.916.788.000	39.508.445.880
	Dana Akadik Khusus (DAK) SMP	136 Sekolah	Peningkatan Sarana dan Prasarana	2.895.750.000	3.503.857.500	3.854.243.250	4.239.887.575
	SMP Satu Atap	12 Sekolah	Peningkatan Sarana	200.000.000	242.000.000	268.200.000	292.820.000
Bidang kesehatan :	Ruang Kelas Baru SMP	136 Ruang	Peningkatan Sarana	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
Pelayanan kesehatan gratis	Pembangunan Ruang Lab I P A SMP	136 Ruang	Peningkatan Sarana	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
Peningkatan Puskesmas	Pengadaan Sarana Lab I P A SMP	135 Ruang	Peningkatan Sarana	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
menjadi Puskesmas rawat inap	Pembangunan Ruang Lab T I K SMP	136 Ruang	Peningkatan Sarana	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
	Rehab Gedung SMP	136 ruang	Peningkatan Sarana	480.000.000	480.000.000	480.000.000	480.000.000
Peningkatan Puskesmas keliling	Pengadaan Sarana Lab T I K SMP	136 Sat	Peningkatan Sarana	1.620.000.000	1.620.000.000	1.620.000.000	1.620.000.000
	(@ Rp. 80.000.000,-)						
Pengembangan insentif bagi dokter di daerah terpencil	Pendampingan Sekolah Unggulan SD 5 sekolah per tahun	25 sekolah	Peningkatan Sarana	250.000.000	-	-	-
	Pendampingan Sekolah Unggulan SD 5 sekolah per tahun	25 sekolah	Peningkatan Sarana	250.000.000	-	-	-
Pengembangan standar pelayanan minimal (SPM) kesehatan	Pembangunan Perpustakaan SMP	135 Sekolah	Peningkatan Sarana	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000	2.700.000.000
	PAKEM (peserta 17 Kecamatan : stakis holder, SD dan SMP)	5 Tln	Peningkatan Mutu Pendidikan	750.000.000	750.000.000	750.000.000	750.000.000
Bidang kesejahteraan sosial :	Olimpiade Sains Nasional SD (OSN SD)	5 Tln	Peningkatan Keolahragaan	200.000.000	242.000.000	268.200.000	292.820.000
	Olimpiade Sains Nasional SMP (OSN SMP)	5 Tln	Peningkatan Keolahragaan	200.000.000	242.000.000	268.200.000	292.820.000
Pengembangan jernihan sosial untuk masyarakat miskin (Akseskin, BLM, dll)	Lomba Guru, Kepala Sekolah, Pengawas TK, SD dan Berprestasi	5 Tln	Peningkatan Mutu Pendidikan	150.000.000	181.500.000	198.650.000	219.815.000
	Bantuan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Dasar (UANSD SD)	5 Tahun	Peningkatan Mutu Pendidikan	950.000.000	1.148.500.000	1.284.450.000	1.390.865.000
Pengembangan olahraga berprestasi	Ujian Akhir Sekolah SMP	5 Tahun	Peningkatan Mutu Pendidikan	750.000.000	907.500.000	998.250.000	1.098.075.000
	Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLSSN)	5 Tahun	Peningkatan Keolahragaan	150.000.000	181.500.000	198.650.000	219.815.000
	Pelatihan KTSP, SD dan SMP	5 Tahun	Peningkatan Mutu Pendidikan	150.000.000	181.500.000	198.650.000	219.815.000
	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah	5 Tahun	Peningkatan Mutu Pendidikan	150.000.000	181.500.000	198.650.000	219.815.000
	Pelatihan Peningkatan Kompetensi Guru TK, SD, SMP	5 Tahun	Peningkatan Mutu Pendidikan	150.000.000	181.500.000	198.650.000	219.815.000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

			Jambore PTK-PNFI Bantuan operasional Kegiatan Paket A	Pendidikan Non Formal Paket A	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	45.000.000	48.500.000	54.650.000	59.895.000	65.894.500
			Bantuan operasional Kegiatan Paket B	Paket B	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	220.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000	368.025.000
			Bantuan operasional Kegiatan Paket C	Paket C	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	220.000.000	275.000.000	302.500.000	332.750.000	368.025.000
			Bantuan Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket A	Ujian Paket A	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000	218.815.000
			Bantuan Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket B	Ujian Paket B	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	175.000.000	192.500.000	211.750.000	232.925.000	258.217.500
			Bantuan Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C	Ujian Paket C	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	200.000.000	220.000.000	242.000.000	268.200.000	292.820.000
			Sosialisasi Penyelenggara dan Tutor Paket A, B, C	Sosialisasi Paket A, B, C	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	150.000.000	150.000.000	165.000.000	181.500.000	199.650.000
			Belanja Operasional Rutin Sekolah TK, SMP, SMA, SMK Negeri : 71 Sekolah	5 Tahun	Peningkatan Administrasi Perkantoran	2.500.000.000	2.750.000.000	3.025.000.000	3.327.500.000	3.660.250.000
			Belanja Operasional Unit Pelaksana Teknis Daerah (LPTD) untuk 17 Kecamatan	5 Tahun	Peningkatan Administrasi Perkantoran	170.000.000	187.000.000	205.700.000	228.270.000	248.897.000
			Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5 Tahun	Peningkatan Administrasi Perkantoran	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.820.000	29.292.000
			Pelaksanaan Sertifikasi pendidik : 653 Guru/Tahun	3285 orang	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	1.305.000.000	1.438.600.000	1.590.260.000	1.738.298.000	1.912.114.600
			Sosialisasi Sertifikasi Guru : 653 Guru/Tahun (3.265 Guru)	5 Tahun	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	35.000.000	38.500.000	42.350.000	46.595.000	51.243.500
			Lomba Guru, Kepala Sekolah dan Pengawas Sekolah Berprestasi	5 Tahun	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	20.000.000	22.000.000	24.200.000	26.820.000	29.292.000
			Pendidikan Lanjutan bagi Pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (SI PGSD) : 1.318 Guru/tahun	6.591 Guru	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	2.039.400.000	2.900.040.000	3.190.044.000	3.506.048.400	3.859.653.240
			Updating Profil Pendidikan dan PADATI WEB	5 Tahun	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	175.000.000	192.500.000	211.750.000	232.925.000	258.217.500
			Updating NUPTK dan Pencetakan Kartu NUPTK	19333 Siswa Kelas I	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	350.000.000	385.000.000	423.500.000	465.650.000	512.435.000
			Pencetakan kartu Nomor Induk Siswa Indonesia	48.877 Siswa Kelas I	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	748.155.000	822.970.500	905.287.550	995.794.305	1.095.373.798
			Penilaian Kinerja Sekolah (RS, SMP, SMA, SMK)	5 Tahun	Peningkatan Pelayanan Pendidikan	350.000.000	385.000.000	423.500.000	465.650.000	512.435.000

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]

	Pengembangan pusat informasi konseling (PK) remaja mahasiswa jalur sekolah	Meningkatkan kemampuan Adesampian Resilience (life skill) bagi pengelola PK remaja / PK mahasiswa	80 org x 3 kegiatan	14.156.500	14.156.500	14.156.500	14.156.500	14.156.500	BADAN PP & KB
	Aktivasi program perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR)	Adanya dukungan terhadap pelaksanaan program perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja (PKBR) dari berbagai pihak	40 orgx1 keg. Insidial terkait, Tih masyarakat LSM, Org kepemudaan Tk. Kab. Kel PK Rny/ Mahasiswa	8.850.000	8.850.000	8.850.000	8.850.000	8.850.000	
	Sosialisai program penyajian kehidupan berkeluarga bagi remaja	1. Menambah pengetahuan dan pemahaman remaja tentang kesehatan reproduksi 2. Membantu remaja agar memiliki pengetahuan, kesadaran sikap dan perilaku kehidupan yg sehat dan bertanggung jwb	60 org x 3 kaliada	17.698.000	17.698.000	17.698.000	17.698.000	17.698.000	
	Pembinaan program penyajian kehidupan berkeluarga bagi remaja untuk pelepasipenyuluh KB	Meningkatnya pengetahuan dan pemahaman petugas/penyuluh KB tentang program penyajian kehidupan berkeluarga bagi remaja	65 orang x 2 lag	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	14.500.000	
	Penerangan KB / KS melalui unit mobil penerangan	Terperluasnya perubahan sikap dan prilaku positif masyarakat dan keluarga terhadap pendng nya program KBKS	Meningkatnya pengetahuan masyarakat tg prog. KB menguji TFR	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
	Pekan promosi program KBKS dan gelanggang dugang produk UPPKS	Tertaksananya pengendalian kemitran dalam peningkatan kesjahteraan keluarga akseptor KB dipedesaan khusus nya kelompok UPPK	Meningkatnya kesejahteraan	45.000.000	55.000.000	65.000.000	75.000.000	85.000.000	
2. Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Tertaksananya peningkatan kesejahteraan keluarga akseptor mediai pemberdayaan keluarga	Terbentuknya kelompok UPPKS	550.000.000	650.000.000	750.000.000	850.000.000	950.000.000	
	Sosialisai program bina keluarga TKI / TKW	Terdajutnya peningkatan kesejahteraan keluarga TKU/TKW dan tumbuhnya keasfaktasan sosial dalam wadah keluarga	Terbentuknya kelompok Bina keluarga TKUTKW	55.000.000	65.000.000	75.000.000	85.000.000	95.000.000	
3. Koordinasi Kegiatan peningkatan kualitas anak dan perempuan	Pencerahan 1 desa layak anak Operasional Ramah Pndar	Warga desa Anak-anak	Terdajutnya Desa Ramah Anak layamat dan Terlalinya Anak-anak dalam memenuhi hak-hak mereka terhadap pendidikan dan keberampilan	-	110.000.000	120.000.000	130.000.000	140.000.000	
1. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Bumil, Bayi dan Anak Balita	24 Puskesmas, 885 Posyanbu, 251 Desa (100%)	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	DINAS KESEHATAN

JAMKESDA SEMESTA bagi penduduk Kab. Lam - sel	Seluruh Penduduk Kab. Lam - Sel yang tidak masuk jamkesmas, asdes /kubari	Lintas Program & Lintas Sektoral	bersasar di kab. Lam-Sel	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
Operasional Pelaksanaan Program JAMKESMAS Kab.Lamsei Pelayanan Kesehatan Uraha Kesehatan Sekolah (UKS) Pelayanan Kesehatan Ulaia Pendataan dan Pembinaan Sarayakes Swasta dan pemeritrah	Operasional Pelaksanaan Program JAMKESMAS Kab.Lamsei Pelayanan Kesehatan Uraha Kesehatan Sekolah (UKS) Pelayanan Kesehatan Ulaia Pendataan dan Pembinaan Sarayakes Swasta dan pemeritrah	Lintas Program & Lintas Sektoral Puskesmas TK, SD, SMP dan SMA, Mund SMP dan SMA Posyandu Ulaia Saranyakes Swasta dan Pemeritrah	Dinas Kesehatan Salahsah di wll kerja 24 Puskesmas 360 Posyandu 24 PKM (100 %)	50,000,000 120,000,000 90,000,000 90,000,000	50,000,000 120,000,000 90,000,000 90,000,000	50,000,000 120,000,000 90,000,000 90,000,000	50,000,000 120,000,000 90,000,000 90,000,000	50,000,000 120,000,000 90,000,000 90,000,000
Sosialisasai Pembuidan Peritiran Profesi Kesehatan, Apotik, RS dan Toko Obat	Apotik, Toko Obat dan Rumah Bersalin	Apotik, Toko Obat dan Rumah Bersalin	24 Pkm (100 %)	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000	140,000,000
Pengadaan Obat dan Perbiduan Kesehatan	Seluruh Puskesmas se Kabupaten Lampung Selatan	Seluruh Puskesmas se Kabupaten Lampung Selatan	24 Pkm (100 %)	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
Penyuluhan Pencegahan Penyakitans NHPZA	Mund SLTP dan SLTA	Mund SLTP dan SLTA	4 sekolah (100 Mund) (100%)	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000	35,000,000
Razia Pengaman sedisan Farmasi dan makanan	Saraya Perjual Sedisan Farmasi dan Makanan	Saraya Perjual Sedisan Farmasi dan Makanan	15 Kecamatan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Pengembangan Obat sel Indonesia	Puskesmas dan Desa Melin	Puskesmas dan Desa Melin	24 Puskesmas, 10 desa melin	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000	120,000,000
Pelatihan Kader TOGA dan Stimulan Tanaman Obat herbal	Kader Toqa di Desa Melin	Kader Toqa di Desa Melin	10 Desa Melin	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Upaya Kesehatan Masyarakat	Pelugas Puskesmas dan Masyarakat	Pelugas Puskesmas dan Masyarakat	24 Puskesmas 480 KK	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000	550,000,000
Peningkatan Pelayanan di dalam Gedung dan Luar gedung	Seluruh Puskesmas dan Pusat	Seluruh Puskesmas dan Pusat	24 Pkm (100 %)	980,000,000	980,000,000	980,000,000	980,000,000	980,000,000
Peningkatan Pelayanan di Puskesmas	Puskesmas	Puskesmas	95 Puskesmas	460,000,000	460,000,000	460,000,000	460,000,000	460,000,000
Peningkatan dan Pengembangan Komodita dan Alat - alat Kesehatan	Apotik, Toko Obat dan Pusat	Apotik, Toko Obat dan Pusat	4 Kecamatan	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Pengasaan Obat dan Makanan	Puskesmas dan Desa Melin	Puskesmas dan Desa Melin	24 Puskesmas 10 Desa Melin	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000
Pengembangan Jaringan SKK	Seluruh Puskesmas	Seluruh Puskesmas	15 Puskesmas	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000
Pelayanan Kesehatan Daerah Kepidaur dan terpenditrah	Daerah terpendil	Daerah terpendil	3 kelual	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000	75,000,000
Peninggudangan Kital kesehatan Kab.Lampung Selatan	Lokali rawan bencana	Lokali rawan bencana	10 lokai	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000	350,000,000
Penyusunan Profil Kesehatan	Lintas Program dan Lintas Sektoral	Lintas Program dan Lintas Sektoral	80 Buku Profil	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000	95,000,000

[illegible]

		Bakos Kibaran Masal HKN	Masyarakat 5 Kecamatan Kab. Lampung Selatan	5 Kecamatan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
		Pembinaan Evakuasi Kinerja dan PTP Puskesmas	24 Puskesmas	Puskesmas	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000	70.000.000
		Bantuan Transport Iurungan Rumah untuk masyarakat (Program PHN) untuk risiko tinggi, keluarga rawan, tidak terlayat pemukiman	Semua Masyarakat di Kabupaten Lampung Selatan	480 KK	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		Berikah Program Terpadu yanke dasar	Puskesmas	24 Puskesmas	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000
		Bantuan Transport Perawatan kasus Jawa di Puskesmas	Puskesmas	24 Puskesmas	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000
		Sosialisai Program Kesehatan Jene	Puskesmas	24 Puskesmas	36.000.000				
		Perencanaan Pengelolaan Program Kesehatan Gizi dan Mukt	Kabupaten	24 Puskesmas	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000	26.000.000
		Bantuan Transport Pelugas untuk kegiatan usaha kesehatan ggi masyarakat Desa	Pengadu	Puskesmas	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
		Pembangunan Gedung Puskesmas Rawat Inap	Tanjung Bintang, Slatunyo, Kalbung, Baktuhent, Stagi	5 unit	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
		Pembangunan Gedung UPT Laboratorium Kesehatan Daerah	Dinas Kesehatan	1 unit	500.000.000				
		Pembangunan Gedung Indikasi UPT Indikasi Farmasi	Dinas Kesehatan	1 unit	2.000.000.000				
		Pengembangan Pusat menjadi Puskesmas Induk	Pawotani, Way Galih, Sinar Palimbang, Baldi Rana, Keiling, Pematang pasir, Merak belitung	7 unit	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000	3.000.000.000
		Rehabilitasi Total Puskesmas Induk	Puskesmas	6 Unit	4.500.000.000	4.500.000.000			
		Rehabilitasi Pusat	Pustu	25 Unit	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
		Rehabilitasi Rumah Medis dan Paramedis	Puskesmas	13 unit	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
		Pengadilan Alas Kesehatan Puskesmas Rawat Inap dan Poned	Puskesmas Rawat Inap	5 paket	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000	1.500.000.000
		Pengadilan Alas Puskesmas Induk	Puskesmas	30 paket	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
		Pengadilan Alas Puskesmas Pembantu	Pustu	60 paket	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000
		Pengadilan Alas Puskesmas	Puskesmas	125 paket	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000	1.250.000.000
		Pengadilan Alas Labenda	Orkes	1 paket	500.000.000				

[illegible]

	Pelatihan tenaga perawat Pelatihan perawat peristologi pelatihan laboratorium histopatologis Pelatihan Radiologi Lokas/Nasional Pelatihan IPRS, IPAL, Incenerator, IPRS			- 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000	40.000.000 - - - -	- 10.000.000 10.000.000 20.000.000 10.000.000	- - - - -	- - - - -	RSDJ Kallanda
Peningkatan Mutu Pelayanan Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit 2011 Rumah Sakit ke Badan Layanan umum Pelayanan Publik	Meningkatkan mutu pelayanan pada Standar Pelayanan Minimal pada RSUD Kallanda		500.000.000 200.000.000 100.000.000	- - -	- - -	- - -	- - -	RSDJ Kallanda
Program Keluarga Berencana	Pelayanan KB keliling (TKBK) Binaid Ikatan Bidan Indonesia (IBI) Lomba KB lingkungan Perusahaan Sosialisasi PMTCT (Pencegahan Penularan dari Ibu hamil terhadap bayi yang dikandung) Operasional pelayanan KB melalui TLKK Operasional pelayanan KB melalui kearak PKK KB Kes Penerangan KB / KS melalui unit mobil penerangan Pekan promosi program KBKS dan gejanggang dengan produk UPPKS	Terpenuhnya capaian peserta KB baru dan terbantu peserta KB aktif serta capaian kebutuhan wilayah khusus Tercaipainya cakupan pelayanan KB baru dan peserta KB aktif serta peningkatan peran IBI dalam pelayanan KB Pemantapan komitmen dan operasional serta pembinaan peserta KB aktif di lingkungan perusahaan Pengelola program KB bidan dan PLKB Terpenuhnya capaian peserta KB baru dan peningkatan keterpaduan pengajaran program KB Kesehatan Terpenuhnya pencapaian pencapaian program PKK KB Kesehatan Terpenuhnya perubahan sikap dan prilaku positif masyarakat dan keluarga terhadap penting nya program KBKS Terlaksananya penggalangan kemitraan dalam peningkatan kesejahteraan keluarga akseptor KB dipedesaan khusus nya kelompok UPPK	40.300 akseptor baru 3.700 akseptor KB baru 80 % karyawan PLUS menjadi peserta KB aktif 50 Orang x 2 tug Adanya kegiatan yg terkoordinasi lintas sektor Adanya kegiatan yg terkoordinasi lintas sektor Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang program KB mengaji TFR Meningkatnya kesejah	149.575.000 15.300.000 18.500.000 - 35.000.000 25.000.000 15.000.000 15.000.000	179.475.000 21.460.000 13.500.000 18.100.000 40.000.000 30.000.000 20.000.000 20.000.000	179.475.000 21.460.000 18.500.000 19.100.000 45.000.000 50.000.000 40.000.000 35.000.000 25.000.000 20.000.000	191.375.000 21.460.000 18.500.000 19.100.000 55.000.000 45.000.000 35.000.000 30.000.000 25.000.000 35.000.000	BADAN PP & KB	

	Pembinaan Teknis Kader Kesehatan	Kader Kesehatan se kab. Lam. Sei	Terbينanya Kader Kesehatan agar dapat menjadi kader terampil di bidang kesehatan dan terbentunya kemandirian kader dalam menangani permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat (181 Desa)	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	RSUD Kallanda
	Pembiayaan Saka Bhakti Husada (SBH)	Kesran dan Kesraab Lam Sei	17 KWARAN, 1 KWARCAB	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-
	Pembelajaran Masyarakat di Desa tertinggal	Desa Tertinggal / Mabin	Meningkatnya kemandirian masyarakat bidang kesehatan di desa tertinggal / diselesaikan dengan SK Bupati (30 Desa tertinggal)	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	1.000.000.000	-
	Penyusunan LPPD, LUPJ dan LUKIP	Lintas Program dan Lintas Sektor Tertarik (Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Pemdes dan BPKP)	3 Paket Penyusunan LPPD, LUPJ dan LUKIP	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	85.000.000	-
	Penyusunan RKA - SKPD	Lintas Program dan Lintas Sektor Tertarik (Bappeda, Badan Keuangan Daerah, Pemdes)	1 Paket Penyusunan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	-
	Pelatihan Tenaga Inventarisasi Barang	Tenaga Inventarisasi Barang	46 Pelugas Puskesmas dan 2 Pelugas Dinas Kesehatan	55.000.000	-	-	-	-	-	-
	Pelatihan Tenaga Pengelola Keuangan Puskesmas	Bendahara Operasional Puskesmas	24 Pelugas Puskesmas	35.000.000	-	-	-	-	-	-
	Pembekalan Calon Pegawai baru Analisis Pembelian Kesehatan (OH-Medical Health Account) Evaluasi Pasca Pelatihan	Dokter, Bidan, Perawat dan Lintas Program dan Lintas terkait	30 Pelugas 1 Paket Penyusunan DHA	25.000.000 50.000.000	25.000.000 50.000.000	25.000.000 50.000.000	25.000.000 50.000.000	25.000.000 50.000.000	25.000.000 50.000.000	-
	Pelayanan administrasi pertukaran	Pelugas Puskesmas dan Dinas kesehatan	30 Pelugas	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	-
	Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan	(Kantor Dinas Kab. Lam - Sei)	100%	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	450.000.000	-
	Peningkatan Pelayanan Laboratorium	Pelugas di Kabupaten dan Puskesmas	100%	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-
	Peningkatan UPTD Balai Laboratorium Kesehatan	Dinas Kab.LS	100%	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	-
	Program Kemitraan Peningkatan	10 orang 5 orang 12 orang 12 orang	Meningkatkan Pengetahuan & Keterampilan Pelugas RSUD Kallanda	- 5.000.000 40.000.000 20.000.000	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	-

				Sosialisasi UU No 44 Th 2008 tentang Pemografi	Dinas/Instansi, Ormas, Persewaan, LSM Persewaan dan antar, Sore SMA dan SMP	Terwujudnya peningkatan pengetahuan tentang pemografi	-	-	50.000.000	50.000.000	KPTSP
7.	Mewujudkan Pemerintahan Yang bersih, Berkeadilan Kemitraan dan bertata kelola yang baik	Peningkatan pelayanan dan administrasi masyarakat Peningkatan dana pembangunan desa Peningkatan dana pembangunan desa Peningkatan insentif perangkat desa Penyediaan tenaga kesehatan Pengembangan bisnis berbasis disiplin dan etika Pengembangan bisnis berorientasi kemitraan Pengembangan energi pembangunan antar daerah	3. Peningkatan PAD di bidang Perizinan	- Monitoring dan Evaluasi Data Perizinan Usaha di Kabupaten Lampung Selatan - Pembinaan Terpadu Tim Teknis Dinas/ Instansibidang Perusahaan Menengah dan besar - Pengembangan Sistem Layanan Perizinan dibidang Pemukiman Lokal Kegiatan Usaha - Pembuatan Program Aplikasi SIM Perizinan SPRTSP - Pemeliharaan Sistem Informasi Perizinan	Validasi data perizinan usaha di Kantor Koordinasi dan pengawasan dinas/instansi terkait terhadap pengusaha di Lampung Selatan Terjadinya pemetaan dunia usaha di Kab.lampung selatan Terwujudnya Pelayanan Publik yang cepat, mudah, Transparan dan Prati Mempercepat Proses Perizinan (meminimalisir kendala-kendala dalam Proses Pembuatan bhn). terwujudnya realisasi PAD	Melakukan monitoring dan evaluasi data perizinan Melakukan pembahasan dinas/instansi terkait ttg pengajuan perizinan Terdapatnya data pemetaan dunia usaha Melaksanakan Aplikasi SIM dan Pelatihan Pengurusan Sistem Informasi Terpeliharanya sarana dan prasarana SIM meningkatkan penerbitan dari PAD terlalu SPZD Terlalu SPZD gaji dan lembt nya SKPP pegawai Terlalu Bilyet Giro Peningkatan Program Keuangan yang tepat dan Efisien	75.000.000 70.000.000 50.000.000 182.000.000 37.000.000 1.000.000.000 118.000.000 298.494.000 250.000.000 300.000.000	82.000.000 77.000.000 50.000.000 -	87.000.000 84.000.000 50.000.000 -	94.000.000 91.000.000 50.000.000 -	101.000.000 98.000.000 50.000.000 -
		1. Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2. Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah 3.Peningkatan & pengembangan pengelolaan keuangan daerah 4. Peningkatan & Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	intensifikasi dan standarisasi peningkatan pengelolaan administrasi pembendaharaan peningkatan pengelolaan administrasi belanja pegawai Peningkatan Pengelolaan Kas Daerah Pengembangan system Pengelolaan Keuangan Daerah	terwujudnya realisasi PAD meningkatkan tingkat pelayanan administrasi pengelolaan keuangan daerah meningkatkan pelayanan administrasi keuangan Meningkatnya Pelayanan Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terdapatnya System Administrasi Keuangan Daerah yang lebih dan Efisien	meningkatkan penerbitan dari PAD terlalu SPZD Terlalu SPZD gaji dan lembt nya SKPP pegawai Terlalu Bilyet Giro Peningkatan Program Keuangan yang tepat dan Efisien	1.000.000.000 128.000.000 313.494.000 270.000.000 50.000.000	1.000.000.000 138.000.000 328.494.000 280.000.000 50.000.000	1.000.000.000 148.000.000 343.494.000 310.000.000 50.000.000	1.000.000.000 158.000.000 358.494.000 330.000.000 50.000.000	1.000.000.000 158.000.000 358.494.000 330.000.000 50.000.000	DPPKAD

5. Program Penelitian dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	SKPD, TAPO, Pengawas, Auditor, Depdagri, Depkeu	Tersusunnya Buku Perda APBD sebagai Dasar Pengeluaran	333.802.150	350.492.200	368.016.800	386.417.800	405.738.400	
	Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang perubahan APBD	SKPD, TAPO, Pengawas, Auditor, Depdagri, Depkeu	Tersusunnya Buku Peraturan KDH tentang Perubahan APBD sebagai Dasar Pelaksanaan	131.670.000	138.253.500	145.166.175	152.424.400	160.045.600	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD	SKPD, TAPO, Pengawas, Auditor, Depdagri, Depkeu	Tersusunnya Buku Perda APBD sebagai Dasar Pelaksanaan	210.606.550	221.136.800	232.193.600	243.803.200	255.963.300	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan APBD	SKPD, TAPO, Pengawas, Auditor, Depdagri, Depkeu	Tersusunnya Buku Peraturan KDH tentang Perubahan APBD sebagai Dasar Pelaksanaan	131.670.000	138.253.500	145.166.175	152.424.400	160.045.600	
6. Penyusunan Laporan Triwulan	Penyusunan Sistem dan Prosedur Penyusunan APBD dan Pedoman Pelaksanaan APBD	SKPD, TAPO, Pengawas, Auditor	1. Tersusunnya Perbup Sebidur Penyusunan Perubahan APBD 2. Tersusunnya Perbup Pedoman Pelaksanaan Perubahan APBD 3. Tersusunnya Perbup Sebidur Penyusunan APBD 4. Tersusunnya Perbup Pedoman Pelaksanaan APBD	310.548.000	328.075.400	342.379.100	359.468.000	377.472.800	
	Penyusunan Laporan Triwulan	SKPD, TAPO, Pengawas, Auditor, Kemendagri, Kemendik	Tersusunnya Buku Laporan Triwulan Kabupaten Lampung Selatan	163.248.000	179.623.400	187.585.740	217.344.314	228.078.745	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Bencana APBD	SKPD, TAPO, Pengawas, Auditor, Kemendagri, Kemendik	Tersusunnya Buku Perda tentang Penanggulangan Bencana APBD sebagai Laporan Penanggulangan	187.394.000	208.122.400	228.734.640	249.408.104	274.348.914	
	Penyusunan Rancangan Peraturan Bupati	SKPD, TAPO, Pengawas, Auditor, Kemendagri, Kemendik	Tersusunnya Buku Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD sebagai Laporan Penanggulangan	72.033.000	79.236.300	87.159.630	95.875.923	105.483.515	

9. Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD	SKPD, TAPD, Pengawas, Auditor	Terciptanya Penyusunan Laporan Keuangan SKPD yang Transparan dan Akuntabilitas	88.968.000	98.997.800	108.697.580	119.787.338	131.786.071
10. Peningkatan Pengembangan Pengeloaan Keuangan Daerah	Penyusunan Buku Laporan Milik Daerah (LBMD)	Seluruh SKPD se Kab. Lam-Sel	Buku Inventaris Barang Milik Daerah	322.220.000	335.420.000	228.020.000	348.620.000	309.020.000
11. Peningkatan Sarana dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Penyusunan Standar Satuan Harga	Seluruh SKPD se Kab. Lam-Sel	-	250.000.000	260.000.000	250.000.000	240.000.000	235.000.000
12. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Barang dan Jasa	Seluruh SKPD se Kab. Lam-Sel	Berita Acara Serah Terima Barang	120.000.000	130.000.000	135.000.000	150.000.000	160.000.000
1. Peningkatan kelahehan pangan	1. Operasional tim pemantauan harga sembako di kab. Lam-sel	Termonitornya harga sembako serta keberadaan stok sembako di pasaran kab. Lam-sel	Masukan - Jumlah dana - Jumlah tenaga 32 orang Kekurangan - Lokasi kegiatan =17 kec - monitoring - Membuat laporan harga sembako Hasil - data laporan harga sembako	150.000.000	175.000.000	180.000.000	190.000.000	200.000.000
	2. Operasional tim monitoring pendistribusian hasil kab. Lam-sel	Terdistribusinya hasil ke RTS-PM sesuai dengan rencana di 251 Desa / blok distribusi	Masukan - Jumlah Dana - Jumlah Tenaga = 32 Orang Kekurangan - Lokasi = 17 Kecamatan - Sasaran Kegiatan 251 Desa - Monitoring laporan pendistribusian Hasil - Terselenggaranya Raskin kepada RTS-PM	350.000.000	350.000.000	375.000.000	400.000.000	425.000.000
2. Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah	Facilitasi pertemuan pelaku UMKM dengan Lembaga perbankan	Terlaksananya pertemuan antara pelaku UMKM dengan Lembaga perbankan	Masukan - Jumlah Dana - Jumlah Tenaga 32 Org Kekurangan - Jumlah pertemuan - Jumlah Peserta - Jumlah Kecamatan Hasil - Peserta pertemuan akan mampu mengembangkan usaha dengan	150.000.000	150.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000

[illegible]

[illegible]

[illegible]

	Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah		Peningkatan kapasitas dan kualitas PNS	Pengembangan Program Nasional SAPK, Pengurusan KPE Tahap 2 dan 3, Pengurusan Konversi NIP Baru PNS, Verifikasi dan Validasi Data Kepegawaian & Penataan data file seluruh pegawai	300.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000
	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Iktan Dinas			Pengiriman pegawai tugas belajar program doktor (S3), pengiriman pegawai tugas belajar program pasca sarjana (S2), pemberian bantuan uang saku bagi pegawai tugas belajar internal pusat, pemberian bantuan uang saku bagi Praja IPDN & Penyelenggaraan seleksi bertas Pelamar Calon Praja IPDN	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000
	Ujian Dinas dan Ujian Penyusunan Kembali Pangkat		Tertulisannya terlebi administratif penakan PNS tepat waktu	Pelaksanaan ujian dinas, Pelaksanaan ujian penyusunan ijazah	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
	Pelaksanaan Pelayaran Penakun PNS Terpaku			Sosialisai bagi PNS yang akan memasuki BUP Tahun 2010 - 2015 Pengurusan SK Pension ke Internal Pusat (BKN, Karney V BKN dan Sahng)	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Pemberian Penghargaan SLKS PNS dan Pemberian Kartu-Kartu Kepegawaian		Perintikan motivasi PNS dan Tersesalkannya penilaian angka kredit PNS Fungsional	Penyerahan penghargaan SLKS PNS, Pemberian Kartu Pegawai, Pemberian Kartikamu, Pemberian Taspen, Pengurusan Kartu Akses & Pengurusan Baperdam	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Penyediaan Penilaian dan Penetapan Angka Kredit PNS Fungsional		Tersesalkannya usulan kenaikan pangkat dan gaji berkala PNS	Penetapan PAK Fungsional Guru dan Non Guru Periode April dan Oktober	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000
	Penyediaan Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala		Tersesalkannya peraturan kepegawaian dan perubahan-kepegawaian	Pengurusan kenaikan pangkat Sistem Satu Atap dengan Tim Kerja Terpadu Karney V BKN Pemberian kenaikan gaji berkala	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000	175.000.000
	Sosialisai tentang Peraturan Pokok-pokok Pengelolaan Kepegawaian Daerah		Peningkatan koordinasi program kerja kepegawaian kepada unit kerja	Sosialisai bagi pejabat pengelola kepegawaian unit kerja	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000
	Penyelenggaraan Rapat Kerja Kepegawaian Tingkat Kabupaten		Tersusunnya kebutuhan kormasi PNS dengan baik	Rakor Kepegawaian Pejabat Pengelola Kepegawaian Unit Kerja Se-Kabupaten Lampung Selatan	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000

[illegible]

[illegible]

Badan PP & KB	850.000.000	750.000.000	650.000.000	550.000.000	Terbentuknya kelompok UPPKS	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga TK/TKW dan tumbuhnya kesadaran sosial dalam wadah keluarga	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
950.000.000	850.000.000	750.000.000	650.000.000	550.000.000	Terbentuknya kelompok bina keluarga TK/TKW	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga TK/TKW dan tumbuhnya kesadaran sosial dalam wadah keluarga	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
95.000.000	85.000.000	75.000.000	65.000.000	55.000.000	Terbentuknya kelompok bina keluarga TK/TKW	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga TK/TKW dan tumbuhnya kesadaran sosial dalam wadah keluarga	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
75.000.000	65.000.000	60.000.000	55.000.000	50.000.000	Terbentuknya kelompok bina keluarga TK/TKW	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga TK/TKW dan tumbuhnya kesadaran sosial dalam wadah keluarga	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
650.000.000	600.000.000	550.000.000	500.000.000	450.000.000	Kelompok BKB dapat berjalan sesuai mekanisme yg ada	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga TK/TKW dan tumbuhnya kesadaran sosial dalam wadah keluarga	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
400.000.000	375.000.000	350.000.000	330.000.000	328.500.000	Seluruh Keluarga yang ada	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga TK/TKW dan tumbuhnya kesadaran sosial dalam wadah keluarga	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
55.000.000	50.000.000	45.000.000	43.000.000	42.000.000	Tersedianya sarana untuk mendata	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga TK/TKW dan tumbuhnya kesadaran sosial dalam wadah keluarga	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
40.000.000	35.000.000	30.000.000	25.000.000	23.500.000	- 17 orang - 17 orang - 110 orang	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga TK/TKW dan tumbuhnya kesadaran sosial dalam wadah keluarga	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	75.000.000	Adanya data TK/TKW asal Kabupaten Lampung Selatan	Terwujudnya peningkatan kesejahteraan keluarga TK/TKW dan tumbuhnya kesadaran sosial dalam wadah keluarga	Peningkatan pendapatan kelompok UPPKS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
BAGIAN BINA PEMERINTAHAN	140.000.000	135.000.000	130.000.000	125.000.000	97 Desa di 13 Kecamatan se Kab. LS	Pendidikan Nama Unsur Rupa bumi (Nama Desa/ Kelurahan di Kab. LS	Inventarisasi dan laporan laporan	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
BAGIAN BINA PEMERINTAHAN	-	-	-	125.000.000	SKPD Se-Kab. LS	Terselenggaranya Data LPPU yang baik	Inventarisasi Data Penyelenggaraan Pemerintahan Umum SKPD Kab. LS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
BAGIAN BINA PEMERINTAHAN	150.000.000	145.000.000	140.000.000	130.000.000	Fasilitas, Medial penyelesaian Kasus Tanah di Kab. LS	Masyarakat di Kab. LS	Pembentukan Unit Khusus Pengabdian Masyarakat di Bidang Pertanian di Kab. LS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
BAGIAN BINA PEMERINTAHAN	-	-	-	1.200.000.000	4 Kecamatan	Terbentuknya Administrasi Badan Wilayah Antar Kecamatan	Pembentukan Tim Bina Wilayah di 4 Kecamatan yaitu Tanjung Sari, Way Sutan, Way Pang, Bakahehi	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
BAGIAN BINA PEMERINTAHAN	150.000.000	150.000.000	150.000.000	150.000.000	17 Kecamatan	Menunjang Terbit Administrasi dan terbentuknya Data Wilayah Kecamatan	Tersedianya Buku Profil Kecamatan Se- Kab. LS	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
BAGIAN BINA PEMERINTAHAN	-	-	-	150.000.000	Kecamatan Se- Kab. LS	Masyarakat di Kab. LS	Peningkatan Kerjasama dengan aparat keamanan terkait dalam rangka pemberian	Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

	Bimbingan Teknis Pegawai Bela Negara	Pembinaan dan Pelatihan Pegawai atau Linmas Bela Negara se Kab. LS	Pegawai Linmas Se- Kab. LS	17 Kecamatan, 1 Tahun	350.000.000	-	-	-	BAGIAN BINA PEMERINTAHAN
	Pendataan Peraturan Perundang- undangan	Penyebutan Sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN RI Nomor 4 Tahun 2010	Ajar para pihak terkait dapat mengerti dan memahami Implementasi pelaksanaan peraturan dan pendayagunaan tanah berdasar	Kepengabdian dari masyarakat di Kab. LS, 2 Tahun	112.000.000	120.000.000	-	-	BAGIAN BINA PEMERINTAHAN
	Fotokopinda	Rapat Koordinasi Pimpinan Daerah	agar terwujudnya koordinasi secara sinergis antar unsur pimpinan di daerah Kab. LS	Pejabat Pimpinan di Daerah Kab. LS	125.000.000	125.000.000	125.000.000	125.000.000	BAGIAN BINA PEMERINTAHAN
	Pembuatan Buku Data Inventarisasi Kode dan Data Wilayah Kab. LS	Tersedianya Buku Kode dan Data Wilayah Administrasi Kab. LS	Kecamatan Se-Kab. LS	148 Desa, 3 Kelurahan di Kab. LS	-	90.000.000	90.000.000	95.000.000	BAGIAN BINA PEMERINTAHAN
	Data Monografi Kecamatan	Inventarisasi Data 17 Kecamatan se- Kab. LS	Terbnyaya Administrasi Pemerintahan Kecamatan Se- Kab. LS	17 Kecamatan	-	90.000.000	92.000.000	94.000.000	BAGIAN BINA PEMERINTAHAN
	Penataan Kelembagaan	Menda dan Menyusun Desain Struktur Kelembagaan Perangkat Daerah	Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Kab. LS	Tersusunnya dan terlaksanya Kelembagaan Perangkat Daerah Kab LS sesuai dengan kebutuhan, Kemampuan Keuangan, Cakupan Tugas, Kapasitas Pendukung, Potensi, Karakteristik, sarana dan Prasarana untuk Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	200.000.000	150.000.000	175.000.000	200.000.000	BAGIAN ORGANISASI
	Penilaian Analisis dan Formal Jabatan	Penyusunan Rincian Tugas Jabatan pada Perangkat Daerah Pejabatannya Anjib pada Perangkat Daerah Kab. LS	Sekian Kerja yang direrualsi kelembagaannya Sekian Kerja	Tersusunnya Rincian Tugas Jabatan Perangkat daerah Kab. LS Terlaksananya Analisis Jabatan terhadap seluruh PNS pada 4 Saluran Kerja	150.000.000	-	-	175.000.000	BAGIAN ORGANISASI
		Berkas Anjab Penyusunan Laporan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pemberantasan Korupsi	60 orang Pentab LS	Tersedianya Tenaga Anjab Tersusunnya Laporan Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Peningkatan Pemberantasan Korupsi setiap semester di lingkungan Kab. LS	125.000.000 80.000.000	-	85.000.000	125.000.000 100.000.000	
	Ketatakelolaan	Peningkatan Kualitas Aparatur di Bidang Disiplin Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	Peningkatan Kualitas Aparatur di bidang disiplin Meningkatkan Kualitas SDM Aparatur	Tertelaksananya Standartisasi Tertelaksananya Sosialisasi dan Evaluasi Budaya Kerja	125.000.000	-	-	150.000.000	BAGIAN ORGANISASI
					75.000.000	150.000.000	175.000.000	250.000.000	

[illegible]

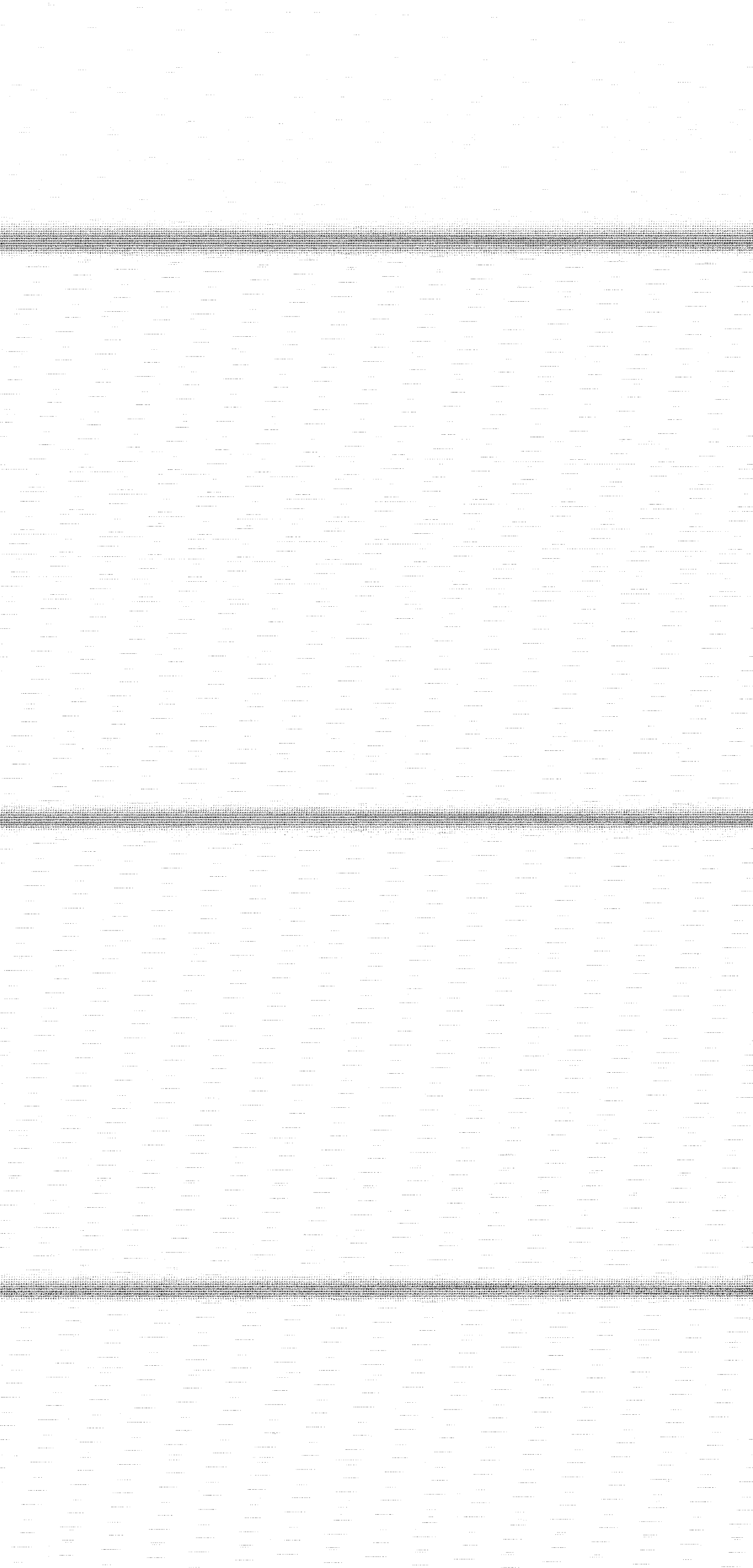
Program Peningkatan Pelayanan & Administrasi Pertanahan	Tatausaha Pertanahan	Pegawai Dinas PU Kab. Lampung Selatan	Melaksanakan Tata Usaha Pertanahan	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	500.000.000	Dinas Pekerjaan Umum
Program Pendidikan & Pelatihan	Kursus-kursus Singkat & Pelatihan	Pegawai Dinas PU Kab. Lampung Selatan	Pertanahan dan urusan singkat	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	20.000.000	
Program Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	Pembangunan Gedung Kantor Rehabilitasi Sedang/Besar Gedung Kantor	Gedung Pemerintah Daerah Lampung Selatan Gedung Pemerintah Daerah Lampung Selatan	Pelaksanaan Kontrol fisik dan pendukungnya Pelaksanaan Kontrol fisik dan pendukungnya	5.000.000.000 3.000.000.000	5.000.000.000 3.000.000.000	5.000.000.000 3.000.000.000	5.000.000.000 3.000.000.000	5.000.000.000 3.000.000.000	
Peningkatan sarana dan prasarana	Pemeliharaan lagi basis kecamatan	terjaganya basis wilayah kabupaten dan memperkuat pendataan antar wilayah	17 Kecamatan	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	350.000.000	Kecamatan Natar
Meat 1	Peningkatan jalan aspal beton	Tersedianya kegiatan rutin Pertanahan	Tersedianya kegiatan rutin Pertanahan	138.800.000	138.800.000	138.800.000	138.800.000	138.800.000	Kecamatan Candipuro
	Peningkatan jalan aspal beton	Kelancaran Transportasi	Tersedianya Kegiatan	13.500 m	10.000 m	5.000 m	2.500 m	2.500 m	
	Jalan aspal Kecamatan : Sidoarjo (Way Pagi) - Bumiayu - Rane Selapan Sidoarjo - Sinar Palembang - Bala Linau Indah Sinar Palembang (Candipuro) - Kec. Tl. Way Sulu Sidoarjo - Cidamulya - Banyuwangi - Kec. Tl. Way Sulu Berhimpit Kencana - Banyuwangi Timorlud (Candipuro) - Kec. Pales	Transportasi Hasil Pertanian	Tersedianya Kegiatan	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	
	Pembangunan Jembatan Beton : SPP Rane Selapan SPP Timorlud Desa Rante Meya Jembatan Gantung DAS KATIBUNG (7 Butir)	Kelancaran Air Untuk Pertanian	Tersedianya Kegiatan	10 Unit	2 Unit	15 Unit	10 Unit	15 Unit	
	Eksploitasi Way Selampung Untuk Mengalir Air SPP dan SPS (Pompasial) Pembuatan Bendung Kadi Padi DAS Sungai Kalibung Normalisasi SPP dan SPS Rane IV Timorlud			3 bh					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



[illegible]

[illegible]

Program Pengadaan Bliket Padat dan Jengkol	16 Desa	Terwujudnya Pendapatan Petani	1,300,000,000	1,000,000,000
Program Pengadaan Bliket Kelapa	16 Desa	Terwujudnya Perencanaan dan Kelancaran Transportasi	700,000,000	1,200,000,000
Pengadaan Bliket	7 Desa	Peningkatan Pendapatan Tercapai	500,000,000	1,500,000,000
Program Pembangunan Lantai/Aspal	5 Desa	Terwujudnya Kelancaran Usaha Transportasi Usaha Masyarakat		1,500,000,000
Program Pembangunan Jembatan	3 Desa	Mempercepat Proses Belajar Mengajar		1,500,000,000
Program Pembangunan Onderlah	5 Desa	Meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini		1,500,000,000
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Rehab Gedung Sekolah	5 PAUD	Meningkatkan Pendidikan tentang Ilmu Agama Islam		1,000,000,000
Pembangunan Gedung PAUD	5 Desa	Meningkatkan Iman dan taqwa		1,000,000,000
Pembangunan TPQ	2 Desa	Terwujudnya Pengurangan Kemiskinan		200,000,000
Pembangunan masjid dan Pura	16 Desa	Terwujudnya Masyarakat		1,200,000,000
Pembangunan Gedung Poyanda	16 Desa	Terwujudnya Pengurangan Angka Kelahiran		720,000,000
Program Pembangunan MCK	16 Desa	Terwujudnya Semangat Kerja & Pelayanan Kader		625,000,000
Program Pengadaan Alat Kontrol	16 Desa	Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Petani		1,300,000,000
Pengadaan APE	16 Desa	Terwujudnya Pendapatan Petani		700,000,000
Pelatihan Kader BKG	7 Desa	Terwujudnya Pendapatan Petani		500,000,000
Program Pengadaan Bliket Padat & Jengkol				
Program Pengadaan Bliket Kelapa				
Pengadaan Bliket Mangrove				